GAYA RETORIKA KOMUNIKASI POLITIK PRABOWO



Sidik Suhada

Pengantar:
Pengamat Militer DR.Muhadjir Effendy, MAP

Salah satu kunci sukses dalam kampanye politik, dapat pula ditentukan oleh kepiawaian komunikator dalam mengemas dan menyampaikan pesan terhadap khalayak. Itulah sebabnya gaya retorika komunikasi politik menjadi menarik untuk disimak.

Buku analisis terhadap gaya retorika komunikasi politik Prabowo ini, hadir bukan untuk "menghakimi" sosok Prabowo Subianto Baik Prabowo sebagai individu maupun sebagai elit politik yang berlatar belakang militer. Namun, juga tidak diciptakan sebagai kekuatan pendukung propaganda politiknya. Tetapi, murni sebagai kajian wacana.

Buku analisis gaya retorika komunikasi politik Prabowo ini, secara detail mengungkap makna di balik produksi bahasa yang digunakan untuk mempengaruhi massa. Termasuk makna yang ada di balik bahasa verbal dan *non*-verbal yang ditampilkan Prabowo sebagai komunikator politik. Lantaran itulah, boleh jadi, buku ini menjadi relevan dibaca oleh siapa saja.

ISBN: 978-602-95027-0-1

LASMI

ISBN 978-602-95027-0-1
9 786029 502701

Sidik Suhada

GAYA RETORIKA
KOMUNIKASI POLITIK
PRABOWO

Lembaga Supremasi Media Indonesia
(LASMI)

Sidik Suhada

GAYA RETORIKA
KOMUNIKASI POLITIK
PRABOWO

Lembaga Supremasi Media Indonesia
(LASMI)

GAYA RETORIKA
KOMUNIKASI POLITIK
PRABOWO

Gaya Retorika
Komunikasi Politik Prabowo
Penulis: Sidik Suhada
Pengantar: DR.Muhadjir Effendy, MAP
Editor: Yunanto
Desain Sampul: Mardiyanto
Layout: Mardiyanto
Foto Sampul dari Facebook Prabowo
Cetakan Pertama Juli 2009
Penerbit:
LASMI
(Lembaga Supremasi Media Indonesia)
Jl. Raya Golek 1, Karangduren, Pakisaji
Telp. 0341-9270901, 471674
Malang-Indonesia.
Email: redaksi_lasmi@yahoo.com.

Sanksi Pelanggaran Pasal 72
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002
Tentang Hak Cipta

1. Barangsiapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 49 Ayat (1) dan Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/ atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta atau hak terkait sebagai dimaksud pada Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Suhada, Sidik
Gaya Retorika Komunikasi Politik Prabowo/ Sidik Suhada
Malang: Lembaga Supremasi Media Indonesia, 2009
xx,134 hal. ; 14,8 x 21 cm
ISBN: 978-602-95027-0-1

Prakata Penerbit

PENULIS buku ini adalah seorang jurnalis yang kini sedang menempuh studi S2 Program Studi Media dan Komunikasi FISIP Universitas Airlangga Surabaya. Karier jurnalis diawali pada tahun 1996 sebagai penulis lepas di Harian *Pikiran Rakyat*, Bandung. Sejak awal tahun 2005 penulis bergabung dengan Tabloid Hukum *Supremasi* yang diterbitkan oleh Lembaga Supremasi Media Indonesia (LASMI) di Malang.

Teknik pengumpulan materi, pengkajian, hingga analisis dan gaya penulisan buku ini, agaknya, tidak terlepas dari gaya jurnalistik penulis. Maklum, tatkala bergabung dengan Tabloid Hukum *Supremasi*, penulis memang didoktrin untuk —sekurang-kurangnya— memiliki 5 (lima) modal dasar sebagai jurnalis. Pertama, *pengetahuan* harus luas. Lewat pengetahuan lahirlah *persepsi* sebagai modal kedua, yaitu kemampuan membahas dan menganalisis serangkaian keadaan, kemudian menarik kesimpulan.

Berikutnya, *observasi* sebagai modal ketiga, yaitu kemampuan mengamati dan mendeteksi hal-hal yang tidak lazim dan hal-hal yang menarik hati. Setelah itu sang jurnalis juga harus memiliki modal keempat, yaitu mampu *menulis opini/artikel*. Dan terakhir, mampu *memanusiakan manusia* sebagai modal kelima. Maknanya, seorang jurnalis wajib memiliki dan menaruh perhatian terhadap manusia dalam arti seluas-luasnya. Tanpa modal tersebut jurnalis akan lekas kekeringan ide, dan daya kreasinya pun tumpul.

Buku berjudul *Gaya Retorika Komunikasi Politik Prabowo* ini memang tidak terlepas dari lima modal dasar yang dimiliki penulis. Indikatornya, antara lain, tampak pada ketekunannya berburu materi isi buku, mencermati, menganalisis, dan menyimpulkan serangkaian gaya retorika komunikasi politik Prabowo Subianto selama masa kampanye Pemilu Legislatif 2009. Sumber materi dan pengamatan penulis, antara lain dari *facebook* Prabowo, sederet peristiwa orasi politik Prabowo, dan wawancara Prabowo dengan berbagai stasiun televisi di Tanah Air.

Secara akademik, bisa jadi buku ini masih belum dapat disebut sebagai hasil karya ilmiah murni; meskipun metode penelitian yang digunakan penulis tetap mengacu pada metode analisis wacana. Konkretnya, memaknai teks pesan Prabowo baik verbal maupun *non*-verbal dalam konteks realitas sosial. Lantaran itu buku ini tetap layak dibaca oleh kalangan akademisi. Terutama para mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi. Bagi masyarakat umum, buku ini juga baik untuk dibaca oleh para politisi yang berminat mempelajari teknik penyampaian pesan serta gaya beretorika dalam komunikasi politik.

Itulah sebabnya buku *Gaya Retorika Komunikasi Politik Prabowo* ini menjadi layak dibaca oleh siapa pun. Kendati buku ini tidak dimaksudkan untuk menawarkan sebuah solusi ihwal bagaimana gaya retorika komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan kepada khalayak di dalam kampanye politik. Terbersit harapan pada penulis, buku ini mampu menghadirkan nuansa baru, melahirkan ide, dan gagasan para pembaca.

Akhirnya, pembaca boleh setuju atau tidak setuju terhadap isi buku ini. Bahkan, boleh pula menyanggah. Ruang untuk beda pendapat semacam itu terbuka lebar. Penulis pun tidak berniat menggurui. Buku ini dihadirkan tidak dengan tujuan untuk mendukung atau tidak mendukung Prabowo, apalagi menghakimi dan menistakannya. Semata-mata murni menghadirkan sebuah fakta yang disajikan dalam wujud analisis wacana.

Malang, Juni 2009
Penerbit

Fenomena Prabowo

Oleh: DR.Muhadjir Effendy, MAP

Ketika Sidik Suhada meminta saya untuk membuat pengantar buku yang ditulisnya "*Gaya Retorika Komunikasi Politik Prabowo*", saya langsung mengiyakan meskipun saya sebetulnya sangat sibuk dan belum membaca naskahnya. Pertimbangan saya, Sidik Suhada sudah cukup saya kenal. Sewaktu mahasiswa, Sidik Suhada adalah bimbingan saya dalam penulisan skripsi tugas akhir. Dengan demikian, saya tahu integritas dan kapasitas intelektual serta kecakapannya dalam dunia tulis-menulis. Kesan saya, ia adalah salah satu mahasiswa bimbingan saya yang memiliki kemampuan menulis sangat baik.

Sedangkan Prabowo Subianto, secara personal saya tidak cukup kenal. Namun, secara impersonal, tentu terlalu naif kalau saya tidak mengenalnya. Kontak pertama, dan tidak langsung dengan Jenderal Prabowo terjadi tatkala Tim Kopassus berhasil mencapai puncak Everest, tahun 1997. Saya selaku PR III Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) mengajukan permohonan agar tim pendaki puncak Everest Kopassus menularkan pengalaman sekaligus memberi pelatihan kepada unit kegiatan mahasiswa pecinta alam UMM. Permintaan itu dengan segera dipenuhi dengan mengirim tim yang dipimpin oleh seorang perwira menengah kepercayaannya, yaitu Letkol (Inf.) Pramono Edhie Wibowo (sekarang menjabat Danjen Kopassus).

Namun membuat pengantar tulisan buku yang mengupas salah satu sisi kehidupan mantan Danjen Kopassus tersebut adalah suatu yang tidak mudah. Pasalnya, ia adalah sosok yang, apabila dilihat dari banyak sisi, memiliki ambiguitas. Pribadi yang penuh warna. Termasuk berbagai kontroversi tentang dirinya. Baik yang terpublikasikan maupun yang bertebaran di dunia gosip.

Hal yang menjadi cacatan pertama saya adalah, di dalam prakata buku ini, Sidik Suhada memberi komitmen bahwa yang ia tulis "... tidak dimaksudkan untuk 'menghakimi' sosok Prabowo Subianto, baik secara individu maupun sebagai elit politik yang berlatar belakang militer". Komitmen itu yang saya pegang. Sebagaimana kita tahu, penggunaan kata

"menghakimi" sehari-hari sudah mengandung makna *peyoratif.* Kalau ada surat kabar memberitakan sekelompok massa telah "menghakimi" orang yang disangka pencuri, itu artinya bukan berarti massa itu bertindak bak hakim yang berusaha mengkaji dengan teliti tentang benar-tidaknya apa yang dituduhkan kepada yang bersangkutan. Namun, artinya, massa telah membuat orang itu babak belur sampai bentuknya tidak karuan, bahkan mati. Di sisi lain, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit oleh penulis, buku ini tentu juga bukan disusun sebagai buku pujian layaknya kitab *Manaqib*, yang mendiskripsikan hampir semua yang dianggap baik tentang sosok Prabowo.

Tentu sebagaimana lazimnya, Sidik Suhada pasti menghadapi kesulitan ketika berusaha menjadikan buku ini bukan sebuah buku "penghakiman" namun juga bukan buku "pujian". Apalagi buku ini bukan hanya bermaksud menyajikan fakta tapi juga sekaligus menjanjikan analisis yang seobjektif mungkin. Padahal setiap orang mempunyai pengetahuan *apriori* yang ada dalam alam bawah sadarnya. Pengetahuan *apriori* selalu ikut manakala seseorang membuat *judgment* terhadap sesuatu. Oleh sebab itu, dalam teori Fenomenologi dinyatakan bahwa yang namanya objektivitas itu dalam ilmu sosial tidak pernah ada, yang ada hanyalah inter-subjektivitas yang untuk mencapainya, prinsip keseimbangan dan proporsional dalam menyajikan fakta dan analisis dianggap sebagai cara yang manjur guna menghindari bahaya subjektivitas.

Tentu saya tidak bermaksud membuat penilaian atas karya Sidik Suhada ini cukup bersih dari unsur subjektivitas apa tidak. Mengenai hal itu terserah sepenuhnya kepada pembaca. Namun, yang jelas, jika buku ini diterbitkan sekarang adalah berada dalam momentum yang tepat. Saat mana banyak mantan jenderal TNI ikut meramaikan panggung perpolitikan Indonesia. Mulai mendirikan partai, menjadi pengurus partai, menjadi calon anggota legislatif, menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, hingga menjadi tim sukses. Dalam *ontran-ontran* (haru-biru) perpolitikan nasional saat ini, Prabowo menjadi salah satu dari puluhan mantan jenderal itu. Kendati demikian, menurut saya, ia termasuk yang paling memiliki nilai publisitas tinggi. Meskipun untuk saat sekarang

Prabowo telah mengurungkan ambisinya untuk bersaing menjadi orang nomor satu di Indonesia, karena tatkala tulisan ini di buat, ketua Dewan Pembina Partai Gerindra ini sudah memutuskan "hanya" menjadi calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum DPP PDI Perjuangan.

Sidik Suhada memulai buku ini dengan memaparkan beberapa kerangka teori-teori yang mungkin dimaksudkan untuk membekali pembaca sebelum memasuki pokok persoalan, dilanjutkan dengan memaparkan "situs-situs" realitas sosial yang –pinjam istilah Peter L Berger—telah terinternalisasi ke dalam diri Prabowo. Bisa jadi dalam kerangka kerja teori arkheologi pengetahuan Michael Faucoult, hal tersebut disebut sebagai pengalaman yang sudah "menfosil" di alam kesadaran seorang Prabowo, yang kemudian menjadi energi pembentuk kepribadiannya. Kemudian pembahasan selanjutnya masuk ke dalam pembahasan inti yaitu tentang gaya retorika komunikasi politiknya.

Komunikasi Politik adalah, studi interdisiplin sebagai buah perkawinan antara Ilmu Komunikasi dengan Ilmu Politik. Dari disiplin Ilmu Komunikasi, Komunikasi Politik antara lain mengambil aspek kerangka kerja komunikasi; sedangkan dari Ilmu Politik, Komunikasi Politik antara lain mengambil aspek substansi politik. Suatu pesan dikirim oleh individu komunikator melalui tiga "bahasa". Rincinya, bahasa ucap *(verbal)*, bahasa wajah *(mimic)* dan bahasa tubuh *(gesture)*. Sedangkan substansi pesan, dalam konteks Komunikasi Politik adalah kekuasaan. Pengertian sederhana dari kekuasaan adalah bagaimana mempengaruhi orang lain agar orang lain tersebut bertingkah laku (berfikir, bersikap dan bertindak) sebagaimana yang dikehendaki.

Secara fenomenologis, analisis terhadap seseorang yang sedang bertindak sebagai komunikator politik, dimaksudkan untuk menemukan makna-makna politik di balik totalitas bahasa ucap, bahasa wajah dan bahasa tubuhnya.

Suatu Ekspresi bahasa (ucap, wajah, tubuh) seorang komunikator bisa dipahami secara berbeda-beda oleh penerima pesan (komunikan). Bahkan bisa berlawanan. Namun juga bisa jadi, ekspresi bahasa yang berbeda tetapi menghasilkan pemahaman yang sama bagi komunikan

yang berbeda. Misal, ada suatu ekspresi bahasa tertentu yang dipahami komunikan sebagai wujud dari pribadi yang santun, cermat, penuh perhitungan, tanggung jawab, matang, tulus dan sebagainya. Meskipun demikian bagi komunikan yang berbeda mungkin saja dipahami sebagai wujud ketidak tegasan, peragu, penuh pretensi dan sejenisnya.

Sementara itu ada suatu ekspresi bahasa oleh komunikator lain yang dipahami sebagai wujud dari pribadi yang tegas, berani, tanggung jawab, apa adanya dan seterusnya. Namun bagi komunikan yang lain, hal itu dipahami sebagai wujud dari arogansi, ketidak matangan mental, *grusa-grusu*. Secara sederhana, apa yang harus dilakukan oleh seorang komunikator politik adalah memproduksi pesan-pesan politik melalui bahasanya dan menerpakannya sekuat dan sesering mungkin, sehingga pemahaman positif terhadap pesan-pesan disampaikan akan lebih tertanam di dalam kesadaran komunikan, bukan yang sebaliknya.

Self Identity

Prabowo adalah anak Profesor Sumitro Djojohadikusumo, seorang priyayi Jawa yang dikenal sebagai begawan ekonomi Indonesia di era pemerintahan Presiden Soeharto. Namun berdasarkan penuturan Prabowo, hal yang pertama-tama menjadi *significant other* bagi dirinya adalah bukan sang ayah, melainkan kedua pamannya, yang tentara pejuang kemerdekaan dan gugur dalam pertempuran Tangerang tahun 1946. Sedari kecil, tiap tahun ia diajak sang kakek berziarah ke makam, dan kakeknya selalu mengingatkan: "Ini pamanmu yang gugur untuk republik !". Bahkan nama akhir "Subianto" adalah nama salah satu pamannya yang gugur itu. Pengalaman itulah yang membangkitkan hasratnya untuk memilih menjadi tentara.

Jadi unsur pertama dan utama pembentuk kepribadian Prabowo adalah citra ideal *(ideal image)* seorang prajurit. Dan itulah *self identity* sejati seorang Prabowo. Hal tersebut menguatkan temuan penelitian yang pernah saya lakukan terhadap perwira-perwira menengah yang terkategori berhasil meniti karir. Mengapa mereka berhasil? Ternyata karena kepribadian militer mereka sudah mulai terbentuk sejak masih berada dalam lingkungan keluarga.

Di mana sang ayah atau kakak biasanya menjadi *significant other.* Ini artinya apa? *Pertama,* bahwa kebanyakan keluarga tentara mempersepsi pekerjaan militer sebagai profesi yang mulia atau terhormat oleh sebab itu cenderung diwariskan kepada generasi selanjutnya. *Kedua,* keluarga tentara merupakan sumber potensial untuk menyiapkan calon-calon prajurit TNI yang baik, karena prajurit yang berasal dari keluarga tentara kepribadian militernya sudah terbentuk sejak dini; tatkala mereka belum memasuki pendidikan militer.

Kembali ke sosok Prabowo, karena kepribadian militer yang sudah terbentuk sejak sebelum masuk pendidikan militer itulah maka ketika suatu saat harus memilih antara melanjutkan studi ke Amerika Serikat atau masuk AKABRI bagi Prabowo bukanlah pilihan sulit. Pasalnya, tumbuh dari keluarga intelektual, tampaknya juga mempengaruhi pandangannya mengenai dunia militer yang tidak hanya dia pandang sebagai seni, melainkan juga ilmu pengetahuan. Hal itu menjadi motivasi instrinsiknya untuk bukan hanya sekadar menjadi tentara tulen, tapi sekaligus juga ilmuwan militer. Ada kejadian, sebagaimana dituturkan oleh Ken Conboy (*Kopassus Inside Indonesia's Special Forces,* Equinox Publishing, 2003), mengutip cerita Jenderal Himawan Sutanto tatkala menjadi guru militernya Prabowo: *"I was lecturing about Liddell Hart's writings on indirect attack and asked for comment, Prabowo was the only one in class that could recite the theory".*

Ken Conboy mencatat, ketika Letnan Satu (Inf.) Prabowo memimpin Unit Nanggala 28 dalam operasi pembebasan Timor Timur, ia menjadi komandan kompi termuda (26 tahun). Baginya ini adalah tugas tempur *(tour of combat)* kali kedua di medan tempur Timor Timur setelah tugas sebelumnya bergabung dalam Unit Nanggala 10. Dan dalam tugas tempur untuk kali ketiga, dirinya nyaris tewas dalam kepungan pasukan Fretilin.

Kendati sebagai komandan kompi termuda, tetapi dalam tugas tempur yang ke dua pasukan yang dipimpinnya bersama pasukan Batalyon Infantri 744 Pimpinan Letkol (Inf.) Yunus Yosfiah berhasil menewaskan Presiden Fretelin Nicolao Lobato. Seminggu kemudian pasukannya, Unit Nanggala 28 juga berhasil menewaskan Wakil Panglima Perang Fretilin Guido Soares.

Ada yang tidak lazim dalam perjalanan karir militer Prabowo, yaitu sama sekali tidak pernah mengalami tugas teritorial. Padahal pengalaman tugas teritorial adalah sangat penting bagi seorang prajurit TNI AD. Selama melaksanakan tugas teritorial, seorang prajurit perwira mempunyai kesempatan belajar dan menguji kemampuan diri, termasuk kemampuan kepemimpinannya. Kemampuannya yang selama ini diperagakan untuk lingkungan militer sempit yang bersifat *total institution* untuk diterapkan di dalam lingkungan sosial yang memiliki spektrum luas, majemuk dan kompleks. Hal yang wajar, prajurit TNI yang dalam karirnya mampu mencapai jenjang perwira tinggi, antara tugas di pasukan, di lembaga pendidikan, dan tugas teritorial biasannya semuanya pernah dialami secara proporsional dalam kerangka *tour of duty* dan *tour of area*. Tapi hal itu tampaknya tidak demikian bagi Prabowo.

Special Forces

Hampir seluruh masa tugas Prabowo dihabiskan di dalam jajaran pasukan khusus *(special forces)*, yaitu Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI AD, sebagian lagi dihabiskan dijajaran pasukan elit Kostrad. Sempat bertugas memimpin lembaga pendidikan militer itupun masih berada di dalam lingkungan pasukan khusus (Kopassus Grup 3) dan hanya sekejap bertugas dilembaga pendidikan militer lagi di penghujung karirnya.

Di negara manapun, adanya pasukan khusus adalah dimaksudkan untuk menyediakan sebuah unit militer yang sangat terlatih untuk melaksanakan tugas-tugas operasi yang tidak biasa *(unconvesional)*, khususnya untuk kontra insurgensi. Pada dasarnya, secara ideal pasukan khusus diperlengkapi dengan kemampuan yang diperlukan untuk pertempuran dalam perang yang bersifat asimetris. Termasuk kemampuan menjalankan operasi dalam unit-unit kecil bahkan sendirian (Ewen Southby & Tailyour, *Special Forces Recognition Guide*, Collins, 2005) .

Pasukan Khusus adalah pasukan elit, tapi tidak semua pasukan elit adalah pasukan khusus. Organisasi pasukan khusus dirancang sebagai unit yang berdiri sendiri, dan memiliki kinerja yang sangat berbeda dengan organisasi tentara reguler, agar dalam mengemban tugas-tugas

khusus terbiasa tidak tergantung dengan mekanisme hirarkhi komando sebagaimana satuan militer konvensional. Prajurit pasukan khusus menyandang kualifikasi komando yaitu prajurit yang sudah menempuh berbagai latihan tempur tingkat tinggi *(higly trained in combat)*.

Di dalam proses perekrutan calon prajurit pasukan khusus biasanya tingkat kegagalannya sangat tinggi, karena prasyarat yang dituntut dari seorang calon pasukan khusus adalah harus serba sempurna, yang terbaik dari yang terbaik. Karena itu pasukan khusus sering disebut "tentara di dalam tentara".

Jumlah personel pasukan khusus di suatu negara biasanya sangat kecil, antara 10 sampai 15 persen dari total jumlah personel militer (Ewen Southby-Tailyour, Special Forces Recognition Guide, Collins, 2005). Sebagai bandingan, pasukan khusus tentara Amerika Serikat *(the United States Army Special Forces)* yang sering dijuluki *Green Berets* hanya memiliki 4.500 personel. Besaran jumlah personel di Kopassus pernah menjadi kontroversi. Baik ketika dirampingkan dari sekitar 6.000 personel menjadi 3.000 personel pada era kepemimpinan Sintong Panjaitan maupun ketika dimekarkan kembali menjadi 6.000-an di era kepemimpinan Prabowo Subianto (Sintong Pandjaitan, *Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando*, PB Kompas, 2009). Bahkan, pada awalnya, Kopassus sewaktu masih bernama RPKAD kekuatannya kurang lebih setingkat brigade, dipimpin oleh kolonel.

Mengingat sebagian besar waktunya dihabiskan di dalam lingkungan Kopassus, maka lingkungan sosial inilah yang sejatinya banyak membentuk karakter dan kepribadian Prabowo, di samping juga sebaliknya, Prabowo tentu banyak ikut andil dalam proses perkembangan institusi Kopassus. Realitas ini bisa dijadikan alat penjelas mengenai mengapa karakter dan kepribadian seorang Prabowo demikian. Mungkin tidak jauh-jauh dengan semboyan Kopassus itu sendiri: "Berani, benar, berhasil".

Kini mantan Danjen Kopassus ini mencoba beralih pengabdiannya kepada bangsa melalui politik. Sekalipun prajurit pasukan khusus dianggap memiliki kualifikasi profesionalitas terbaik dari yang terbaik, tetapi ketika kemampuan itu harus ditransfer ke dunia sosial-politik pastilah memerlukan persyaratan-persyaratan lain.

Di negara-negara besar, pasukan khusus biasanya hanya ditugaskan untuk melaksanakan operasi-operasi khusus dan bersifat strategis. Oleh sebab itu prajurit pasukan khusus, terutama pimpinannya dituntut memiliki pemahaman yang sangat baik mengenai visi dan misi strategis yang diemban yang biasanya terkait langsung dengan masalah keamanan negara. Memiliki kemampuan membaca situasi dan mendiagnosis dengan tepat mengenai persoalan yang harus diselesaikan dalam tugas yang dibebankan kepadanya. Kemudian menganalisis, menyimpulkan, menyusun target dan bertindak secara mandiri. Dengan kemampuannya yang di atas rata-rata pasukan reguler, risiko dan pertanggungjawaban yang harus ditanggung unit pasukan khusus juga lebih berat. Dalam medan tempur taktis pasukan reguler boleh hanya berpikir *"to kill or to be killed"*, membunuh musuh atau dibunuh oleh musuh. Namun sebagai seorang prajurit pasukan khusus bisa saja dalam sebuah tugas operasi strategis dihadapkan pada pilihan ekstrim, yaitu *"to kill or let the state to be destroyed"*, membunuh musuh –yang dengan itu mungkin ia akan terperangkap dalam persoalan hukum— atau membiarkan negara dihancurkan oleh musuh.

Sebagaimana dinyatakan oleh Bruce Berkowitz dalam *"The New Face of War"* (The free press, 2003), medan perang yang asimetris akan lebih banyak terjadi di abad 21 di bandingkan dengan medan perang konvensinal. Akan marak, penggunaan strategi, taktik, dan senjata-senjata tidak biasa *(unconventional)* oleh teroris lintas negara, pemberontakan, jaringan kejahatan bersenjata, jaringan obat terlarang, penyelundupan dan sejenisnya. Semua itu akan tepat kalau tugas penanggulangannya diserahkan kepada unit-unit pasukan khusus yang terlatih di bidangnya. Namun yang harus diwaspadai, medan perang semacam itu dewasa ini sangat mudah menggelincirkan yang bersangkutan ke dalam isu pelanggaran HAM, atau persoalan hukum yang lain, yang pada berikutnya, yang ujung-ujungnya bisa menyeretnya menjadi seorang terhukum. Mulai dari hukuman mati, masuk penjara, harus menanggung stigma seumur hidup, sampai namanya akan dikenang dalam arti *notorious*.

Bagi seorang prajurit profesional apabila hal itu harus terjadi, itu adalah merupakan pengorbanan dan resiko profesi. *Toh* itu tidak seberapa dibanding pengorbanan yang seharusnya, yaitu nyawa. Itulah panggilan mulia seorang prajurit profesional sejati.

Oleh karena itu, Samuel Huntington dalam *Soldier and The State* menyatakan, justru karena tingginya tingkat resiko, dan keluhuran tanggung jawab sosial yang harus diemban oleh seorang prajurit itulah maka, dibandingkan dengan bidang pekerjaan yang lain, bidang pekerjaan militer di anggap yang paling mendekati kriteria ideal sebagai pekerjaan profesional. Memang, sebagaimana bidang pekerjaan profesional yang lain, di dalam pekerjaan militer juga sangat mungkin terjadi malapraktik. Bisa saja seorang jenderal melakukan malapraktik dalam menjalankan tugas. Bukankah jenderal juga manusia?

Mengakhiri tulisan pengantar ini ada baiknya disimak kata-kata bijak dari Montgomery of Alamien dalam *The Path of Leadership*, bahwa pengetahuan dan pelatihan memang sama-sama diperoleh oleh prajurit karir, tetapi masih ada sifat-sifat pribadi dan profesional yang akhirnya membedakan kemampuan mereka, yang menentukan siapa yang bakal mengakhiri karirnya sebagai kolonel, dan siapa yang jenderal. Meskipun seorang prajurit memiliki semua keterampilan pribadi dan profesional yang dianggap diperlukan untuk komando tertinggi, tetapi tidak ada jaminan ia akan sejajar dengan tokoh-tokoh militer yang tetap dikenang. Di sini yang paling menonjol adalah, justru faktor waktu dan ruang, sebuah momentum dalam sejarah dan posisi sang prajurit dalam momentum itu.

Akhirnya, walaupun bukan yang paling penting dalam karir seorang prajurit adalah keberuntungan, atau nasib, atau apapun orang menyebutnya. Bahkan, orang sekaliber Jenderal Napoleon pun berkata, di atas segala-galanya, adalah lebih baik menjadi orang yang beruntung. Adapun prajurit yang gagal adalah prajurit yang diserahi perubahan penting tetapi menolak memanfaatkannya.

Malang, 02 Juni 2009

Prakata Penulis

Awalnya, rasa "penasaran" di benak penulis. "Penasaran" menyimak banyak mantan aktivis mahasiswa angkatan 1998 "mengabdi" kepada sejumlah mantan jenderal TNI, di panggung politik pada pemilu 2009. Padahal, dahulu, mereka adalah barisan mahasiswa kritis, menuntut pembubaran Dwifungsi TNI/ABRI. Mereka juga menuntut militer yang berada di jagad politik praktis dan di dunia bisnis riil, ditarik dan dikembalikan ke barak masing-masing.

Dari rasa "penasaran" itu, lahirlah ide menulis buku ini. Namun, buku ini tidak dihajatkan untuk mencari alasan pembenar dari sudut pandang kalangan mantan akitifis mahasiswa dimaksud. Buku ini juga tidak bermotif menghakimi atau mencari dosa-dosa politik masa lalu para mantan jenderal TNI yang terjun ke kancah politik praktis, pemilu 2009.

Jujur saja, dalam perkembangan ide menulis buku ini, akhirnya penulis menukik hanya pada satu sosok mantan Jenderal TNI. Sosok dimaksud adalah, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prabowo Subianto. Hal yang paling menarik pada sosok mantan Panglima Kostrad tersebut, dari sudut pandang subjektif penulis, tertuju pada gaya retorika komunikasi politiknya.

Hal lain adalah, fakta bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang didirikan pensiunan jenderal bintang tiga tersebut mampu meraup 5,36 % suara sah nasional, atau setara dengan 30 kursi DPR RI pada pemilu 2009 (rekapitulasi KPU, 9 Mei 2009). Maka, wajar fakta tersebut diakui sebagai sebuah prestasi Prabowo dan Partai Gerindra yang baru kali pertama mengikuti pemilu, namun mampu lolos *parliamentary threshold* (2,5%); meski "hanya" di peringkat delapan dari sembilan parpol yang lolos ambang batas tersebut.

Penajaman penulis pada ide pokok "gaya retorika komunikasi politik Prabowo Subianto", sungguh bukan karena penulis mengagumi anak Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo itu. Bukan pula karena penulis menjadi pendukung atau simpatisan Partai Gerindra. Pasalnya, maaf, penulis tetap konsisten untuk tidak memilih partai politik apa pun pada pemilu 2009, kendati pilihan tersebut sempat diharamkan oleh MUI.

Buku ini juga tidak dimaksudkan untuk "menghakimi" sosok Prabowo Subianto, baik sebagai individu maupun sebagai elit politik yang berlatar belakang militer. Bab demi bab dalam buku ini penulis sajikan sebagai sebuah mata rantai yang saling terkait. Diawali dari ihwal latar belakang Prabowo dan keluarga besar Profesor Sumitro; hingga terbentuknya kepribadian khas Prabowo. Penulis, dari berbagai sumber, juga menuangkan ihwal karier militernya, aneka masalah yang menyelimuti di penghujung karier militernya, persahabatannya dengan Raja Yordania, karier bisnisnya bersama adik (Hashim S. Djojohadikusumo), hingga semua itu membentuk rangkaian gaya bahasa dan retorika politiknya saat berlaga di jagad politik praktis, pemilu 2009.

Penulis perlu "buka kartu", sesungguhnya penulis hanya mantan jurnalis muda yang masih terus berkeinginan belajar menyimak segala sesuatu, sebagaimana layaknya kelaziman seorang jurnalis. Tidak ada unsur dan muatan politis apa pun yang terselubung di balik penulisan buku ini. Kendati demikian, penulis mengakui, objektifitas individu seorang jurnalis juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan sikap politiknya secara subjektif.

Ketika kali pertama berkeinginan menulis buku ini, penulis sempat berfikir ingin mengumpulkan semua hasil rekaman video orasi politik Prabowo selama melakukan kampanye di berbagai daerah. Selain itu juga mengumpulkan semua hasil rekaman video pada saat Prabowo diwawancara di televisi. Namun, hingga naskah buku ini ditulis, sedikit rekaman video yang dapat penulis kumpulkan sebagai bahan. Sehingga, boleh jadi, buku ini tidak dapat mewakili secara keseluruhan dari gaya retorika komunikasi pensiuan jenderal TNI bintang tiga tersebut.

Bahan berupa rekaman gambar video, penulis dapatkan dari hasil *downloads* di http://www.youtube.com yang dibuat oleh Tim Kampanye Prabowo Subianto. Selain itu, video juga penulis peroleh pada saat Prabowo diwawancarai disebuah stasiun televisi kabel di Jakarta. Hal itu pun penulis dapatkan dari hasil *downloads* di http://www.youtube.com. Bahan lain, penulis dapat dari dokumen liputan Metro TV Biro Surabaya yang sempat mengambil gambar Prabowo pada saat melakukan kampanye terbuka di Stadion Deltras, Sidoarjo, 17 Maret 2009.

Selain melakukan kampanye politik secara terbuka dengan cara menghadirkan massa, mantan Panglima Kostrad tersebut juga secara aktif melakukan kampanye melalui situs jejaring sosial *facebook*. Awalnya, penulis hanya tertarik pada gaya retorika komunikasi politik yang dibangun Prabowo melalui situs tersebut. Namun, penulis merasa "ada sesuatu yang kurang" jika hanya melihat gaya retorika komunikasi politik Prabowo yang ditulis melalui situs tersebut. Pasalnya, bisa jadi, apa yang ditulis di *facebook* tersebut bukan murni karya Prabowo, tapi produk tim suksesnya. Bertolak dari "kecurigaan" tersebut, penulis berusaha mencari berbagai rekaman kaset dan gambar video saat Prabowo berorasi dan diwawancara di stasiun televisi. Hal tersebut penulis maksudkan untuk menyimak ihwal bahasa *non*-verbalnya.

Sebenarnya, jauh sebelum KPU mengumumkan jadwal kampanye terbuka pemilu 2009, secara aktif Prabowo sudah melakukan kampanye melalui *facebook*. Namun, penulis hanya mengambil gaya retorika komunikasinya, terutama yang ditulis di *wall* dan *notes* - *facebook* miliknya, mulai 15 Maret 2009 hingga 5 April 2009.

Maka, jadilah buku ini hanya sebatas menyimak gaya retorika komunikasi politik Prabowo selama melakukan kampanye politik sebelum pemilu legislatif 9 April 2009. Terutama yang berkaitan dengan penggunaan bahasa politik untuk memaknai realitas yang ada. Termasuk bagaimana gaya Prabowo pada saat berkapasitas sebagai komunikator dalam menyampaikan pesan untuk mempengaruhi khalayak.

Penulis berasumsi, keberhasilan komunikator dalam mempengaruhi khalayak agar bersedia memberikan dukungan (suara) kepadanya, salah satunya adalah karena kepiawaian komunikator dalam menyampaikan pesan. Termasuk pemilihan kata dan bahasa guna membingkai pesan agar semakin menarik khalayak. Itulah sebabnya gaya retorika komunikasi politik sang komunikator menjadi layak disimak, bahkan dianalisis.

Namun, buku ini hanya sebatas menyimak gaya retorika komunikasi politik Prabowo selama melakukan kampanye politik. Tidak dimaksudkan untuk menawarkan sebuah solusi ihwal bagaimana gaya retorika komunikasi yang efektif untuk menyampaikan pesan kepada khalayak di dalam kampanye politik.

Ketidaksabaran dan keterbatasan waktu guna mengejar aktualitas agar penyusunan buku ini segera rampung sebelum pelaksanaan pilpres 8 Juli 2009, tentu mempengaruhi kualitasnya. Keterbatasan kemampuan penulis pun membuat buku ini masih banyak yang harus dibenahi dan diperbaiki. Penulis sadar, semua kekurangan tersebut tetap menjadi tanggungjawab penulis. Lantaran itulah penulis berharap ada masukan dan kritik dari semua pihak untuk memperbaiki buku ini.

Penulis merasa bahwa buku ini tidak akan pernah bisa hadir ke tangan pembaca tanpa bantuan sejumlah pihak. Terutama kepada Pak Yunanto, wartawan senior di Malang, Jawa Timur, yang menjadi guru penulis di dunia kewartawanan, dan sekaligus seperti orangtua sendiri. Tanpa bantuan beliau yang menyunting naskah, bisa jadi buku ini tidak akan pernah selesai.

Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada sahabat penulis di Singapura, Weni Yuniastuti, yang telah memberikan dorongan dan bantuan agar penulis bisa segera menyelesaikan buku ini. Para sahabat dan teman-teman di Metro TV Biro Surabaya; Heri Sustiyo yang selalu memberikan semangat dan dorongan kepada penulis, Akhsanul Ato, Akhmad Amrulloh, Wuri, Bayu, Jambos, dan yang lainnya. Eli Salomo dan Sugiharto yang telah membantu segala kebutuhan hingga buku ini bisa terbit.

Selain sahabat dan teman-teman, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada ibu penulis tercinta, Hj. Mudjirah dan almarhum ayah tercinta, Slamet. Tanpa orangtua terkasih, penulis tak akan pernah ada di muka bumi ini. Walaupun ibu penulis hanya seorang petani miskin dan almarhum ayah penulis hanyalah seorang serdadu Angkatan 1945 berpangkat rendah, pembantu letnan satu (peltu) TNI AD. Namun, mereka ikut andil pembentuk karakter penulis.

Penulis juga berterima kasih kepada belahan hati, Suwindarsih, S.H. yang kini masih menempuh program Magister Kenotariatan di Universitas Airlangga. Tanpa dorongan, bantuan, dan kesetiaannya dalam memotivasi penulis, jelas penulisan buku ini tak akan pernah rampung. Kepada dia pula buku ini penulis persembahkan. Akhirnya, penulis berharap buku ini bermanfaat bagi khalayak pembaca.

Surabaya, 9 Mei 2009
Sidik Suhada

Daftar Isi

Prakata Penerbit v
Pengantar: DR.Muhadjir Effendy, MAP vii
Prakata Penulis xvi
Daftar Isi xx

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Bahasa dan Ideologi 5
1.3. Gaya Komunikasi 8
1.4. Gaya dan Retorika 10

BAB II PRABOWO DALAM BINGKAI KELUARGA CENDANA 15
2.1. Misteri Sang Ayah 15
2.2. Karakter Soeharto 17
2.3. Kerusuhan Mei 1998 20
2.4. Dari Militer ke Panggung Politik 24
2.4.1. Masa Kecil 24
2.4.2. Karier Militer 27
2.4.3. Isu Kudeta dan Konflik di TNI AD 30
2.4.4. Pembunuhan dan Penculikan Aktivis 1998 36
2.4.5. Pergi ke Jordania 40
2.5. Membangun Kerajaan Bisnis 43
2.5.1. Mengendalikan Bisnis TNI 43
2.5.2. Bisnis Anak-anak Soemitro 44
2.6. Gerindra dalam Pusaran Politik 46

BAB III MENGUNGKAP MAKNA DI BALIK WACANA 53
3.1. Tematik dalam Jargon Politik 56
3.1.1. Sistem Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat 57
3.1.2. Tematik Ibu, Perempuan, dan Anak 65
3.1.3. "*Save Our Earth*" 71
3.1.4 Teknologi dan Pendidikan. 72
3.2. Adopsi Gaya Bahasa Soekarno 76
3.3. Pemilihan Kata Kunci 83

BAB IV GAYA BICARA PRABOWO SUBIANTO 89
4.1. Orasi Politik Lapangan 89
4.2. Gaya *Talkshow* Media 97
4.2.1. Gaya Dalam Bingkai Kamera Propaganda Politik 99
4.2.2. Gaya Bicara Petani Meski Bukan Petani 108
4.3. *Visual Image* di Balik Makna Cerita 117

BAB V PENUTUP 123
DAFTAR PUSTAKA 130
Tentang Penulis 134

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar-belakang

Figur presiden dari kalangan militer ternyata masih menjadi idola bagi sebagian besar masyarakat Indonesia. Hampir semua partai politik yang didirikan mantan jenderal Tentara Nasional Indonesia TNI berhasil memperoleh suara yang signifikan dalam pemilihan umum. Dari 44 partai politik yang mengikuti kontestasi pemilihan umum 9 April 2009, nyaris semua partai politik yang didirikan oleh para mantan jenderal memperoleh suara yang signifikan dan masuk 10 besar.

Bahkan, perolehan suara Partai Demokrat yang didirikan Jenderal TNI (Purnawirawan.) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dalam pemilu legislatif tahun ini mengalami kenaikan hampir tiga kali lipat dibandingkan dengan perolehannya pada pemilu 2004. Pada pemilu kala itu, sebagai pendatang baru, Partai Demokrat meraih suara sekitar 7 persen.

Namun, lima tahun kemudian, pada pemilu legislatif 9 April 2009, perolehan suara Partai Demokrat naik menjadi 20 persen lebih, dengan perolehan kursi DPR RI 148 kursi (rekapitulasi Komisi Pemilihan Umum, 9 Mei 2009). Banyak orang berpendapat, perolehan suara Partai Demokrat sebesar itu bukan karena keberhasilan mesin partai dan kemampuan mobilisasi massa yang dilakukan para kader partai, melainkan murni karena faktor sosok SBY, Presiden RI yang juga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat.

Begitu pula Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang didirikan mantan Pangkostrad Letjen TNI (Purnawirawan) Prabowo Subianto. Sebagai pendatang baru, partai berlambang kepala burung garuda ini ternyata mampu meraup 5,36 persen suara, hingga memperoleh 30 kursi DPR RI dalam pemilu 2009. Padahal, nama Prabowo Subianto pernah terpuruk pada masa akhir pemerintahan (mantan) mertuanya, Soeharto. Dia pernah disebut-sebut sebagai dalang dibalik penculikan aktivis mahasiswa dan

kerusuhan Mei 1998. Bahkan, pensiunan jenderal bintang tiga ini dikabarkan pernah "hendak melakukan kudeta" pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie[1].

Sejak tahun 1998, nama Prabowo benar-benar terpuruk. Malah, mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Danjen Kopassus) ini terpaksa dinonaktifkan dari dinas aktif setelah Dewan Kehormatan Perwira (DKP) ABRI menganggap dia bersalah dalam kasus penculikan aktivis mahasiswa tahun 1998. Boleh jadi, tak tahan menahan malu, anak tokoh Partai Sosialis Indonesia di zaman Orde Lama, Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, ini memilih pergi (*hengkang*) dari Indonesia, dan tinggal di Yordania. Setelah sekian lama namanya tenggelam dalam dunia percaturan elite nasional, tiba-tiba Prabowo muncul kembali. Malah nyaris setiap hari wajahnya muncul di layar televisi. Memperkenalkan diri sebagai calon presiden periode 2009-2014 dari Partai Gerindra yang dikemas dalam bentuk iklan.

Selain Prabowo, mantan Panglima ABRI Jenderal TNI (Purnawiran) Wiranto yang pada masa Orde Baru sama-sama sangat loyal terhadap Presiden Soeharto, juga mendirikan partai politik. Meskipun Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang dia dirikan hanya memperoleh dukungan suara sekitar 3 persen, tapi tetap masuk kategori partai 10 besar dari 44 partai peserta pemilu 2009.

Tak dapat dipungkiri, perolehan suara partai tersebut tak dapat dilepaskan begitu saja dari figur-figur di balik partai yang bersangkutan. Berdasarkan hasil survei harian *Kompas*, ketertarikan masyarakat terhadap figur calon pimpinan dari kalangan mantan militer ternyata masih cukup besar. Harian Umum *Kompas* pada Oktober 2007 melakukan jajak pendapat, dan hasilnya menyebutkan sekitar 46,6% responden memilih tokoh militer sebagai presiden. Padahal, hasil jajak pendapat yang dilakukan *Kompas* tahun 1998, sebanyak 64% responden menolak kemungkinan militer tampil kembali sebagai presiden (dalam Femi Adi Soempeno, 2009:11).

Hal tersebut menunjukkan citra Tentara Nasional Indonesia TNI) atau sebelumnya disebut Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) yang sempat terpuruk pada tahun 1998, telah pulih pada pemilu 2009. Jika dihitung sejak kemenangan SBY pada pemilu

2004, TNI hanya butuh waktu sekitar 6 tahun untuk mengembalikan "citra politiknya". Begitu juga Prabowo, hanya butuh waktu sekitar 12 tahun untuk dapat mengembalikan citra dirinya setelah namanya terpuruk pada tahun 1998. Meski, harus diakui, perjuangan mantan menantu Presiden Soeharto ini boleh dibilang masih sulit untuk bisa menjadi orang nomor satu di Indonesia. Pasalnya, partainya hanya memperoleh 5,36 persen suara.

Jika Prabowo masih bersikukuh mencalonkan diri sebagai calon presiden, Partai Gerindra harus berkoalisi dengan partai lain, agar memenuhi ketentuan Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden. Dalam Undang-Undang tersebut ada 33 syarat yang harus dipenuhi oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres). Salah satu di antaranya, partai atau gabungan partai pengusung capres-cawapres harus "bermodal" 20 persen suara hasil pemilu 2009, atau memiliki 25 persen suara sah nasional dalam pemilu 2009.

Buku ini tidak membahas masalah dengan siapa Prabowo akan berpasangan sebagai capres-cawapres pada pemilu presiden (pilpres) 2009. Buku ini juga tidak untuk memprediksi siapa bakal calon pemenang dalam pilpres 2009. Secara umum, buku ini hanya akan membahas masalah gaya retorika komunikasi politik mantan jenderal yang terjun ke dalam panggung politik pada pemilu legislatif dan pilpres tahun 2009. Titik fokus penulis pada Prabowo.

Penulis bukan pendukung Partai Gerindra, apalagi pendukung Prabowo. Namun, membahas masalah gaya retorika komunikasi politik Prabowo dalam ajang kampanye pemilu 2009, menurut penulis, cukup menarik. Apalagi ketika melihat perolehan suara hasil pemilu 9 April 2009, ternyata Partai Gerindra sebagai pendatang baru mampu masuk 8 besar.

Perolehan suara Partai Gerindra sebesar itu tentu tentu tak lepas dari sosok Prabowo yang dijadikan sebagai sentral figur partai. Dalam "posisi" tersebut, dia tentu memproduksi bahasa politik tertentu, sedemikian rupa, sehingga berdaya mampu untuk mengkontruksi dan menghegemoni masyarakat pemegang hak pilih. Lantaran itulah, peran bahasa politik menjadi sangat penting dalam sebuah kampanye di ranah politik praktis.

Pada titik itulah, menarik untuk melihat bahasa politik apa saja yang digunakan oleh Prabowo di dalam memaknai sebuah realitas. Lantas bagaimana cara dia (sebagai komunikator) di dalam menyampaikan pendapat dari realitas yang telah dimaknainya itu.

Para elite dan pimpinan politik, selalu menciptakan bahasa politik sendiri sebagai hasil dari representasi ideologi politiknya. Bahasa politik dimaksud kemudian disusun dan dikemas menjadi rangkaian kalimat. Disampaikan dan disebarkan secara luas dengan gaya retorika politik sesuai dengan yang dimiliki untuk memengaruhi khalayak. Sehingga khalayak pemegang hak pilih (sebagai komunikan), bisa terpengaruh dan menjatuhkan pilihan kepada komunikator dan partainya.

Selain disampaikan secara langsung kepada khalayak pada saat melakukan kampanye terbuka di lapangan, Prabowo juga menggunakan media massa untuk menyebarkan pesan dan gagasan politiknya yang telah dikemas dalam bentuk bahasa teks. Salah satu saluran media yang dia gunakan adalah *facebook*[2].

Facebook adalah sebuah situs jaringan sosial yang ada di internet. Di Indonesia, situs ini sebenarnya masih tergolong baru, dan mulai marak digunakan sekitar pertengahan tahun 2008. Keunggulan situs ini, para pengguna *facebook* ini bisa secara langsung menyampaikan sesuatu, baik dalam bentuk tulisan, gambar, maupun rekaman video. Sedangkan penerima pesan pun bisa memberikan komentar dan tanggapan secara langsung kepada pengirim. Sehingga media dimaksud menjadi menarik dan banyak digunakan oleh para elite politik yang sedang berkampanye mencari dukungan suara di pemilu 2009.

Namun, buku ini tidak membahas masalah keunggulan atau kelebihan *facebook* sebagai media kampanye politik. Buku ini hanya memfokuskan pada pembahasan masalah gaya retorika komunikasi politik Prabowo dalam teks tertulis yang telah disampaikan melalui *facebook* sebagai medianya, khususnya mulai periode 16 Maret – 5 April 2009. Pemilihan periode waktu tersebut terkait dengan jadwal kampanye resmi KPU yang dimulai pada 16 Maret -5 April 2009.

Pemilihan waktu tersebut tentu memiliki banyak kelemahan. Apalagi ketika apa yang telah disampaikan melalui *facebook* ternyata tidak dibuat sendiri oleh Prabowo, melainkan dibuat oleh tim suksesnya. Hal itu berpotensi berakibat fatal dalam penafsiran. Sekalipun apa yang di tulis di dalam *facebook* sebelumnya telah mendapat persetujuan dari Prabowo sendiri, namun tetap mengecoh dalam menarik kesimpulan.

Untuk menutup kelemahan tersebut, buku ini juga akan membahas masalah retorika politik Prabowo pada saat diwawancara oleh seseorang, dan direkam melalui sebuah kamera, serta dipublikasikan dalam bentuk gambar video di *facebook* maupun *Youtube*. Hasil wawancara yang terekan berbentuk *audio visual* itu penulis *translate* terlebih dahulu menjadi sebuah teks tertulis guna dijadikan sebagai salah satu bahan analisis. Selain itu, buku ini juga dilengkapi dengan gaya retorika komunikasi politik Prabowo pada saat berada di panggung kampanye Gerindra, di hadapan lautan massa pada pemilu 2009. Data ini diambil dari hasil rekaman dokumentasi Metro TV Biro Surabaya, dan hasil mengunduh (*download*) di *Youtube*, sebagai hasil rekaman video *Saluran Nomor 5* yang dibuat oleh tim sukses Prabowo, ajang kampanye politiknya melalui internet.

1.2. Bahasa dan Ideologi

Selain sebagai alat komunikasi, bahasa juga dapat dimaknai sebagai representasi budaya, serta pandangan politik dan ideologi dari kelompok tertentu. Sebagai representasi budaya, bahasa yang sama bisa memiliki makna yang berbeda dalam budaya yang berbeda. Bahkan, tak sedikit orang yang anti dan tidak pernah mau memakai atau menggunakan bahasa tertentu sebagai representasi budaya yang tidak disukainya. Atau sebaliknya, banyak orang yang cenderung suka menggunakan bahasa dari budaya tertentu yang disukainya.

Sebagai representasi budaya, di Jawa (khususnya), bahasa ternyata juga memiliki kelas dan kasta. Ada bahasa strata *krama inggil* (bahasa Jawa sangat halus; strata tinggi), *krama madya* (bahasa Jawa sedang; strata kelas menengah), dan *ngoko* (bahasa Jawa kasar; strata

rendah/bawah/ rakyat jelata). Strata *krama inggil* lazim digunakan untuk menunjukkan kasta sosial penggunanya/penuturnya. Misal, kalangan priyayi atau ningrat. Sedang bahasa *krama madya* lazim digunakan antar sesama kelas menengah. Kemudian bahasa Jawa *ngoko* biasanya digunakan oleh kalangan *kawula alit* (kelompok masyarakat yang dianggap berkasata rendah/sudra/ rakyat jelata).

Namun, bahasa juga memiliki ruang dan waktu. Secara pelan dan pasti, pemisahan dan penggunaan bahasa ini pun kini sedikit demi sedikit mulai terkikis dan luntur. Meskipun sisa-sisa feodalisme masyarakat di Jawa (khususnya) masih tetap ada.

Dalam panggung politik praktis, bahasa juga menjadi cermin ideologi. Malah tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ideologi membentuk dan dibentuk oleh bahasa. Melalui ideologi orang memberikan makna pada realitas tertentu dengan menggunakan bahasa tertentu yang dirumuskan melalui sebuah kata dan kalimat, sehingga membentuk realitas tertentu.

Dengan demikian, para elite politik pun sering memproduksi bahasa sendiri untuk memaknai sebuah realitas yang ada. Lalu bahasa yang dicipta dari konsep pandangan ideologinya itu, disebarkan kepada khalayak untuk membentuk sebuah wacana. Tujuannya tentu untuk mengkonstruksi pandangan khalayak sesuai dengan yang diinginkan para elite politik tersebut. Sehingga tidak salah jika bahasa pun dimaknai sebagai sesuatu yang tidak netral, dan malah sarat muatan kepentingan tertentu.

Menurut salah seorang ahli antropologi linguistik, Sapir Whorf (dalam Deddy Mulyana, 2005: 120), bahasa bukan hanya sekadar deskriptif atau sarana untuk melukiskan suatu fenomena serta lingkungan. Lebih dari itu, bahasa juga dapat mempengaruhi cara kita melihat lingkungan kita. Pandangan ini kemudian dikembangkan menjadi dua bagian, *deterministik linguistik* dan *relativitas linguistik*. Deterministik linguistik memandang bahwa struktur bahasa mengendalikan pikiran dan norma-norma budaya. Sedang relativitas linguistik, melihat bahwa karakteristik bahasa dan norma budaya saling mempengaruhi. Budaya dikontrol sekaligus mengontrol bahasa. Bahasa juga menyediakan kategori-kategori konseptual yang memengaruhi bagaimana persepsi para penggunanya dikode dan disimpan.

Dengan kata lain, bahasa bukan sekadar alat komunikasi untuk memaknai suatu realitas objektif semata. Namun bahasa juga merupakan kegiatan sosial, bukan sesuatu yang netral dan konsisten, melainkan partisipan sosial yang dapat dikonstruksi dan direkonstruksi, serta di-*setting* untuk membentuk gagasan dan tindakan seseorang. Menurut Michel Foucault (1972: 216), dalam kehidupan nyata, disadari atau tidak, bahwa di dalam bahasa terkandung pergulatan dan pertarungan kepentingan ideologis. Sebab dipandang sebagai sesuatu yang tidak netral dan tidak universal; bahasa menjadi terikat oleh waktu, tempat, dan konteks pergulatan historis politiknya sendiri-sendiri. Sehingga bahasalah yang melahirkan wacana atau *discourse* sebagai sesuatu yang niscaya bersifat politik.

Dalam alur pikir tersebut, bahasa tak pernah dapat dipisahkan dari sebuah kekuasaan politik. Sebagai negara yang konon menganggap paling demokratis dan humanis seperti Amerika Serikat sekalipun, para elite politiknya juga kerap menciptakan bahasa yang disusun dan dirumuskan melalui sebuah kata, istilah, atau terminologi; sebut saja, misal "teroris", "kaum fundamentalis", dan "poros setan". Semua istilah tersebut diciptakan dan disebarkan secara masif. Tentu, bermuatan politik dan berusaha agar Amerika tetap menjadi pihak yang dominan.

Begitu juga pada zaman rezim otoriter Orde Baru. Presiden Soeharto selalu memproduksi bahasa tertentu untuk memaknai realitas tertentu. Seperti terminologi Gerakan Pengacau Keamanan (lazim disingkat GPK), Organisasi Tanpa Bentuk (OTB), PKI Gaya Baru, ekstrem kanan, dan ekstrem kiri yang sengaja diciptakan serta digunakan untuk mendistorsi gerakan oposisi.

Bahasa memang dunia simbol yang paling nyata. Sehingga siapa pun yang ingin berhasil merebut kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan, tentu harus memiliki kemampuan untuk mengkonsolidasikan bahasa-bahasa tertentu. Tak terkecuali para elite politik yang sedang berusaha memobilisasi massa dalam kampanye politik. Agar dapat berhasil merebut hati dan simpati masyarakat, mereka tentu juga memproduksi bahasa. Memiliki kemampuan untuk mengemas bahasa sesuai dengan konteks dan waktu.

Namun, meskipun sebuah simbol, bahasa juga bisa menjadi alat untuk mengukur dan menilai seseorang dalam sebuah interaksi sosial. Keberhasilan dan kegagalan dalam hidup sering tergantung dari kepandaian menggunakan bahasa dalam berbicara. Lantaran itulah bahasa dan gaya bicara tentu menjadi sangat penting dalam sebuah retorika komunikasi politik.

1.3. Gaya Komunikasi

Bahasa menunjukkan bangsa. Identitas dan citra diri seseorang di mata orang lain pun dipengaruhi oleh bagaimana cara berkomunikasi. Selain itu juga pemilihan kata, istilah, serta intonasi tekanan suara. Semua akan dapat mencerminkan identitas dan citra diri seseorang yang sedang berbicara.

Namun, sebagaimana sebuah bahasa yang juga mengenal konteks dan waktu, agar menarik gaya komunikasi juga harus mengikuti selera masyarakat yang selalu mengalami perubahan dari konteks waktu ke waktu. Termasuk gaya dalam komunikasi politik.

Dulu, Presiden Soekarno dikenal sebagai orator ulung. Sebagai orator, Bung Karno tidak pernah mengalami kekeringan kata dan istilah. Gaya bicaranya yang berapi-api, mampu membangkitkan gairah orang untuk datang dan mendengarkan. Banyak orang seringkali datang dari tempat yang jauh hanya sekadar untuk mendengar Bung Karno pidato. Mereka datang ke alun-alun bukan untuk menerima ajarannya, tetapi semata-mata karena gaya retorika Bung Karno yang memukau (Hendra Kusuma, 2008: 78).

Namun, dalam konteks sekarang, orang yang menggunakan gaya bicara mirip-mirip Bung Karno, bisa jadi tampak aneh dan tidak menarik bagi masyarakat. Begitu juga pada zaman Orde Baru, kita sering menyaksikan para pejabat yang meniru gaya bicara Soeharto yang selalu menggunakan kata "ken" pada kata kerja yang berakhiran "kan". Tetapi setelah reformasi dan Soeharto tumbang, para pejabat tinggi negara yang masih menirukan gaya bicara (dialek) Soeharto makin menyusut kuantitasnya. Mungkin mereka takut atau khawatir dicap sebagai *antek* Soeharto jika masih melafalkan akhiran "ken".

Secara teoretik, Edward T. Hall (dalam Deddy Mulyana, 2005: 129-156), dalam konteks budaya menyebut gaya komunikasi dapat dibedakan ke dalam bentuk gaya komunikasi konteks tinggi dan gaya komunikasi konteks rendah. Gaya bicara dalam komunikasi konteks tinggi ini, orang lebih suka berbicara secara implisit, tidak langsung, dan suka basa-basi. Salah satu tujuannya, untuk memelihara keselarasan kelompok dan tidak ingin berkonfrontasi. Dengan kata lain, agar tidak mudah menyinggung perasaan orang lain. Komunikasi budaya konteks tinggi, cenderung lebih tertutup dan mudah curiga terhadap pendatang baru atau orang asing.

Sementara gaya komunikasi dalam konteks rendah, biasanya digunakan oleh orang-orang yang memiliki pola pikir linier. Bahasa yang digunakan langsung, lugas, dan tidak eksplisit. Komunikasi konteks rendah, cepat dan mudah berubah karena tidak mengikat kelompok.

Masyarakat Jawa, terutama yang berasal dari latar-belakang kalangan priyayi, termasuk dalam budaya komunikasi konteks tinggi. Presiden Soeharto misalnya, sebagai orang Jawa yang masih sangat feodalistik, gaya bicaranya sangat konteks tinggi. Pemilihan kata dalam bahasanya halus dan selalu samar. Sehingga orang lain diharapkan mengerti dan dapat memaknai sendiri apa yang dia katakan. Namun, jika orang tersebut (komunikan) salah menangkap apa sesunggungnya yang telah dikatakan Soeharto, secara halus dan kasat mata, Soeharto pun akan menggebuk.

Secara umum, tipikal masyarakat Indonesia yang masih setengah jajahan dan setengah feodal, budaya komunikasi konteks tingginya masih sangat kental. Sehingga jika ada orang yang suka bicara *blak-blakan*, lugas, dan langsung kepada pokok persoalan, tidak begitu disukai oleh masyarakat Indonesia.

Setidaknya hal tersebut terbukti saat Amien Rais yang memiliki gaya komunikasi konteks rendah, tidak bisa merebut hati masyarakat dalam pemilu presiden tahun 2004. Pasalnya, gaya bicara Amien Rais yang terlalu lugas, tentu bertentangan dengan karakter masyarakat Indonesia yang memiliki budaya komunikasi konteks tinggi.

Bila ingin berhasil merebut hati dan simpati calon pemilih dalam kampanye politik, seorang tokoh politik tentu harus memperhatikan hal tersebut. Sehingga gaya komunikasinya efektif dan tepat mengenai sasaran sesuai dengan yang diinginkannya sebagai komunikator. Menurut Deddy Mulyana (2005: 149), gaya komunikasi efektif merupakan perpaduan antara sisi-sisi positif komunikasi konteks tinggi dan komunikasi konteks rendah yang ditandai dengan ketulusan, kejernihan, keterbukaan, keterusterangan, kesederhanaan, dan kesantunan dalam berbicara.

1.4. Gaya dan Retorika

Gaya komunikasi seseorang juga dapat dilihat dari retorikanya. Retorika adalah berbicara. Berbicara berarti mengucapkan rangkaian kata atau kalimat yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Retorika juga dapat dimaknai sebagai suatu proses komunikasi, seorang kumunikator menyampaikan pesan kepada komunikan. Menurut Sonnya K. Foss (1989: 4-5), retorika didefinisikan sebagai penggunaan kata atau bahasa untuk memengaruhi pikiran, perasaan, dan tingkah laku khalayak. Jika didasarkan pada fungsi bahasa yang mendasar, retorika menjadi sarana simbolis yang digunakan manusia untuk "membujuk" manusia lain yang secara alami beraksi dan berkreasi dengan menggunakan simbol-simbol.

Lantaran itulah retorika tidak dapat dilepaskan dari penggunaan bahasa, istilah, dan simbol-simbol tertentu untuk memfokuskan perhatian pada topik dan aspek tertentu. Penggunaan istilah dan kata-kata inilah yang pada akhirnya dapat mengarahkan pikiran dan perasaan khalayak untuk melakukan tindakan sesuai yang diinginkan oleh sang komunikator.

> Jelaslah bahwa kata-kata mempunyai kekuatan. Kita bisa menggunakannya sesuai kehendak diri sendiri. Jika digunakan dengan tepat maka kita akan menunai hasil yang baik. Sebaliknya, jika digunakan secara salah maka kita akan memanen hasil yang buruk (Hendra Kusuma, 2008: 10).

Salah satu teori yang memiliki hubungan erat dengan definisi retorika tersebut adalah teori *terministic screen*. Teori ini dikembangkan oleh seorang ahli bidang retorika dari Amerika Serikat, Kenneth Burke. Inti dari teori ini adalah bahwa dalam komunikasi, manusia cenderung memilih kata-kata tertentu untuk mencapai tujuannya. Pemilihan kata-kata itu bersifat strategis. Dengan demikian, kata yang diungkapkan, simbol yang diberikan, dan intonasi pembicaraan, tidaklah semata-mata sebagai ekspresi pribadi atau cara berkomunikasi, namun dipakai secara sengaja untuk maksud tertentu dengan tujuan mengarahkan cara berpikir dan keyakinan khalayak (dalam Eriyanto, 2000: 5).

Karena itulah, para komunikator, apalagi seorang pimpinan partai yang sedang berusaha meraih simpati massa dalam kampanye politik, tentu akan menggunakan berbagai pilihan kata yang dianggap bisa untuk mempengaruhi khalayak. Bahkan pilihan kata-kata yang bersifat membujuk sekalipun, tentu akan digunakan oleh para politisi. Baginya yang penting massa bisa datang memilih dirinya saat berada dibilik kecil tempat pemungutan suara (TPS).

Sebagai strategi komunikasi politik untuk membangun *image*, para komunikator juga tak jarang mengunakan bahasa atau kalimat untuk menggambarkan tentang dirinya dan partainya yang selalu positif. Namun, baik secara eksplisit maupun implisit memilih kata-kata untuk menggambarkan lawan politiknya sebagai sesuatu yang buruk.

Kelebihan, kebaikan, keungulan, atau hal-hal yang bersifat positif lain mengenai dirinya dan partainya, akan digambarkan secara detail, eksplisit, dan jelas. Namun, sebaliknya, ketika menggambarkan kebaikan orang lain disajikan secara pendek dan implisit, bahkan samar-samar. Bila dianggap perlu, kelebihan dan keungulan kelompok lain malah tidak diungkapkan sama sekali. Tergantung kebutuhan komunikator sendiri.

Dalam retorika komunikasi politik, latar-belakang masalah juga sering diungkapkan sebagai alasan pembenar gagasan dalam teks yang diungkapkan. Seperti dalam perdebatan dan perselisihan politik, dimana secara sistematis seseorang berusaha mempertahankan pendapat kelompoknya sendiri dan menyerang pendapat argumentasi pihak lawan. Mengungkapkan sederet fakta sebagai latar-belakang masalah untuk tujuan tertentu, sesuai keinginan komunikator sendiri.

Pengandaian *(presupposition)* juga sering digunakan oleh para komunikator politik. Pengandaian digunakan sebagai strategi lain yang dapat membangun *image* atau citra tertentu, agar dapat diterima khalayak. Pengandaian hadir dengan memberikan pernyataan yang dipandang terpercaya, dan karena itu tidak perlu dipertanyakan. Hampir mirip dengan elemen pengandaian adalah elemen penalaran. Elemen ini digunakan untuk memberi basis rasional, agar teks yang disajikan oleh komunikator tampak benar dan menyakinkan.

Selain itu, retorika juga dapat dimaknai sebagai seni berbicara. Sehingga setiap orang bisa memiliki gaya retorika tersendiri yang tentu saja, berbeda satu sama lainnya. Mengenai model retorika, Dori Wuru Hendrikus (2009) membagi ke dalam tiga bagian. *Pertama,* gaya retorika monologika atau monolog. Dalam model komunikasi ini biasanya terjadi dalam proses pidato yang bersifat satu arah, sebab hanya satu orang yang berbicara (komunikator), dan yang lain hanya sebagai pendengar (komunikan).

Kedua, dialogika. Gaya retorika ini biasanya memang jarang dapat ditemui dalam acara-acara pidato atau orasi politik yang dihadiri banyak orang (massa) di sebuah lapangan terbuka. Gaya retorika dialogika ini biasanya hanya dilakukan dalam acara-acara debat kandidat atau dialog terbuka.

Ketiga, pembinaan teknik bicara. Efektivitas monologika dan dialogika tergantung pada teknik bicara. Bahkan teknik bicara ini menjadi syarat penting dalam retorika. Mulai dari bagaimana cara mengatur pernafasan, teknik membina suara, dan berbicara. Semua harus diperhatikan dan diatur agar bicaranya bisa menjadi efektif.

Apa pun gayanya, retorika adalah sebuah seni berbicara. Semakin mahir dalam mengemas kata-kata atau istilah yang digunakan, pengaturan penekanan suara pada setiap kata yang disampaikan, tentu semakin baik. Bahkan dalam acara pidato yang dikenal selama ini hanya satu arah sekalipun, para pendengar bisa merasa seperti diajak berdialog. Suasana pun bisa menjadi semakin hidup. Bahkan pendengar bisa merasakan seperti diajak berbicara, tidak merasa hanya sekadar pendengar.

Pada dasarnya, retorika muncul sebagai bentuk interaksi sosial, yakni bagaimana komunikator memposisikan dirinya di antara khalayak. Apakah memakai gaya formal, informal, atau justru santai untuk menunjukan kesan bagaimana pembicara menampilkan

dirinya. Jika seorang komunikator ingin terlihat berwibawa dan dihormati, boleh jadi dia menciptakan jarak dengan khalayak (komunikan). Misal, mengunakan kalimat yang kaku dan formal. Sebaliknya, jika komunikator ingin tampak egaliter, maka dia akan banyak memakai gaya santai dan kalimat-kalimat yang digunakan pun sederhana, lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari komunikannya, sehingga mudah dicerna. Namun, hal terpeting dari aspek interaksi sosial tersebut adalah, apakah komunikator tampak sejajar dengan khalayak (komunikan) atau tidak. Penggunaan kata seperti "kita" atau "kami" mensugestikan hubungan yang kaku, sebaliknya jika komunikator menggunakan kata "saya" atau "Anda" ingin mengesankan dirinya sejajar dengan khalayak.

Hal yang juga penting diperhatikan dalam retorika adalah ekspresi. Ekspresi ini dapat digunakan untuk membantu menonjolkan atau menghilangkan bagian tertentu dari teks yang disampaikan. Bagian ini untuk memeriksa apa yang ingin ditekankan dan ditonjolkan karena dianggap penting oleh komunikator itu. Dalam teks tertulis, ekspresi ini muncul misalnya dalam bentuk grafis, gambar, foto, tabel, dan lain-lain yang dapat digunakan untuk menonjolkan bagian yang dianggap penting. Bagian yang dicetak berbeda misalnya dicetak miring dan dicetak tebal adalah bagian yang oleh komunikator dianggap penting, dan komunikator menginginkan adanya perhatian penuh dari khalayak.

Seorang komunikator tentu tidak hanya sekadar menyampaikan pesan pokok. Galibnya, komunikator perlu juga menyampaikan kiasan, ungkapan, dan metafora yang dimaksud sebagai ornamen atau bumbu dari suatu teks. Pengunaan metafora tertentu juga bisa menjadi petunjuk utama untuk mengerti makna dalam suatu teks. Metafora tertentu juga dapat digunakan oleh komunikator secara strategis sebagai landasan berpikir, alasan pembenar atas pendapat atau gagasan tertentu kepada publik. William A.Gamson (1996:120-121) menyebut bahwa ornamen ini sebagai *"popular wisdom"*.

Menurut William, *popular wisdom* dimaksud ditampilkan dalam dua jenis. *Pertama*, mengunakan kepercayaan masyarakat, ungkapan sehari-hari, peribahasa, pepatah, petuah leluhur, kata-kata kuno, bahkan mungkin kata-kata yang diambil dari sebuah ayat suci.

Semua dapat digunakan untuk memperkuat pesan utama[3]. *Kedua*, dalam bentuk analogi. Tujuannya agar pesan lebih tertanam karena mengacu kepada kisah-kisah kepahlawanan, episode romantis masa lalu yang mudah diingat dan dipercaya oleh khalayak.

Semua gaya retorika tersebut memang bisa digunakan oleh siapa saja. Termasuk mereka yang kini sedang bertarung untuk bisa menjadi orang yang paling berpengaruh di negeri ini. Tak terkecuali para mantan jenderal yang kini sedang berebut untuk bisa menjadi presiden. Tentu, termasuk Prabowo.

---

[1] Isu adanya rencana kudeta yang akan dilakukan Prabowo Subianto, hingga kini memang belum terbukti. Bahkan dapat diduga kuat, isu ini hanyalah sebuah rekayasa politik yang sengaja dilontarkan hanya untuk mengalihkan perhatian publik. Selain memang ada persaingan ditubuh perwira TNI yakni antara Prabowo dan Wiranto. Baca buku Bacharuddin Jusuf Habibie, (2006) *Detik-Detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi*, Jakarta: HTC Mandiri. Dan buku, Hendro Subroto, (2009) *Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurut Para Komando*, Kompas Penerbit Buku: Jakarta.

[2] Salah satu kesuksesan kampanye politik Barack Obama adalah di *facebook*. Namun, kampanye menggunakan media *facebook* di Indonesia bisa jadi tidak efektif. Meskipun mengenai hal ini masih harus diadakan peneliteian lebih lanjut. Namun, dapat diasumsikan sementara dari total jumlah penduduk di Indonesia yang kini sudah mengenal dan menggunakan internet setiap harinya, dapat dipastikan jumlahnya tidaklah besar. Bahkan rata-rata pengguna internet di Indonesia masih didominasi kalangan intelektual (mahasiswa, dosen, dan kalangan terpelajar lainnya karena kini ada program internet sekolah) serta kelas ekonomi menengah ke atas. Secara umum, kalangan intelektual dan kelas menengah ke atas memiliki potensi yang tinggi untuk tidak datang ke TPS dan mencontreng alias golput. Dengan demikian, dapat kita asumsikan, kampanye melalui media *facebook* kalau *toh* hasilnya efektif namun jumlah perolehan suara tetap tidak besar, karena pengguna media ini jumlahnya masih sedikit.

[3] Pemakaian *popular wisdom* misalnya: "Perubahan tidak akan turun dari langit. Namun, perubahan hanya bisa kita dapatkan dari perjuangan". Kata-kata semacam ini biasanya digunakan untuk membangkitkan semangat massa. *Popular wisdom* juga bisa berbentuk kalimat seperti ini: misalnya, "kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda". Ungkapan ini dapat digunakan untuk menenangkan hati orang yang sedang patah semangat akibat kegagalan, dll. Namun, pada intinya *popular wisdom* dipakai dan digunakan untuk menciptakan dan merangkai sebuah pesan agar khalayak dapat mengkontruski suatu wacana. Dengan *popular wisdom*, pesan menjadi tampak bijaksana dan sang komunikator terkesan berwibawa dan suci.

BAB II
PRABOWO DALAM BINGKAI KELUARGA CENDANA

2.1. Misteri Sang Ayah

Ada peribahasa dalam bahasa Jawa: *kacang ora ninggal lanjaran*. Peribahasa tersebut sama maknanya dengan peribahasa yang dikenal luas: *buah apel jatuh tak jauh dari pohonnya*. Lewat makna peribahasa tersebut, agaknya, tidak berlebihan untuk memahami alam pikir Prabowo dengan cara "menengok sedikit ke belakang", ke arah sang ayah, Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo.

Profesor Sumitro tersohor dengan julukan Begawan Ekonomi Indonesia pada era Pemerintahan Soeharto[1]. Sumitro, lahir 29 Mei 1917, di sebuah kota kecil pesisir selatan Kebumen, Jawa Tengah. Ayah Sumitro bernama Margono Djojohadikusumo, seorang pengikut organisasi priyayi Jawa, Boedi Oetomo, dan pendiri Bank Negara Indonesia (BNI) 1946. Ibunda Prabowo bernama Dora Sigar. Sang ibu meninggal dunia 22 Desember 2008, di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura, karena menderita sakit kanker getah bening.

Sumitro adalah seorang penganut aliran sosialis demokrat (sosdem) atau sosialis kanan (soska). Sebagai aktivis partai sosialis, karier politik Sumitro bisa dibilang sangat bagus. Pada tahun 1946, dia sudah menjadi Staf Pembantu Perdana Menteri RI, Sutan Sjahrir. Dia juga pernah menduduki jabatan sebagai Presiden Direktur Indonesian Banking Corporation, tahun 1947. Pada tahun 1948-1949 pernah menjadi Wakil Ketua Perutusan Indonesia pada Dewan Keamanan PBB, membantu L. N. Palar. Anggota Delegasi RI pada Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag, Belanda, tahun 1949. Menjabat sebagai Kuasa Usaha KBRI di Washington DC tahun 1950, dan Menteri Perdagangan dan Perindustrian RI di Kabinet Natsir tahun 1950-1951. Menjabat Menteri Keuangan RI di Kabinet Wilopo tahun 1952-1953, dan Menteri Keuangan RI di Kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955-1956.

Sebagai aktivis Partai Sosialis yang berbasis kaum intelektual, Sumitro pernah *digebuk* oleh Presiden Soekarno setelah terlibat dalam kasus pemberontakan PRRI/ Permesta terhadap negara. Dia menjadi *contact person* antara pihak PRRI/Permesta dengan pihak Center Inteligen of America (CIA)[2]. Dalam peristiwa itu peran Sumitro sebenarnya lebih dari sekadar *contact person* dengan CIA. Muncul dugaan, dia agen yang pernah direkut oleh CIA. Namun hal tersebut masih samar dan perlu dibuktikan lewat dokumen yang ada di Amerika Serikat.

Setelah PPRI/Permesta gagal melakukan pemberontakan terhadap negara, Sumitro melarikan diri ke luar negeri dan hidup domisili secara berpindah-pindah dari negara satu ke negara lain. Apa saja kegiatannya di mancanegara pada masa itu, belum terungkap banyak; selain sebagai konsultan ekonomi di Malaysia, Hongkong, Thailand, Perancis, dan Swiss. Dia juga mengajar di berbagai perguruan tinggi di sejumlah negara, antara lain di Universitas Harvard, Universitas Yale, Universitas Berkeley, dan Universitas Sorbonne, Paris, berkat bantuan dari jaringan gerakannya di luar negeri.

Setelah Soeharto berhasil melakukan "kudeta" pada tahun 1965 dan berhasil menggulingkan pemeritahan Soekarno, ayah Prabowo tersebut diminta kembali ke Indonesia oleh Presiden Soeharto. Dia diberi jabatan sebagai Menteri Perdagangan RI di Kabinet Pembangunan I, tahun 1968-1973. Kemudian pada tahun 1973-1978 menduduki jabatan Menteri Riset di Kabinet Pembangunan II. Tahun 1986 menjadi Komisaris Utama PT Bank Pembangunan Asia.

Sebagai seorang ekonom berpaham sosdem, Sumitro memang menyimpan banyak misteri. Pada tahun 1938, saat masih berusia 21 tahun, dia sudah berkeliling di luar negeri. Pernah menjadi mahasiswa dan anggota Partai Sosialis, bekerja sebagai *waittres* di Hotel Lancaster, Rue de Berry, di dekat des Champ Elyses, Paris, Perancis untuk membiayai kuliahnya. Sebelumnya, juga pernah masuk menjadi Brigade Internasional berkat jasa temannya, seorang penulis sosialis radikal di Belanda, Jef Last. Namun, setelah melakukan pelatihan di Catalogne,

dia dikeluarkan karena usianya masih 20 tahun. Kemudian dia kembali ke Indonesia, dan menjadi anggota delegasi Indonesia ke KMB di Den Haag, Desember 1949.

Sebuah perjalanan panjang dan penuh liku-liku. Meskipun "pernah berdosa kepada negara" karena terlibat dalam pemberontakan PRRI/Permesta, tapi Sumitro masih tetap dapat menikmati kehidupan mewah sebagai seorang teknokrat. Bahkan, akhirnya malah *besanan* dengan Soeharto, setelah salah satu dari empat anaknya, Prabowo, menyunting salah satu putri Soeharto, Siti Hedijati Harijadi yang populer dengan sebutan Mbak Titiek.

2.2. Karakter Soeharto

Antara Sumitro dengan Soeharto sama-sama menyimpan banyak misteri. Jika benar Sumitro menjadi *contact person* antara pihak PRRI/Permesta dengan CIA, maka dapat dipastikan dia adalah agen CIA. Sementara pada peristiwa kudeta 1965, Inggris dan Amerika juga terlibat di balik peristiwa itu. Bahkan, Soeharto sempat disebut-sebut sebagai "orang yang dipakai CIA" untuk menggulingkan Presiden Soekarno. Apakah keduanya memiliki hubungan? Bisa jadi. Namun, sekali lagi, hal tersebut masih perlu pembuktian yang tidak mudah diungkap. Apalagi keduanya kini sudah tiada.

Terlepas dari apakah Sumitro dan Soeharto agen CIA atau bukan, sosok kehidupan mereka tetap menarik untuk ditengok kembali, sebagai pijakan untuk melihat sosok Prabowo yang kini sedang berebut pengaruh dalam percaturan politik nasional. Sedikit banyak, "darah dan watak" dua tokoh tersebut mengalir pada diri Prabowo; sebagai mana pepatah *buah apel jatuh tak jauh dari pohonnya.*

Menurut Kuntowijoyo, Soeharto digolongkan sebagai tipe manusia yang mendasarkan diri pada *an act of faith* bukan tipe *an act of reason.* Ketika berbuat sesuatu hanya berdasarkan keyakinan, bukan berdasarkan pada akal. Manusia tipe seperti ini cenderung introvet dan mengarahkan kepribadian orang lain seperti pada dirinya. Dia juga seorang *man of contemplation.* Motif-motifnya

dipengaruhi oleh kondisi di dalam dirinya; percaya kepada perasaan dan intuisinya sendiri. Dia sama sekali tidak memperhitungkan kondisi di luar atau penalaran rasional, tetapi lebih mendengar suara hati dan bisikan dalam dirinya. Ucapan Soeharto pun terkadang mengejutkan banyak orang. Namun, dia tidak pernah ragu dalam memutuskan sesuatu, karena keputusannya terkadang tidak dibuat berdasarkan pertimbangan yang hati-hati, tetapi semata-mata berdasarkan keyakinannya sendiri.

Karakter seperti itu tentu tidak lepas dari pengalamannya sebagai Soeharto kecil yang tidak mengeyam pendidikan tinggi. Pembentukan diri Soeharto murni berdasarkan hasil pengalaman dalam kehidupannya sendiri. Dia digembleng oleh lingkungannya sendiri, lingkungan masyrakat Jawa pada zamannya. Lantaran itu Soeharto pun senang mendatangi tempat-tempat yang dia anggap bisa membuat dirinya tenang untuk mengasah kepekaan kata hatinya.

Sekadar pembanding, sebenarnya Soekarno pun demikian; percaya dengan hal-hal yang bersifat *klenik*. Bahkan, Bung Karno juga sering bersemedi dahulu sebelum mengambil keputusan yang bersifat strategis. Namun, Bung Karno pernah digembleng di lembaga pendidikan tinggi, banyak membaca buku penting, dan banyak bergaul dengan kaum terpelajar yang rasional. Sehingga keputusan-keputusan yang diambil Bung Karno lebih hati-hati dan selalu atas dasar pertimbangan rasionalnya.

Karakter Soeharto yang *an act of faith* ini muncul dalam berbagai peristiwa. Kuntowijoyo mencatat, pembawaan tersebut muncul pada tahun 1965-1966, ketika Soeharto dihadapkan pada persoalan peristiwa Gerakan 30 September 1965.

Kala itu, menurut Kuntowijoyo, Soekarno tampak ragu, penuh pertimbangan rasional ketika ada tuntutan untuk membubarkan PKI. Dia harus memilih, komunis atau anti-komunis. PKI mempunyai teori dan praksis telah teruji kebenarannya. Di mata Soekarno, PKI adalah organisasi besar, rapi, sistematis, dan solid. Ormas Islam memang besar, tetapi jauh dari sistematis dan solid. Demikian pula golongan masyarakat lain, termasuk ABRI kala itu.

Menurut perhitungan Soekarno yang rasional memang harus memilih PKI, dan menolak untuk membubarkan. Ketika desakan untuk membubarkan PKI semakin kuat, Soekarno pun tampak ragu-ragu. Walau akhirnya dia tetap memilih mempertahankan Nasakom hingga ke liang lahat. Karena, ketiga unsur itu yakni, nasionalis, agama, dan komunis secara objektif memang ada. Sehingga tidak mungkin dibubarkan, karena ketiga unsur kekuatan ini sama-sama memiliki peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Berlawanan dengan Soekarno, Soeharto yang digembleng oleh pengalaman hidup yang tidak bersentuhan dengan dunia pendidikan tinggi, kecuali pendidikan tentara penjajah Jepang, merasa yakin PKI harus dibubarkan. Keputusan cepat yang diambil Soeharto saat itu, memang bukan atas dasar pemikiran rasional, melainkan murni atas dasar keyakinan "bisikan di dalam hatinya".

Dalam buku biografi Soeharto yang ditulis oleh O.G. Roeder, Soeharto mengatakan, "Saya bertindak atas keyakinan saya sendiri". Keyakinan mengambil keputusan semacam itu juga pernah dilakukan Soeharto saat memutuskan untuk *lengser keprabon*, 21 Mei 1998.

Meskipun proses pengunduran diri Soeharto karena dipaksa oleh kekuatan gerakan massa mahasiswa yang sudah mengepung gedung DPR/MPR RI di Senayan, Jakarta, namun sebagai orang Jawa, Soeharto tidak mengatakan *seleh keprabon* yang berarti meletakkan jabatan. Jika dia menggunakan terminologi *seleh* yang berarti meletakkan, tentu mengandung konotasi negatif pada dirinya. Pasalnya, dalam terminologi bahasa Jawa dikenal istilah *sapa salah bakal seleh* (siapa bersalah bakal kalah). Meskipun pada faktanya Soeharto turun dari jabatan sebagai presiden memang karena dipaksa, tetapi dia lebih suka menggunakan terminologi *lengser keprabon*.

Dengan menggunakan terminologi *lengser*, dia ingin menunjukkan bahwa berhenti (dari jabatan presiden) tanpa ada paksaan. Murni atas kehendak sendiri, dan bukan atas desakan dari orang lain. *Lengser* juga menunjukkan berhenti untuk sementara

dan tidak menutup kemungkinan penguasa yang *lengser* akan kembali naik tahta lagi. Maka menjadi beda dengan istilah *seleh* yang berarti meletakkan. Bila sudah diletakkan, maka tidak akan diambil (naik tahta) lagi.

Sebagai orang yang masih kental memegang tradisi Jawa yang sangat feodal, Soeharto berusaha untuk tetap tenang dalam setiap masalah. Dia tidak pernah menujukkan watak reaksioner kepada setiap lawan-lawannya. Dia bisa tersenyum pada siapa saja dengan gaya senyum yang sama dan khas. Meminjam istilah Metro TV yang sangat tendensius mengkonstruksi Soeharto sebagai sosok pahlawan saat kematiannya, Soeharto adalah sosok yang memiliki karakter *The Smiling General.*

Bisa jadi apa yang dipublikasikan Metro TV itu benar. Sebagai seorang "pembunuh berdarah dingin", senyum Soeharto penuh misteri dan sulit untuk diterka oleh siapa pun. Termasuk oleh lawan-lawan politiknya. Siapa pun yang dia anggap bersalah dan dinilai dapat menggangu kewibawaan dan stabilitas pemerintahannya, pasti *digebuk*. Tak perduli melanggar hak asasi manusia (HAM) atau tidak. Baginya HAM hanyalah milik orang-orang yang berpendidikan tinggi dan rasional. Bukan milik tentara didikan kolonial Jepang seperti dirinya.

Namun, siapa pun Soeharto, dia tetap bagian dari sejarah bangsa Indonesia. Meskipun Soeharto tidak pernah melahirkan sebuah ajaran sebagaimana halnya Soekarno dengan Marhaenismenya. Sepak terjang Soeharto tetap bisa menjadi pelajaran berharga untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan.

2.3. Kerusuhan Mei 1998

Pengunduran diri Presiden Soeharto berawal akibat adanya krisis ekonomi dan berubah menjadi krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintahan. Krisis kepercayaan inilah yang melahirkan gelombang demonstrasi yang dipelopori mahasiswa. Terjadi di mana-mana. Gedung DPR/MPR RI pun dikepung dan diduduki oleh ribuan mahasiswa yang menuntut Presiden Soeharto turun.

Awalnya, ABRI bersifat tegas. Memberondong para demostran dengan peluru tajam untuk membela Presiden Soeharto yang sekaligus Panglima Tertinggi Angkatan Perang berdasarkan konstitusi. Namun, kematian sejumlah demonstran dan *erangan* kesakitan sejumlah mahasiswa lainnya akibat terjangan proyektil peluru aparat, ternyata tak membuat dia surut. Gelombang demonstarsi mahasiswa justu semakin meluas dan membesar sambil meneriakkan, "Reformasi" dan "Turunkan Soeharto".

Kerusuhan massal kian meluas dan terjadi di mana-mana. Kota Solo, Jawa Tengah, dibakar massa. Asap mengepul di mana-mana, toko-toko pusat perbelanjaan ludes dilalap api. Ribuan warga berteiak-teriak, "Gantung Soeharto!". Di Kota Malang, Jawa Timur, toko-toko ditutup dan ditempeli tulisan "Pro-Reformasi" oleh pemiliknya, agar tidak menjadi sasaran amuk massa. Ribuan mahasiswa dari arah Kampus III Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) berjalan melewati Kampus Universitas Islam Malang (Unisma) di Jl. MT Haryono, Jl. Gajayana, kemudian berkumpul di Jl. Veteran, di sekitar kompleks kampus Universitas Brawijaya dan IKIP Malang (sekarang Universitas Negeri Malang). Meskipun di kota ini tidak ada kerusuhan mencolok seperti di Kota Solo, namun jalanan kota sepanjang 5 km dibikin macet oleh gelombang ribuan massa mahasiswa. Warga kota proaktif dengan menyediakan air minum yang diletakkan di sepanjang tepi badan jalan raya yang dilewati konvoi ribuan massa mahasiswa sebagai bentuk dukungan warga kepada aksi mahasiswa.

Di Jakarta, 12 Mei 1998, mahasiswa Universitas Trisakti yang sedang demonstrasi di halaman kampusnya, tiba-tiba dikepung polisi dan militer. Beberapa mahasiswa tewas tertembak. Elang Mulya Lesmana, Hery Hartanto, Hafidin Royan dan Hendraman Sie, tewas. Mereka menjadi korban keganasan pasukan bersenjata pembela penguasa, kala itu.

Kematian sejumlah mahasiswa itulah yang membuat kemarahan massa memuncak dan terjadi di mana-mana. Sejumlah gedung pusat perbelanjaan, *shopping mall*, seperti Supermall Karawaci, Glodog Plaza, Yogya Departemen Store Klender,

Supermaket Hero, Supermaket Tops, City Hotel, dan pusat pertokoan Glodok, hangus terbakar. Amuk massa ini pun berubah menjadi kerusuhan yang bersifat rasialis anti-Cina, anti-warga keturunan Tionghoa.

Tragis, tapi begitulah faktanya. Bangsa yang konon dikenal santun dan beradab, berubah menjadi brutal dan keji. Rasa perikemanusiaan sebagai mana ajaran dalam falsafah Pancasila, hilang. Doktrin Penataran PPPP (P4) yang ditanamkan selama pemerintahan Orde Baru, sepertinya tak ada yang *nyanthol*; musnah dalam sekejap. Kecuali nafsu dan angkara yang tersisa. Ratusan warga keturunan Tionghoa menjadi sasaran pelampiasan. Mereka diperkosa secara brutal, dan harta bendanya dijarah tanpa sedikit pun yang tersisa[3]. Puluhan ribu warga etnis Tionghoa yang berdomisili secara turun-temurun sejak ratusan tahun sebelum "embrio" bangsa Indonesia lahir, trauma dan berusaha menyelamatkan diri ke luar negeri. Eksodus besar-besaran menjadi berita yang sangat heboh. Citra Indonesia hancur di mata dunia. Sehingga secara tidak langsung Soeharto juga mendapat tekanan dari luar negeri akibat berita eksodus ini.

Presiden Soeharto yang selalu merasa percaya diri, akhirnya menjadi dilematis. ABRI yang selama masa pemerintahannya digunakan sebagai penopang kekuasaan, mulai kendor. Pada 16 Mei 1998, Soeharto sebagai Panglima Tertinggi Angkatan Perang menurut UUD 1945, memanggil Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto, KSAD Jenderal TNI Subagyo HS, dan Menteri Sekretaris Negara Saadillah Mursyid ke kediamannya di Jl. Cendana. Soeharto menginstruksikan untuk segera membentuk semacam Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban (Kopkamtib) yang kemudian dirumuskan menjadi Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional (KOPKKN). Melalui Instruksi Presiden No. 16 Tahun 1998, Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto ditunjuk sebagai Panglima KOPKKN, dan KSAD Jenderal TNI Subagyo HS sebagai wakilnya. Namun, ternyata Wiranto tidak melaksanakan instruksi tersebut[4]. Alasannya, karena tidak ingin ada banyak jatuh korban lagi.

Bahkan, menurut kesaksian Letjen TNI Sintong Panjaitan, pada 14 Mei 1998 Jenderal TNI Wiranto malah meninggalkan Jakarta menuju ke Malang, Jawa Timur, untuk bertindak sebagai inspektur upacara pada acara serah terima tanggung jawab Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) dari Divisi I kepada Divisi II Kostrad[5]. Hal tersebut tentu menjadi tanda tanya besar bagi semua kalangan. Para perwira tinggi TNI pun beranggapan bahwa Jenderal Wiranto tidak bertanggung jawab dan cuci tangan terhadap situasi di Ibu Kota, Jakarta.

Mayor Jenderal TNI (Purnawirawan) Kivlan Zen dalam bukunya berjudul *Konflik dan Integrasi TNI AD* yang diterbitkan *Institue for Policy Studies* tahun 2004, menyebut Jenderal Wiranto juga tidak bersedia memenuhi permintaan Pangdam Jaya, Mayjen TNI Sjafrie Sjamsoedin yang meminta tambahan bantuan pasukan Kostrad dari Jawa Timur dan Makassar. Sehingga, menurut Kivlan Zen, Wiranto tidak bertanggung jawab.

Orang-orang yang dulu sangat setia kepada Soeharto, satu per satu berbalik arah. Mereka yang "berbalik kiblat" itu bukan hanya dari kalangan militer, namun juga sipil, yang selama masa Orde Baru menjadi penopang kekuasaan Soeharto. Para kalangan politisi sipil, satu per satu juga lari, meninggalkan Soeharto. Mereka mencari selamat sendiri. Golongan Karya (Golkar) yang selama rezim Orde Baru berkuasa setia berada di bawah ketiak Soeharto, juga berpaling. Sebanyak 14 menteri pimpinan Ginandjar Kartasasmita menyatakan mengundurkan diri dan menolak bergabung dalam kabinet baru bentukan Soeharto. Ibarat doyan makan nangka, tapi tak ingin terkena getahnya.

Sebanyak 14 menteri dimaksud adalah Akbar Tanjung, AM Hendropriyono, Haryanto Dhanutirto, Ginanjar Kartasasmita, Tanri Abeng, Theo L. Sambuaga, Kuntoro Mangkusubroto, Rachmadi Bambang Sumadhijo, Giri Suseno Hadiharjono, Rahardi Ramelan, Subiakto Tjakrawerdaya, Sanyoto Sastrowardoyo, Sumahadi, dan Justika S. Baharsjah. Padahal, satu hari sebelumnya, mereka telah menemui Soeharto untuk membahas masalah rencana pembentukan Kabinet Reformasi,

dan mengusulkan kepada Presiden sejumlah nama menteri yang akan diganti, sekaligus nama-nama penggantinya. Namun, Ginandjar Kartasasmita dan kawan-kawannya tiba-tiba esok harinya menyatakan mundur dari jabatannya.

Bahkan, tak kalah seru adalah Ketua DPR/MPR Harmoko, yang dikenal sangat loyal terhadap Soeharto, tiba-tiba pada 18 Mei 1998 juga mengeluarkan pernyataan dan meminta Soeharto segera mundur secara arif. Padahal, seluruh warga bangsa Indonesia mafhum, bahwa Harmoko sepanjang Orde Baru adalah orang yang paling loyal dan selalu *ngotot* agar Soeharto tetap bersedia jadi presiden.

Setelah para oportunis ini berpaling, Soeharto pun merasa kian dilematis. Terdesak dan tidak ada pilihan lain, kecuali memang harus mundur. Maka, pada 21 Mei 1998, Wakil Presiden BJ Habibie pun menerima mandat dari Presiden Soeharto untuk menggantikan posisinya. *"Ora dadi presiden ora patheken!"* demikian ucapan Soeharto kala itu, menunjukkan betapa besar rasa *dongkol*-nya.

2.4. Dari Militer ke Panggung Politik

2.4.1. Masa Kecil

Prabowo lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951. Dia memiliki tiga saudara, Biantiningsih Djiwandono, Maryani Le Maristre, dan Hashim Suyono Djojohadikusumo. Semua saudaranya mengikuti jejak keluarganya, yakni terjun di dunia bisnis dan menjadi pengusaha. Hanya Prabowo Subianto yang terjun menjadi seorang militer.

Sebagai seorang anak keturunan priyayi kelas atas, sejak kecil Prabowo tentu tidak pernah mengalami kekurangan dari segi ekonomi. Apalagi menderita kelaparan karena tidak ada makanan sepulang sekolah. Sehingga wajar jika Prabowo dikenal memiliki kepandaian yang cukup baik secara intelektual. Apalagi sejak kecil dia memang sudah gemar membaca buku karena orangtuanya mampu membelikan buku.

Bagi Prabowo, bergulat dengan buku tentu bukan sesuatu yang luar biasa. Bahkan, bisa jadi sudah menjadi bagian dalam hidupnya, karena dia memang lahir dan dibesarkan di keluarga intelektual. Selain di kantor, dia juga memiliki perpustakaan pribadi di rumahnya sebagai tempat untuk mengoleksi buku kesukaannya. Dia paling suka membaca buku-buku sejarah dan militer.

Selain fasih berbahasa Inggris, dia juga menguasai bahasa Prancis, Jerman, dan Belanda. Hal wajar, karena masa kecilnya memang banyak dihabiskan di luar negeri. Mengikuti ayahnya yang berpindah-pindah domisili dalam masa pelarian setelah gagal melakukan pemberontakan PPRI/Permesta pada zaman Orde Lama. Di Singapura, Prabowo pernah tinggal selama tiga tahun.

Di Malaysia, Hongkong, Swiss, dan Inggris masing-masing pernah ditinggali oleh Prabowo selama dua tahun. Sehingga tak heran, sikap dan gaya hidup Prabowo pun cenderung "kebarat-baratan" dan dikenal "sedikit arogan". Keadaan sosial menjadi wajar membentuk dan menentukan kesadaran sosial Prabowo.

Sejak kecil, Prabowo memang telah dibingkai dan dibentuk oleh keluarganya sebagai keturunan priyayi berpendidikan Barat. Saat usia 16 tahun, Prabowo menyelesaikan pendidikan sekolah menengah di American School, di London. Di kelas dia dikenal "nakal", karena itu dia sempat "dihukum" dengan cara dinaikkan kelasnya satu level lebih tinggi agar tidak memengaruhi kepribadian teman-temennya seusia, di kelasnya. Namun, anak seorang ahli ekonomi berpaham sosial demokrat ini, ternyata dapat mengikuti pelajaran di kelas yang lebih tinggi, sehingga dia bisa lulus lebih cepat dibanding teman-teman seusianya.

Usai lulus sekolah menengah, Prabowo diterima di tiga universitas di Amerika Serikat. Salah satunya adalah Universitas Colorado. Namun, kuliah pada usia yang masih sangat muda ternyata membuat orangtuanya merasa cemas. Menurut sang ayah, kuliah pada usia sangat muda malah tidak baik secara psikologis. Lantaran itu, dia mengusung Prabowo kembali ke Indonesia, dan memintanya untuk sementara menunda melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Watak keras Prabowo pun muncul. Setelah kembali ke Indonesia untuk menunda pendidikan tinggi karena usia dianggap masih terlalu muda, Prabowo justru ingin masuk sekolah militer. Keinginan terjun ke dunia militer tentu bertentangan dengan keinginan orangtuanya. Awalnya, Sumitro merasa takut jika anaknya jadi tentara, apalagi di Indonesia banyak demonstrasi mahasiswa. Hal itu membuat orangtuanya trauma, karena pernah gagal melakukan pemberontakan pada zaman Orde Lama. Namun, Prabowo tetap *ngotot* seraya mengatakan, "Saya ingin menjadi bagian dari itu. Saya ingin kembali".

Selain itu, ketertarikan Prabowo terhadap dunia militer juga karena kakeknya setiap tahun mengajak Prabowo ke makam dua pamannya yang gugur pada hari yang sama dalam pertempuran di Tangerang, tahun 1946. Kedua paman Prabowo dimaksud adalah seorang perwira dan seorang kadet (taruna). Prabowo mengaku semua peralatan militer dua pamannya itu masih disimpan, baik ranselnya maupun helmnya. Dan sejak kecil Prabowo selalu diajak ke ruang tempat menyimpan peralatan dua almarhum pamannya tersebut.

"Bayangkan, mereka gugur tahun empat enam (1946). Saya lahir tahun lima satu (1951). Jadi kesadaran saya sebagai seorang anak mungkin baru usia tiga atau empat tahun. Tiap tahun saya datang ke rumah, selalu saya dibawa ke kamar itu. Ini ransel pamanmu, ini helm pamanmu. Dari kecil itu, dan tiap tahun saya dibawa ke makam. Ini pamanmu yang gugur untuk republik. Dan itu suasana keluarga saya, mungkin itu yang membuat saya memiliki hasrat kenapa saya ingin masuk tentara," tegas Prabowo.

Dari latar-belakang itulah, selama berada dalam kesatuan Prabowo dikenal memiliki karakter yang sangat keras, emosional, dan gampang marah. Hal itu dia akui. "Waktu saya sebagai komandan pasukan tempur, saya akui memang saya cepat marah. Karena saya di pasukan tempur. Hampir selamanya di pasukan tempur. Pasukan tempur itu adalah ibarat harimau. Yang saya harus gembleng, saya didik, saya besarkan itu harimau-harimau", tandas Prabowo.

Dia ungkapkan pula, tidak gampang menjadi pemimpin pasukan tempur. Semua prajurit punya senjata. Kalau komandannya hanya bisa marah-marah dan prajuritnya benci kepada komandannya, tentu tidak bisa lama menjadi komandan. "Karena setiap prajurit itu punya senjata. Sering di setiap tentara, di manapun, kalau komandannya dibenci, dia (komandan) ditembak anak buahnya sendiri," tandas Prabowo.

2.4.2. Karier Militer

Karakter dasar Prabowo cukup keras. Ketika sudah berkehendak dan memiliki keinginan, rasanya sulit untuk dibelokkan. Apalagi dipatahkan. Meskipun pada awalnya pihak orangtuanya tidak ingin anaknya terjun ke dunia militer, namun Prabowo tetap nekat dan masuk Akademi Militer Nasional (AMN), sebagai taruna Akabri Darat di Magelang. Dia "disponsori" oleh Jenderal TNI Sutopo Juwono untuk bisa masuk AMN.

Di sekolah militer ini, awalnya, Prabowo sering dibuat bulan-bulanan oleh teman-teman seangkatannya, karena bahasa Indonesianya tidak begitu lancar dan lebih fasih menggunakan bahasa Inggris. Namun, semua temannya, baik yang seangkatan maupun seniornya, menjadi *"sungkan"* setelah tahu bahwa Prabowo adalah anak Menteri Perdagangan Profesor Sumitro Djojohadikusumo.

Inilah awal kariernya sebagai militer. Tahun 1974 dia sudah tamat dari AMN. Ada beberapa nama seangkatannya yang kemudian juga tersohor. Sebut saja, antara lain, Syafrie Syamsudin, Mashidin Simbolon, dan Eddi Budianto. Namun, tak ada yang bisa menikmati karier seperti Prabowo yang masa tugasnya lebih banyak dilalui di lingkungan pasukan tempur.

Pada tahun 1976, Prabowo yang masih berpangkat letnan dua (letda) menjadi Komandan Peleton Grup I Kopasandha (sekarang bernama Kopassus). Setahun kemudian naik menjadi Komandan Kompi Nanggala 28 di lingkungan Grup I dalam kesatuan yang sama hingga tahun 1980. Pada Maret 1976, sekitar tiga bulan dia bertugas di Timor Timur setelah separuh dari pulau itu ditinggalkan Portugis.

Pada tahun 1978, Prabowo kembali, dan menjadi Komandan Kompi 112 dengan kode Nanggala 28. Sejak itulah karier militer Prabowo terus menanjak. Tahun 1980-1983 dia menjabat sebagai Perwira Operasi di Grup I. Sebagai anak seorang teknokrat yang memiliki hubungan dekat dengan Presiden Soeharto, Prabowo memang layak bangga pada dirinya. Pada tahun 1983 dia menikahi Siti Hedijati Harijadi (Titek), anak ke-4 Presiden Soeharto. Dia pun kemudian menjadi bagian dari *The First Family* di Indonesia. Sejak saat itulah Prabowo dikenal sebagai menantu kesayangan Soeharto. Pernikahan inilah yang kemudian disebut-sebut banyak kalangan sebagai pemicu kenaikan pangkat Prabowo yang begitu mulus dan cepat, menyalip teman-teman seangkatannya.

Setelah sekian lama menduduki Timor Timur, pada tahun 1993 dia menjadi Pejabat Sementara Komandan Grup III Pusdik Kopassus. Relatif tak berselang lama, menjadi Komandan Grup III Pusat Pendidikan Pasukan Khusus (Pusdikpassus). Tahun 1994 dia dipromosikan untuk mendampingi Brigjen TNI Soebagyo Hari Siswoyo yang saat itu menjabat Komandan Kopassus.

Sejak menjabat sebagai Wakil Komadan Korps Baret Merah, aktivitas Prabowo semakin tampak, karena sering tampil dan diliput berbagai media massa. Hanya sekitar 14 bulan menjabat wakil komandan korps pasukan elite TNI AD itu, dia naik dan menggantikan posisi Brigjen TNI Soebagyo Hari Siswoyo yang dipromosikan sebagai Pangdam IV Diponegoro. Prabowo pun tercatat sebagai jenderal TNI pertama alumni AMN 1974, kala itu.

Setelah menjadi Komandan Jenderal (Danjen) Kopassus dengan dua bintang di pundak, dipenghujung tahun 1997 kabar bahwa Prabowo akan dipromosikan sebagai Panglima Kostrad telah beredar di seluruh Tanah Air. Ini artinya bintang di pundak Prabowo akan bertambah satu lagi, menjadi letnan jenderal (Letjen). Lagi-lagi Prabowo pun masuk ke dalam jajaran perwira tinggi (Pati) di lingkup ABRI dalam usia yang relatif muda, 46 tahun. Menantu Soeharto ini juga menjadi lulusan AMN 1974 yang pertama menduduki jabatan panglima Kostrad. Perjalanan karier yang begitu cepat, tentu tak dapat dilepaskan dari posisinya sebagai menantu kesayangan penguasa Orde Baru, zaman itu.

Siapa menabur angin akan menunai badai, demikian pepatah Belanda. Karier militer Prabowo memang sempat membuat banyak orang iri. Baik dari kalangan internal satu angkatan maupun dari kelompok angkatan seniornya. Bahkan, konon juga di jajaran kalangan pati. Namun, mereka tak berani *menabur angin*, karena sudah pasti pula tidak berani *menuai badai*, dan berhadapan dengan Jenderal Besar TNI (Purnawirawan) Soeharto, sekaligus "presiden *tanpa tanding*", kala itu. Mereka yang iri hanya bisa *ngedumel* dan *kemrungsung rasan-rasan* di belakang.

Gerundelan pun akhirnya terdengar di telinga mantan KSAD, Jenderal TNI (Purnawirawan) Rudini. Menanggapi hal itu, Rudini mengatakan, "Apa yang dicapai oleh Prabowo adalah wajar dan normal. Dia meninggalkan rekan-rekan seangkatannya itu semata-mata karena prestasinya," bela mantan KSAD yang sempat pula menjadi Menteri Dalam Negeri.

Selain Rudini, Panglima ABRI yang saat itu dijabat oleh Jenderal TNI Feisal Tanjung juga angkat bicara, "ABRI akan berusaha menempatkan *the right man on the right place* berdasarkan prestasi yang bersangkutan dan tidak urut kacang," tegas Feisal Tanjung.

Mendapat angin segar macam itu, Prabowo pun langsung membeberkan prestasinya di jagad militer. Mulai dari kontak senjata secara langsung di medan oprasi saat bertugas di Timor Timur, berapa kali oprasi militer dia selesaikan, hingga keberhasilan timnya di Kopassus merebut kejuaraan *Mount Everest* yang katanya mengangkat dan mengharumkan nama bangsa, serta pengakuannya yang konon, sering melatih prajurit komando dari beberapa negara. "Semua itu tidak dilihat. Yang dicari cuma daftar dosa saya," ucap Prabowo, dingin.

2.4.3. Isu Kudeta dan Konflik di TNI

Sebagai seorang prajurit TNI, karier militer Prabowo pun habis setelah Presiden Soeharto *lengser*. Setelah didepak dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad, menantu kesayangan Soeharto ini pun ditendang dari keluarga Cendana, karena dianggap penghianat. Prabowo pun terpaksa harus meninggalkan Indonesia dan meminta perlindungan pada sahabatnya, Raja Abdullah II di Yordania.

Sebelum ada kerusuhan Mei 1998 yang memaksa Soeharto turun, Prabowo adalah "anak emas" yang sangat *digadang-gadang* oleh sang ayah mertua. Maklum, dia satu-satunya menantu yang memiliki latar-belakang sama dengan dirinya (militer). Malah Prabowo disebut-sebut sebagai seorang prajurit yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata prajurut yang ada. Hal itu membuat Soeharto sangat bangga memiliki menantu Prabowo.

Sayangnya, semua berubah setelah Soeharto terjungkal dari kursi kepresidenan. Keluarga Cendana yang semula sangat membanggakan Prabowo, tiba-tiba berubah. Anak Profesor Sumitro ini tiba-tiba justru dianggap sebagai seorang pengkhianat, dan diusir dari keluarga Cendana. "Kamu pengkhianat! Jangan injakkan kakimu di rumah saya lagi!"[6] seloroh putri Soeharto, Siti Hutami Endang Adiningsih (Mamiek), seraya menudingkan jari tangannya hingga hampir menyentuh hidung Prabowo.

Waktu itu, keluarga besar Cendana memang merasa sudah tidak lagi membutuhkan Prabowo, karena dianggap gagal melindungi Soeharto. Keluarga Cendana menduga Prabowo bersekongkol dengan Wakil Presiden BJ Habibie, sehingga sengaja membiarkan domonstrasi mahasiswa masuk dan menduduki ke gedung DPR/MPR. "Kamu kemana saja dan mengapa membiarkan mahasiswa menduduki gedung DPR/MPR?!" kata Siti Herdijanti Rukmana (Tutut) kepada Prabowo. Menanggapi pertanyaan kakak iparnya tersebut, Prabowo langsung menjawab, "Apakah (saya) harus menembaki para mahasiswa itu?!"

Perseteruan antara Prabowo dengan keluarga besar Soeharto rupanya "dimanfaatkan" oleh Wiranto yang sudah lama ingin menyingkirkan Prabowo. Ada beberapa kemunginan mengapa dua Pati TNI ini berseteru. *Pertama,* keduanya sama-sama yakin bahwa Soeharto pasti akan tumbang. Secara kontitusi, menurut mereka, Wakil Presiden Burhanuddin Jusuf Habibie yang akan naik menjadi presiden. Sehingga mereka bersaing, karena keduanya merasa sama-sama dekat secara pribadi dengan B.J. Habibie. *Kedua,* secara politik keduanya sama-sama ingin membersihkan diri. Mereka ingin dianggap sebagai pahlawan di depan keluarga Soeharto dan di mata B.J. Habibie. Namun, mereka juga tetap ingin dipandang sebagai tentara yang pro-reformasi.

Setelah Soeharto menyatakan mundur dari jabatannya sebagai presiden, rekayasa politik dua pati TNI AD itu pun mulai dilakukan untuk saling menjatuhkan. Prabowo bersekongkol dengan Mayjen TNI Kivlan Zen dan Mayjen Muchdi PR untuk mengganti Wiranto dari jabatannya sebagai Panglima ABRI. Persekongkolan ini terjadi karena Wiranto dianggap cuci tanggan dan tidak bertanggungjawab atas terjadinya kerusuhan Mei 1998 di Jakarta. Pasalnya, Wiranto lebih memilih pergi ke Malang justru pada saat situasi keamanan di Ibu Kota sedang terancam.

Untuk mewujudkan keinginannya itu, mereka pun mencari siasat. Prabowo memerintahkan Kepala Staf Kostrad Mayjen TNI Kivlan Zen serta Danjen Kopassus Mayjen TNI Muchdi PR, segera menemui Jenderal Besar TNI (Purnawirawan) A.H. Nasution pada 22 Mei 1998. Tujuannya agar Pak Nas (sapaan akrab Jenderal Nasution) mengirim surat berisi pertimbangan perombakan struktur jabatan TNI kepada Presiden B.J. Habibie. Surat itu berisi saran agar Jenderal TNI Subagyo HS diangkat menjadi Panglima ABRI, Jenderal TNI Wiranto diangkat menjadi Menteri Hankam, Letjen TNI Prabowo Subianto diangkat menjadi KSAD. Selain itu, agar jabatan Panglima ABRI dipisah dengan Menteri Hankam.

Namun, belakangan diketahui surat yang ditandatangani oleh Pak Nas ternyata ditulis oleh Mayjen TNI Kivlan Zen sendiri. Pak Nas hanya tinggal menandatanganinya, karena sedang sakit. Hal tersebut diungkap sendiri oleh Kivlan Zen secara lengkap dalam

bukunya berjudul *Konflik dan Integrasi TNI AD* yang diterbitkan tahun 2004. Tujuan dibuatnya surat yang ditandatangani Pak Nas itu hanya ingin agar jabatan Panglima ABRI diganti, karena mereka merasa kecewa terhadap Wiranto.

Sementara pada 22 Mei 1998, Wiranto melaporkan kepada Presiden Habibie mengenai adanya pergerakan pasukan Kostrad dari luar Jakarta menuju ke Jakarta, tanpa sepengetahuan dirinya sebagai Panglima ABRI. Selain itu, Wiranto juga melaporkan adanya konsentrasi pasukan di Patra Jasa Kuningan, di sekitar kediaman B.J. Habibie yang juga tanpa sepengetahuan Panglima ABRI. Setelah melaporkan hal itu, Wiranto meminta petunjuk kepada Presiden Habibie.

Tanpa berpikir panjang, Presiden pun langsung mengambil keputusan dan memerintahkan kepada Panglima ABRI untuk segera mencopot Letjen TNI Prabowo Subianto dari jabatannya sebagai Panglima Kostrad hari itu juga, sebelum matahari terbenam.

"Sebelum matahari terbenam?" tanya Wiranto.

"Ya! Sebelum matahari terbenam," jawab Presiden Habibie. Kepada penggantinya, diperintahkan agar segera menarik kembali pasukan yang ada di bawah komando Panglima Kostrad ke basis satuan masing-masing. Kebijakan itu diambil karena Habibie merasa Prabowo akan melakukan kudeta dengan indikasi telah mengerahkan pasukan tanpa kordinasi dengan Panglima ABRI.

Untuk memuluskan tujuannya, Wiranto yang sudah tahu ada sedikit konflik Prabowo di dalam keluarga Cendana, langsung dibaca sebagai peluang untuk menguatkan posisinya mendepak Prabowo. Wiranto kemudian menghadap Soeharto dan mengeluhkan sepak-terjang Prabowo yang telah mengerahkan pasukan tanpa sepengetahuan dirinya sebagai Panglima ABRI. Soeharto yang merasa dikhianati menantu sendiri, karena dia anggap telah melakukan persekongkolan dengan Habibie untuk menurunkan dirinya, langsung memerintahkan kepada Wiranto, "Singkirkan Prabowo dari pasukannya!" Demikian perintah Soeharto seperti tertulis dalam buku James Luhulima (2005: 98).

Masih menurut buku James Luhulima, Wiranto tidak secara serta-merta mencopot Prabowo. Mendengar peryataan itu, Wiranto bertanya untuk meminta petunjuk kepada Soeharto, apakah

Prabowo harus dilempar ke teritorial, ke Irian Jaya, atau kemana? "*Ndak* usah! Kasih saja pendidikan. Bukankah keluarganya intelektual?" jawab Soeharto.

Sejak saat itu, jabatan Prabowo sebagai Panglima Kostrad memang dicopot dan digantikan oleh Mayjen TNI Johny Lumintang. Namun, ternyata Mayjen TNI Johny Lumintang hanya menjabat tidak sampai 24 jam. Dia harus menyerahkan jabatannya kepada Mayjen TNI Djamari Chaniago, Panglima Kodam III/ Siliwangi. Menurut catatan KSAD Subagyo HS, kalau dihitung dari waktu serah terima jabatan sampai perintah disampaikan lewat telepon kepadanya, periode jabatan Mayjen TNI Johny Lumintang sebagai Panglima Kostrad malah hanya enam jam (Hendro Subroto, 2009: 20).

Hal ini menunjukkan bahwa ada persetuan dan konflik di jajaran perwira tinggi TNI, sebagaimana kesaksian yang ditulis oleh Mayjen TNI Kivlan Zen atau pun kesaksian Letjen TNI Sintong Panjaitan. Dua pati TNI ini juga membenarkan adanya persaingan antara Prabowo dengan Wiranto untuk merebut simpati Soeharto dan para perwira ABRI lainnya. Sebagaimana dikutip majalah *Tempo* (27 Juni 2004) dari buku Kivlan Zen, "Jenderal Wiranto dianggap tidak senang dengan kalangan Islam dan lebih dekat dengan Benny Moerdani. Kemudian terjadi persaingan antara Letjen Prabowo dan Jendral Wiranto untuk mendapatkan perhatian Soeharto. Terutama ketika gerakan anti Soeharto semakin kuat dimotori kalangan mahasiswa. Panglima ABRI Wiranto mengatakan dengan tegas bahwa demontrasi mahasiswa tak boleh keluar dari kampus".

Perseteruan antara Prabowo dan Wiranto memang bukan sebuah rahasia lagi. Meskipun Wiranto selalu membantah bahwa tidak pernah ada persaingan antara dirinya dengan Prabowo semasa pemerintahan Orde Baru. Pasalnya, versi Wiranto, dirinya seorang jenderal bintang empat, sehingga tidak mungkin bersaing dengan Prabowo yang bintang tiga. Namun, fakta menunjukkan selalu ada silang pendapat di antara keduanya. Salah satunya pada saat kerusuhan Mei 1998. Meskipun bintang tiga, Prabowo berani berkata secara terbuka dan terang-terangan kepada Wiranto.

"Kenapa Wiranto ke Jawa Timur? Untuk apa ia pergi ke Jawa Timur?" tanya Prabowo dalam nada tegas.

Bagi orang sipil yang sudah terbebas dari paham feodalisme, pernyataan semacam ini tentu sudah biasa dan dapat dilakukan oleh siapa saja. Namun, bagi kalangan militer Indonesia yang sistem hirarkhi komandonya masih sangat kolot, tentu menjadi luar biasa. Harap maklum, dalam aturan tentara yang sebenarnya di Indonesia, seorang panglima Kostrad tidak boleh menilai, apalagi mengkritik secara terbuka terhadap seorang panglima ABRI.

Sekali lagi, fakta bicara sendiri. Prabowo bisa melakukan hal tersebut, karena merasa memiliki jalur koordinasi khusus dengan Presiden Soeharto. Malah, menurut Sintong Panjaitan, Prabowo sudah biasa membuat tindakan-tindakan strategis dan mempengaruhi Soeharto pada waktu Orde Baru masih kuat. Sehingga sering melahirkan keputusan-keputusan yang berbeda dan tidak ada satu orang pun yang berani menegur Prabowo karena budaya *ewuh pakewuh*.

Itulah masa lalu Prabowo. Setelah Soeharto tumbang, "kesaktiannya" sebagai menantu kesayangan Soeharto pun rontok. Sebagai musuh lama, Wiranto yang saat itu masih memengang kendali penuh sebagai Panglima ABRI, memanfaatkan posisinya untuk "menggebuk" Prabowo agar tidak menjadi duri dalam daging. Setelah dituduh akan melakukan kudeta, Prabowo pun langsung dicopot dari jabatanya sebagai Panglima Kostrad dan dipindah menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando (Dansesko) ABRI di Lembang, Bandung.

Tentu, itu sebuah pukulan telak bagi Prabowo. Selain baru 63 hari menjabat Panglima Kostrad, dia memilki pasukan yang begitu kuat dan besar, tiba-tiba dimutasi menjadi Dansesko ABRI. Dia menolak. Dari sisi militer, penolakan itu tentu tak lazim. Menolak perintah atasan berarti mengundurkan diri.

Dia mengaku, pada dasarnya dirinya siap diganti. Dia juga mengaku sadar, dirinya pasti akan diganti karena dianggap sebagai bagian dari keluarga Cendana. Menurut Prabowo, dalam sejarah, jika seorang pimpinan diturunkan maka semua orang yang dianggap dekat

dengan pimpinan itu juga harus turun. Namun, dia hanya ingin agar pergantian jabatan Panglima Kostrad terkesan positif dan berjalan seperti pergantian biasa. Normal dan seperti tidak ada gejolak.

Dalam buku Kivlan Zen diungkapkan, selain berseteru dengan Wiranto, Prabowo juga berseteru dengan Jenderal Benny Moerdani. Konflik ini memang bersifat ideologis. Prabowo saat masih menjabat sebagai staf khusus asisten intelijen di bawah pimpinan Moerdani, mendapat penjelasan adanya rencana penghancuran gerakan-gerakan Islam. Moerdani berani bercerita ini kepada Prabowo, karena menganggap Prabowo anak Sumitro Djojohadikusumo sebagai tokoh penganut sosialis demokrat, dan ibunya adalah seorang penganut agama Kristen. Namun, dalam buku Kivlan Zen dituliskan, Prabowo tidak cocok dengan rencana Moerdani itu dan melaporkan rencana itu kepada Soeharto. Melihat rencananya dibocorkan kepada presiden, Moerdani marah besar. Prabowo pun kemudian dimutasi oleh Moerdani.

Hal tersebut juga dikisahkan oleh Letjen TNI (Purnawirawan) Sintong Panjaitan dalam bukunya berjudul *Sintong Panjaitan; Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando* yang ditulis Hendro Subroto (2009: 45-466). Versi Sintong, saat Prabowo masih berpangkat kapten dan baru pulang setelah menyelesaikan pendidikan *Grenzschutzs-gruppe* 9 (GSG-9), suatu satuan antiteror Polisi Federal Perbatasan (*Bundesgrenzschutz*) di Jerman Barat bersama Mayor Luhut Pandjaitan, keduanya langsung mengajukan usul kepada Benny Moerdani. Inti usul mereka, Kopassandha (kini Kopassus) perlu segera membentuk satuan antiteror. Usulan ini diterima dan Mayor Luhut Pandjaitan diangkat menjadi komandan satuan antiteror Detasemen 81/Antiteror. Kapten Prabowo diangkat menjadi wakilnya.

Kemudian pada Maret 1983, menjelang Sidang Umum MPR, Komandan Detasmen 81/Antiteror, Luhut Pandjaitan, mendapat laporan bahwa semua anak buahnya sedang siaga atas perintah Prabowo. Mereka berencana mengambil paksa Letjen TNI Leonardus Benyamin (L.B.) Moerdani, Letjen TNI Sudharmono, Marsdya TNI Ginandjar Kartasasmita dan Letjen TNI Moerdiono, karena diduga akan melakukan *coup d' etat* (kudeta).

Namun, informasi mengenai akan adanya *coup d' etat* itu, versi Sintong Panjaitan hanyalah akal-akalan Prabowo untuk menyingkirkan L.B. Moerdani. Peristiwa Maret 1983 di Kopassandha, merupakan suatu rekayasa yang mirip dengan *counter coup* yang pernah dilakukan Letkol Untung dalam peristiwa 1965 (Hendro Subroto, 2009: 454).

Jika apa yang dikatakan Sintong Panjaitan dan Kivlan Zen benar adanya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada kemiripan karakter Soeharto dengan Prabowo, yang memang cukup lama ditempa di lingkungan keluarga Cendana. Selain itu, darah sosialis kanan dari Sumitro Djojohadikusumo yang pernah mengkhianati perjuangan bangsa dengan cara melakukan pemberontakan PPRI/Permesta, tentu mengalir pula dalam tubuh Prabowo. Pasalnya, keadaan sosial dan lingkungan sosial seseorang, tentu menentukan sikap dan karakter seseorang. Prespektif dan berpikirnya, ucapan dan gaya bicaranya, serta sikap dan tindakannya, tentu mencerminkan dirinya dan masa lalunya. Termasuk lingkungan di mana dirinya dilahirkan dan dibesarkan, semua menentukan karakter individu seseorang.

2.4.4. Pembunuhan dan Penculikan Aktivis 1998

Antara Prabowo dan Soeharto, bisa jadi, memang ada kemiripan karakter, jika tidak boleh dikatakan sama. Hal yang tampak jelas, keduanya sama-sama mengawali karier politiknya dari militer. Watak mereka juga sama-sama keras dalam prinsip. Sebagai prajurit kariernya sama-sama cepat dan mulus. Namun, keduanya juga sama-sama meninggalkan jejak hitam dalam kasus kejahatan umat manusia. Saat Soeharto merebut kekuasaan dari Presiden Soekarno, ribuan umat manusia yang dituduh sebagai anggota dan simpatisan PKI, dibantai dan dihakimi tanpa melalui proses hukum di pengadilan.

Soeharto juga pernah memerintahkan pembunuhan massal yang dikenal dengan sebutan *petrus* (penembakan misterius)[7]. Kasus tersebut bahkan sempat menjadi perhatian

dunia dan dipersoalkan dalam forum internasional. Sementara, sebagai menantu Soeharto, Prabowo juga meninggalkan jejak tudingan kejahatan dan pelanggaran HAM.

Setelah Soeharto turun, 21 Mei 1998, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) menyeret Prabowo untuk diadili terkait kasus oprasi intelijen terhadap beberapa aktivis mahasiswa. Kasus ini terbongkar setelah beberapa mahasiswa yang diculik dan kemudian dibebaskan[8], angkat bicara. Mereka membeberkan bahwa para penculik adalah anggota ABRI berpakaian preman. Menurut Sintong Panjaitan, selama Januari 2008, sembilan aktivis yang diculik masih ditahan dan baru dibebaskan atas perintah Panglima ABRI, setelah peristiwa tersebut terungkap (Hendro Subroto, 2009: 466).

Kasus penculikan ini berawal saat menjelang Pemilu 1997 dan Sidang Umum MPR 1998. Soeharto merasa gusar karena banyaknya oposisi terutama dari kalangan mahasiswa yang dianggap dapat merontokan kewibawaannya jika dibiarkan. Soeharto pun langsung memanggil menantunya, dan memerintahkan kepada Prabowo untuk "menertibkan" gerakan-gerakan mahasiswa itu.

Setelah mendapat perintah secara lisan dari mertuanya itulah Prabowo saat itu menjabat Danjen Kopassus langsung bergerak cepat dan memerintahkan secara lisan kepada Komandan Karsyudha 42 Grup 4/Sandiyudha, Mayor Bambang Kristiono sebagai Satgas Merpati untuk mengumpulkan data tentang kegiatan kelompok radikal.

Berbekal perintah lisan dari Danjen Kopassus dan perintah serupa dari Komandan Grup 4/Sandiyudha yang disusul dengan perintah tertulis dari Danjen Kopassus, maka Bambang Kristiono segera membentuk Tim Mawar dengan anggota 10 orang perwira dan bintara dari Detasmen 81/Antiteror. Tugas pokoknya adalah, mencari dan mengungkap adanya ancaman terhadap stabilitas nasional. Sebagai pasukan khusus yang sudah terlatih, Tim Mawar bergerak cepat dan sangat rahasia, menggunakan metode hitam *undercover*.

Satu per satu nama-nama yang sudah ada dalam daftar pencarian orang (DPO) diburu. Mereka adalah Andi Arif, Nezar Patria, Desmond J. Mahesa, Pius Luistrilanang, Haryanto Taslam, Faisol Resha, dan Raharjo Waluyojati. Dalam sekejap target oparsi itu pun

berhasil diciduk paksa, tanpa perlawanan. Selama dalam penyekapan, mereka diinterogasi dan disiksa hingga tak sadarkan diri.

Sedangkan sejumlah orang korban penculikan lainnya hingga kini (2009) masih dinyatakan hilang. Diduga mereka dibantai, dan hanya institusi TNI yang tahu di mana jasadnya dibuang. Adapun mereka yang dinyatakan hilang, antara lain Petrus Bima Anugerah, Wiji Tukul, Yanie Afri, Sony, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Noval Alkatiri, Ismail, Suyat, Ucok Munandar, Hendra Hambali, Yadin Muhidin, dan Abdun Naser.

Menanggapi kasus tersebut, Prabowo menganggap sebuah kesalahan teknis. "Sudahlah. Itu kesalahan teknis yang kemudian dipolitisasi," tegas Prabowo menanggapi hal tersebut (Femi Adi Soempeno, 2009: 128). Bisa jadi kasus tersebut memang sebuah "kesalahan teknis". Pasalnya, Prabowo bergerak atas inisiatif sendiri, dan tidak melaporkan kepada pimpinannya, Panglima ABRI. Namun, akibat "kesalahan teknis" itulah puluhan orang mahasiswa yang tak berdosa menjadi korban. Belasan di antaranya hilang, dan jenazahnya (jika benar telah meninggal dunia) tidak terungkap hingga sekarang.

Menurut mantan Penasihat Wakil Presiden B.J. Habibie Bidang Pertahanan Kemanan, Sintong Panjaitan, ada dua tugas yang dikenal dalam organisasi militer. *Pertama,* tugas yang diperintahkan langsung dari atasan kepada bawahan. *Kedua,* tugas atas inisiatif sendiri. Pasalnya, tentara memang tidak boleh hanya tinggal diam dan hanya menunggu peritah. Tentara harus punya inisiatif. Namun, sebelum bawahan melaksanakan tugas atau setelah melaksanakan tugas yang dilakukan atas dasar inisiatifnya sendiri, dia harus segera minta izin dan melaporkan kepada atasannya. Dalam hal ini, secara hirarki Prabowo harus melaporkan kegiatan tersebut kepada atasannya, yakni Panglima ABRI, agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Akibat "kesalahan teknis" itulah pada 3 Agustus 1998 dibentuk Dewan Kehormatan Perwira (DKP) untuk mengadili

para tentara yang terlibat sebagai pelaku penculikan. Dalam sidang DKP, Prabowo mengakui bahwa oprasi penculikan 1998 itu memang tidak pernah dilaporkan kepada KSAD Jendral TNI Wiranto maupun kepada Panglima ABRI Jendral TNI Feisal Tanjung. Karena itu, sidang DKP pun mengeluarkan surat rekomendasi kepada Panglima ABRI untuk mengeluarkan keputusan administratif terhadap Letjen Prabowo. Akirnya Prabowo pun diberhentikan dari dinas militer.

Dalam istilah orang Jawa, Prabowo *isih bejo* (masih untung), karena hanya diberhentikan. Maknanya, tidak dipecat, tapi diberhentikan dari dinas aktif di militer. Jadi, masih punya hak pensiun. Sementra itu 11 orang anggota Tim Mawar, 10 orang di antaranya anggota Dentasemen 81/Antiteror dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim Makamah Militer. Mayor Bambang Kristiono dihukum satu tahun 10 bulan penjara, dipotong masa tahanan dan dipecat dari dinas militer. Kapten F.S. Multhazar, Kapten Sulistyo Budi, Kapten Untung Budi Hartono, dan Kapten Yulius Servanus, masing-masing dihukum satu tahun delapan bulan penjara dipotong masa tahanan dan dipecat dari dinas militer. Sedangkan Kapten Dadang Hendra Yudha, Kapten Fauka Noor Farid dan Kapten Djaka Budi Utama, dijatuhi hukuman satu tahun empat bulan penjara dipotong masa tahanan serta dipecat dari dinas militer. Sisanya, tiga orang bintara, yakni Serka Sunaryo, Serka Sigit Sugianto dan Sertu Sukardi, dijatuhi hukuman satu tahun penjara dipotong masa tahanan.

Kenyataan tersebut tentu sangat memukul bagi semua kalangan yang masih memiliki kepedulian terhadap nasib bangsa ke depan. Namun, inilah tradisi dalam budaya yang ada di negeri ini. Dalam sistem hierarkhi, bawahan selalu menjadi korban dan dikorbankan. Sehingga wajar, selama proses persidangan hingga perkara diputus, berkembang opini dalam masyarakat bahwa sidang itu hanya sebuah rekayasa. Ujung-ujungnya, "sang dalang" di balik penculikan aktivis mahasiswa tetap terbebas dari jeratan hukum.

2.4.5. Pergi ke Yordania

Setelah persidangan di Makamah Militer berlalu, Prabowo "menghilang" dari peredaran sejak September 1998. Sebelum bertolak meninggalkan Jakarta, dia yang saat itu belum menerima surat keputusan pensiun, berulang kali menemui Wiranto untuk meminta pensiunnya dipercepat. Dia juga meminta izin pergi ke luar negeri untuk urusan keluarga di Eropa, dan juga untuk berobat. Tujuannya, agar dia bisa pergi sebagai orang sipil yang tidak terikat lagi dengan dinas militer. Wiranto akhirnya memberikan izin pada Prabowo. Surat pensiun pun akhirnya diteken Presiden B.J. Habibie pada 20 November 1998.

Setelah itu, Prabowo terbang ke luar negeri, menuju Yordania. Di negeri itu, dia menemui sahabat karibnya, Raja Abdulah II. Perkenalannya dengan Raja Abdulah II terjadi sejak mereka bertemu dan sama-sama sedang mengikuti pendidikan infantri di Amerika Serikat. Hubungan itu terus disambung dan semakin akrab saat keduanya juga sama-sama mengikuti pendidikan antiteror di Jerman Barat.

Bagaikan seorang tamu agung. Begitu Prabowo tiba di Yordania, langsung disambut dengan upacara kemiliteran. Oleh Abdulah, Prabowo pun diminta untuk menginspeksi pasukan khusus yang dimiliki Yordania. "Di sini, Anda tetap Jenderal," bisik raja Abdulah II kepada Prabowo.

Selama berada di Yordania, dia tidak membawa istrinya, Siti Hediyati Harijadi. Istrinya tinggal di Amerika untuk menemani putranya, Ragowo yang baru berusia 14 tahun, sekolah (SMP) di sana.

Tak ada yang tahu secara pasti, apa saja kegiatan Prabowo selama berdomisili di Yordania, kecuali dirinya sendiri. Namun, kabar yang tersiar di Indonesia waktu itu, Prabowo melatih pasukan khusus di Yordania. Menanggapi tudingan itu, secara diplomatis Prabowo mengatakan, "Saat saya disingkirkan oleh ABRI, oleh elite politik di Indonesia, negeri ini (Yordania) menerima saya dengan baik."

Prabowo memang tidak punya pilihan lain selain tinggal di Yordania[9]. Pada awal Oktober 1998, dia pernah mengurus visa untuk berkunjung ke Inggris. Namun, kantor Kedutaan Inggris di Jakarta menolak permintaan Prabowo. Inggris tidak mau dimasuki oleh orang-orang yang sedang diduga kuat terlibat pelanggaran HAM. Terutama pelanggaran HAM atas kematian dan penculikan mahasiswa dan pembantaian manusia di Timor Timur yang waktu itu sedang marak dibicarakan publik. Sekalipun Prabowo pernah sekolah di Inggris semasa kecilnya, tetapi Inggis tetap menolak. Akibat tidak ada pilihan itulah akhirnya dia merasa cinta dengan Yordania, karena bersedia memberi tempat dan tumpangan hidup.

Secara pasti, memang tak ada yang tahu persis apa saja kegiatan Prabowo selama di Yordania. Namun, pemerintah Indonesia sempat dibuat pusing karenanya. Apalagi setelah tersiar kabar di harian *Al-Ra'i* terbitan Amman, Yordania, edisi 12 Desember 1998. Media ini mengabarkan, Prabowo sempat mendapat penganugerahan status kewarganegaraan Yordania melalui dekrit Raja Hussein. Berita ini pun langsung dilangsir oleh berbagai media di dalam negeri.

Menteri Kehakiman Prof. Muladi, SH dan Menlu Ali Alatas pun dibuat sibuk untuk mencari kebenaran kabar itu. Atas nama pemerintah Indonesia, Muladi mengeluarkan pernyataan akan mencekal Prabowo dan disiarkan di seluruh media massa nasional. "Pencekalan itu akan dilakukan pemerintah karena status hukum Prabowo sampai sekarang belum selesai," tegas Muladi kepada wartawan waktu itu.

Selain Muladi dan Ali Alatas, Kabidpol KBRI Yordania, Feisal, juga ikut pusing. Feisal mengaku pemerintah Yordania tidak memberitahu pihak KBRI tentang adanya pemberian status warga negara kehormatan itu. "Kami di sini justru tahu dari Jakarta bahwa Pak Prabowo diberi status kewarganegaran

Yordania," tangkisnya. Lantaran itu, lanjut dia, pihak KBRI Yordania buru-buru mencari informasi sejelas mungkin soal itu. "Saya belum bisa memberi keterangan banyak karena memang situasinya seperti itu," papar Feisal. Pihak KBRI memang tahu Prabowo berada di Yordania, namun pihak KBRI tidak tahu apa tujuan dan aktivitasnya selama di Yordania.

Menanggapi hal tersebut, jajaran militer di Indonesia pun ikut puyeng. Kasum ABRI yang saat itu dijabat Letjen TNI Fachrur Razi, menyatakan, bila dipandang perlu ABRI akan mengusung pulang Prabowo untuk dimintai keterangan. Agar bisa mendapatkan informasi yang jelas terkait masalah pemberian gelar kewarganegaraan tersebut.

"Kami berusaha mendapatkan informasi tentang Prabowo dari atas nama pertahanan kita. ABRI juga akan meminta kepada BIA (Badan Intelijen ABRI) untuk mengecek hal tersebut. Bila dipandang perlu, kami akan mendatangkan Prabowo," tegas Fachrur. Terkait masalah kabar Prabowo yang kemungkinan melatih pasukan di Yordania, Fachrur mengatakan pihaknya belum tahu pasti. Namun, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Jika hal itu terjadi, Prabowo tidak perlu minta izin ke Pangab karena Prabowo sudah pensiun.

Kegiatan Prabowo selama berada di luar negeri, memang tak terpantau pasti. Namun, sebagai anak seorang keluarga konglomerat, selama menyembunyikan diri dari hiruk pikuk perseteruan politik di Indonesia, Prabowo juga dikabarkan mengembangkan bisnis dan usahanya. Prabowo bekerja sebagai manajer umum grup PT Tirtamas, perusahaan milik adiknya, Hashim Djojohadikusumo, yang bergerak dibidang ekspor-impor seperti karet, kopi, dan sejenis rempah-rempah lainnya. Selain memiliki kantor di Yordania, bisnis ini juga meluas dan dikembangkan di negara-negara Timur Tengah lainnya.

Prabowo memang tidak punya pilihan lain selain tinggal di Yordania[9]. Pada awal Oktober 1998, dia pernah mengurus visa untuk berkunjung ke Inggris. Namun, kantor Kedutaan Inggris di Jakarta menolak permintaan Prabowo. Inggris tidak mau dimasuki oleh orang-orang yang sedang diduga kuat terlibat pelanggaran HAM. Terutama pelanggaran HAM atas kematian dan penculikan mahasiswa dan pembantaian manusia di Timor Timur yang waktu itu sedang marak dibicarakan publik. Sekalipun Prabowo pernah sekolah di Inggris semasa kecilnya, tetapi Inggis tetap menolak. Akibat tidak ada pilihan itulah akhirnya dia merasa cinta dengan Yordania, karena bersedia memberi tempat dan tumpangan hidup.

Secara pasti, memang tak ada yang tahu persis apa saja kegiatan Prabowo selama di Yordania. Namun, pemerintah Indonesia sempat dibuat pusing karenanya. Apalagi setelah tersiar kabar di harian *Al-Ra'i* terbitan Amman, Yordania, edisi 12 Desember 1998. Media ini mengabarkan, Prabowo sempat mendapat penganugerahan status kewarganegaraan Yordania melalui dekrit Raja Hussein. Berita ini pun langsung dilangsir oleh berbagai media di dalam negeri.

Menteri Kehakiman Prof. Muladi, SH dan Menlu Ali Alatas pun dibuat sibuk untuk mencari kebenaran kabar itu. Atas nama pemerintah Indonesia, Muladi mengeluarkan pernyataan akan mencekal Prabowo dan disiarkan di seluruh media massa nasional. "Pencekalan itu akan dilakukan pemerintah karena status hukum Prabowo sampai sekarang belum selesai," tegas Muladi kepada wartawan waktu itu.

Selain Muladi dan Ali Alatas, Kabidpol KBRI Yordania, Feisal, juga ikut pusing. Feisal mengaku pemerintah Yordania tidak memberitahu pihak KBRI tentang adanya pemberian status warga negara kehormatan itu. "Kami di sini justru tahu dari Jakarta bahwa Pak Prabowo diberi status kewarganegaran

Yordania," tangkisnya. Lantaran itu, lanjut dia, pihak KBRI Yordania buru-buru mencari informasi sejelas mungkin soal itu. "Saya belum bisa memberi keterangan banyak karena memang situasinya seperti itu," papar Feisal. Pihak KBRI memang tahu Prabowo berada di Yordania, namun pihak KBRI tidak tahu apa tujuan dan aktivitasnya selama di Yordania.

Menanggapi hal tersebut, jajaran militer di Indonesia pun ikut puyeng. Kasum ABRI yang saat itu dijabat Letjen TNI Fachrur Razi, menyatakan, bila dipandang perlu ABRI akan mengusung pulang Prabowo untuk dimintai keterangan. Agar bisa mendapatkan informasi yang jelas terkait masalah pemberian gelar kewarganegaraan tersebut.

"Kami berusaha mendapatkan informasi tentang Prabowo dari atas nama pertahanan kita. ABRI juga akan meminta kepada BIA (Badan Intelijen ABRI) untuk mengecek hal tersebut. Bila dipandang perlu, kami akan mendatangkan Prabowo," tegas Fachrur. Terkait masalah kabar Prabowo yang kemungkinan melatih pasukan di Yordania, Fachrur mengatakan pihaknya belum tahu pasti. Namun, kemungkinan itu bisa saja terjadi. Jika hal itu terjadi, Prabowo tidak perlu minta izin ke Pangab karena Prabowo sudah pensiun.

Kegiatan Prabowo selama berada di luar negeri, memang tak terpantau pasti. Namun, sebagai anak seorang keluarga konglomerat, selama menyembunyikan diri dari hiruk pikuk perseteruan politik di Indonesia, Prabowo juga dikabarkan mengembangkan bisnis dan usahanya. Prabowo bekerja sebagai manajer umum grup PT Tirtamas, perusahaan milik adiknya, Hashim Djojohadikusumo, yang bergerak dibidang ekspor-impor seperti karet, kopi, dan sejenis rempah-rempah lainnya. Selain memiliki kantor di Yordania, bisnis ini juga meluas dan dikembangkan di negara-negara Timur Tengah lainnya.

2.5. Membangun Kerajaan Bisnis

2.5.1. Mengendalikan Bisnis TNI

Dalam dunia bisnis, nama Prabowo ternyata juga sudah tidak asing. Selain dicipta dari lingkungan keluarga konglomerat Sumitro Djojohadikusumo, praktik bisnis juga sudah dilakukan sejak masih aktif di korps baret merah. Pada tahun 1993, dia mendirikan dan sekaligus sebagai pembina Yayasan Kesejahteraan Korps Baret Merah atau Kobame.

Yayasan Kesejahteraan Kobame dibangun oleh Prabowo sebagai motor penggerak bisnis pasukan elite TNI AD tersebut. Kobame pun makin melesat ketika Prabowo dilantik menjadi Danjen Kopassus, tahun 1995.

Awalnya, yayasan itu memang hanya sebuah koperasi simpan pinjam[10]. Kemudian berkembang, hingga Kobame bisa memiliki armada angkutan bus antarkota dan antarpropinsi, jurusan Jakarta-Semarang.

Pada tahun 1995 setelah Prabowo menjabat Danjen Kopassus, bisnis Kobame pun semakin kuat setelah berkongsi dengan kelompok Arseto milik Sigit Harjojudanto, kakak iparnya. Setelah berkolaborasi, bisnis Kobame dikembangkan untuk membangun dua pabrik briket arang di Solo, Jawa Tengah, dan di Serang, Banten. Investasi yang dimiliki mencapai Rp 7 miliar. Tentu ini sebuah angka investasi yang sangat besar pada tahun 1995.

Selain itu, Kobame juga membangun armada angkatan laut melalui PT Tribuana Antar Nusa. Saham Kobame di perusahaan ini mencapai 70 persen. Inilah bisnis TNI yang luar biasa. PT Tribuana pun akirnya membeli kapal motor penyeberangan senilai Rp 7,5 miliar. Kapal ini mengarungi rute Pelabuhan Bakauheni- Merak.

Tak hanya sampai di situ. Melalui Kobame, Kopassus juga membangun gedung pusat perbelanjaan di atas tanah seluas 1,6 hektar milik Kodam Jaya. Gedung ini bernama Graha Cijantung. Total pembangunannya menghabiskan dana Rp 55 miliar. Bisnis korp baret merah pun tetap tidak sendiri.

Koperasi ini berkongsi dengan putra Masagung, pendiri usaha Gunung Agung, Ktut Abdurachman Masagung. Hasil kongsi ini melahirkan Kobame Propertindo dengan saham masing-masing 50 persen. Bisnis patungan ini mendapat pinjaman modal sebesar Rp 40 miliar dari Bank BRI dan Bank Pelitea milik adik kandung Prabowo, Hasjim Djojohadikusumo.

Namun, sebelum Soeharto turun "tahta", tepatnya pada awal tahun 1998, Ktut Abdurachman sudah membaca situasi ke depan tidak menguntungkan. Ktut Abdurachman cabut dan mengundurkan diri dari perusahaan ini. Sehingga 100 persen saham Kobame Propertindo menjadi milik Kopassus. Analisis Ktut Abdurachman tepat. Krisis ekonomi semakin parah melanda akhir-akhir masa kekuasaan pemerintahaan Soeharto. Setelah ditinggal oleh Ktut Abdurachman, bisnis Kobame Propertindo pun rontok. Utang ke Bank BRI dan Bank Pelitea naik menjadi 70 persen akibat adanya kenaikan bunga bank pada masa krisis ekonomi. Kredit Kobame pun membengkak menjadi Rp 68 miliar. Tak snggup membayar kredit, bisnis Kobame akhirnya diserahkan ke Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN). Inilah potret bisnis militer di bawah kendali Prabowo dan keluarga Sumitro.

2.5.2. Bisnis Anak-anak Sumitro

Setelah dinonaktifkan dari militer dan pergi ke Yordania. Prabowo memang mengikuti jejak saudara-saudaranya untuk menekuni dunia bisnis. Sepulang dari Yordania, November 2001, Prabowo mendirikan Nusantara Energy bersama Johan Teguh Sugianto dan Widjono Hardjanto.

Nusantara Energy didirikan untuk mengkonsolidasikan berbagai perusahaan yang tersebar di bisnis pulp, kehutanan, pertanian, pertambangan, perikanan komersial, dan jasa pelayanan profesional. Inilah "mesin pencetak uang" milik Prabowo. Melalui Nusantara Energy, di Kalimantan Timur Prabowo mengambil alih konsesi hutan PT Tanjung Redep HTI seluas 290.000 hektar yang dulu dikuasai Bob Hasan.

Di Kalimantan Timur, dia bersama adiknya, Hashim Suyono Djojohadikusumo, juga berhasil mengambil alih konsesi hutan seluas 350.000 hektar dari Kiani Group yang dulu juga dikuasai Bob Hasan. Setelah Kiani Group berhasil diambil alih, nama perusahaan itu diganti menjadi PT Kertas Nusantara. Perusahaan milik Prabowo dan Hasim Djojohadikusumo ini berkongsi dengan mantan Menteri Perdagangan di era Habibie, Luhut B. Panjaitan.

Masih di provinsi yang sama, mereka menguasai konsesi hutan PT Kartika Utama seluas 260.000 hektar, PT Ikani Lestari seluas 260.000 hektar, serta perkebunan PT Belantara Pusaka seluas 15.000 hektar lebih. PT Kiani Kertas, PT Kiani Lestari, dan PT Nusantara Berau Coal hanyalah tiga dari belasan anak perusahaan miliknya. Berdasar estimasi Sierlando tahun 2005, total aset Kiani Kertas sekitar US $788 juta. Kalimantan Timur memang "mesin pencetak uang" bagi Prabowo. *Holding company*-nya, Nusantara Energy, telah mulai mengekspor batubara ke Tiongkok.

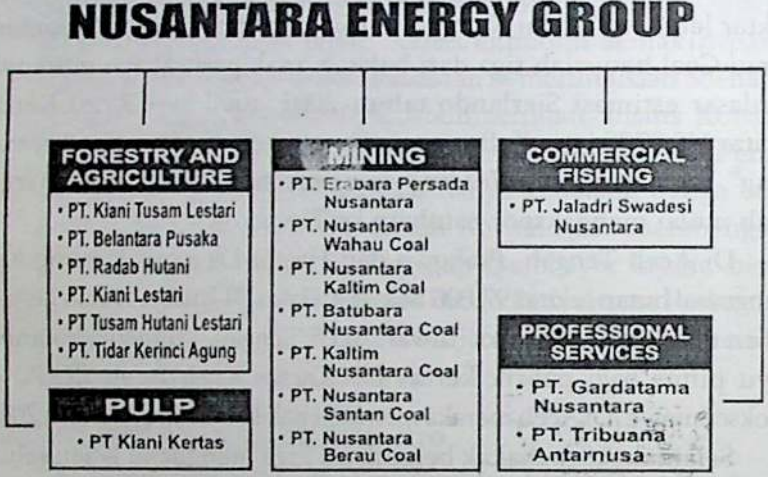
Di Aceh Tengah, Prabowo dan Hasim Djojohadikusumo juga menguasai hutan sekitar 97.000 hektar melalui PT Tusam Hutan Lestari. Lahan di sekitar Danau Lot Tawar, Aceh Tengah, ini menjadi sumber kayu pinus bagi pabrik kertas PT Kertas Kraft Aceh (KKA) di Lhokseumawe. Di Aceh mereka memiliki hak kelola hingga tahun 2042.

Selain di Aceh, kakak beradik ini juga menguasai lahan seluas 35.000 hektar dan di Jambi seluas 28.000 hektar perkebunan kelapa sawit di bawah PT Tidar Kerinci Agung. Di perusahaan ini, Prabowo duduk sebagai presiden direktur.

Bergeser ke Indonesia Timur, di Pulau Bima (NTB), duet bisnis kakak beradik ini juga memiliki budidaya mutiara serta perkebunan jarak seluas 100 hektar untuk bahan bakar nabati. Di Papua, mereka berencana membuka Merauke Integrated Rice Estate (MIRE) seluas 585.000 hektar di Kabupaten Merauke.

Selain itu, mereka juga mengeksplorasi gas dari Blok Rombebai seluas 11.5900 km^2 di Kabupaten Yapen, dan diperkirakan kandungan gas lebih dari 15 triliun kaki kubik.

Inilah kerajaan bisnis anak keturunan Sumitro Djojohadikusumo. Meskipun hutan pinus yang ada di Aceh dianggap tidak ramah lingkungan, dan ekspolitasi gas di Blok Rombebai di Kabupaten Yapen, Papua, diperkirakan berdampak negatif bagi nelayan di Teluk Sairera, namun Prabowo tetap bisa berteriak ingin mensejahterakan rakyat dalam kampanye pemilu 2009. Ya, itulah politik. Apa pun bisa diteriakan oleh orang yang sedang berusaha merebut hati rakyat yang memegang hak suara dalam pemilu. Buat apa dipikir. Setelah pemilu *toh* sebagian besar rakyat Indonesia juga lupa.



Aktivitas Bisnis - Nusantara Energy
sumber:http: //www.prabowosubianto.info

2.6. Gerindra dalam Pusaran Politik

Setelah menghilang dari peredaran, tahun 2004, tiba-tiba Prabowo Subianto muncul dan ikut bersaing dalam bursa pencalonan presiden lewat Partai Golkar. Namun, Prabowo dapat dikalahkan oleh musuh lamanya, Wiranto dalam konvensi partai berlambang pohon beringin itu.

Setelah terpental dalam konvensi percaturan politik Partai Golkar, nama Prabowo pun kembali menghilang. Bagai ditelan

bumi, wajah Prabowo pun tak pernah lagi muncul di media massa. Tak dapat diketahui pasti, berapa biaya uang yang telah dia keluarkan selama mengikuti bursa calon presiden dari Partai Golkar. Hanya dapat diperkirakan cukup besar.

"Kekalahan konvensi di Partai Golkar itu pelajaran politik yang paling mahal. Kalau belajar di universitas saja sudah mahal, ikut konvensi itu lebih mahal. Namun memang memberikan pengalaman riil politik," kata Prabowo sebagaimana yang dikutip Femi Adi Soempeno (2009: 193).

Meskipun telah mengalami kegagalan dalam persaingan politik di Partai Golkar, ambisi Prabowo untuk tetap bisa menjadi orang nomor satu yang paling berpengaruh di negeri ini, seakan tak pernah surut. Setiap hari tiba-tiba Prabowo muncul berkali-kali diberbagai layar televisi nasional. Dia memperkenalkan diri sebagai seorang calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) melalui sebuah iklan kampanye politik.

Menurut harian *Media Indonesia* (Kamis, 12 Februari 2009), berdasarkan data hasil survei AC Nielsen, Partai Gerindra menempati urutan pertama dalam belanja iklan televisi. Disusul Partai Demokrat di urutan kedua dan Partai Golkar di urutan ketiga.

Setiap bulan, rata-rata Partai Gerindra menggelontorkan lebih dari Rp 8 miliar untuk sekali belanja iklan. Menurut temuan AC Nielsen, selama periode 1 Oktober 2008 hingga 2 Februari 2009, dana yang dikeluarkan Partai Gerindra untuk pasang iklan mencapai Rp 46,7 miliar. Sedang total hingga enam bulan terakhir (hingga masa kampanye), biaya iklan Gerindra di media massa sudah mencapai Rp 214,46 miliar. Dana sebesar ini dibagi untuk biaya iklan di televisi Rp 133,78 miliar, di surat kabar sekitar Rp 80,30 miliar, sisanya untuk majalah Rp 0,22 miliar dan Rp 0,15 miliar untuk radio.

Dana biaya iklan hasil survei AC Nielsen tersebut tentu belum termasuk biaya proses pembuatan iklan Partai Gerindra yang, tentu saja, sangat besar pula. Apalagi untuk urusan proses pembuatan iklannya saja, Prabowo mendatangkan dua orang konsultan dari

Amerika untuk membingkai dirinya. Mereka adalah Alex Castinallos, seorang konsultan kampanye Partai Republik AS yang berhasil mengantarkan George W. Bush menuju Gedung Putih. Serta seorang konsultan media iklan televisi, David Axelrod yang juga telah berhasil membingkai penampilan George W Bush sebelum tampil di media televisi, baik dalam bentuk iklan maupun saat sedang diwawancara di televisi.

Dari manakah sumber dana kampanye Prabowo dengan Partai Gerindra-nya? Beberapa sumber menyebutkan, selain dari hasil bisnis pribadinya, Prabowo juga mendapat dukungan penuh dari keluarga besar anak-anak Sumitro Djojohadikusumo. Terutama adiknya sendiri, Hashim Suyono Djojohadikusumo yang menjadi penyandang dana utama kampanye Prabowo dan Gerindra.

Dana sebesar itu diambilkan dari sebagian keuntungan hasil bisnis migas yang dilakukan Hashim. Pada masa kejayaan Pemerintahan Soeharto, Hashim dan Arifin Panigoro diajak Presiden ke negara-negara eks-Uni Soviet, antara lain Kazakhstan dan Azerbaijan untuk membeli konsesi ladang migas disana. Melalui Nations Energy Co yang bermarkas di Calgary, Kanada.

Setelah krisis moneter dan disusul jatuhnya Pemerintahan Soeharto, membuat para keluarga dan kroni-kroni Soeharto dipaksa untuk segera melunasi utang-utangnya yang dikelola BPPN. Arifin Panigoro terpaksa melepas ladang bisnis migas pada tahun 2000. Sementara Hashim baru mau melepas ladang migasnya yang ada di Kazakhstan itu, enam tahun kemudian. Aset itu dijual oleh Hasim kepada CITIC Group (RRT) seharga 1,91 miliar dolar AS atau sekitar Rp 17,2 triliun.

Meskipun bisnis migas di Kazakhstan telah dilepas, bisnis ekonomi Hasim di bidang migas tetap tidak berakhir. Karena anak begawan ekonomi ini masih memiliki aset bisnis migas di Azerbaijan yang juga dikelola oleh Nations Energy Co. Kemudian, setelah harga migas dirasa bagus, pada tahun 2008 bisnis itu baru dilepas.

Menurut Hashim, hasil penjualan ladang migas di Kazakhstan saja lebih dari cukup untuk membiayai kampanye Gerindra. Bahkan,

meskipun hanya Rp 15 miliar saldo awal Partai Gerindra yang dilaporkan ke KPU, ternyata tetap terbesar di antara 38 parpol peserta Pemilu 2009[11].

Selain dibantu adik kandungnya sebagai penyandang dana utama, kampanye politik Prabowo dan Gerindra juga dibantu oleh keponakannya sendiri, Thomas Djiwandono. Thomas adalah anak sulung mantan Gubernur BI, Soedradjad Djiwandono, kakak ipar Prabowo, yang juga menjabat sebagai Direktur Comexindo International (CI) milik Hashim Djojohadikusumo.

Dengan investasi sebesar 6 juta dolar AS, CI membawahi perkebunan karet, teh, dan jagung seluas total 1.200 hektar di Jawa Barat, Minahasa, dan Sumatra Utara. Sementara CI juga memiliki lahan seluas 21.000 hektar di Kalimantan Timur dan ratusan ribu hektar perkebunan enau untuk produksi gula dan ethanol sedang dirintis di Minahasa dan Papua.

Selain didukung oleh keluarga dari anak-anak keturunan Profesor Sumitro sendiri, keinginan Prabowo untuk bisa menjadi presiden RI ke-7 ternyata juga mendapat dukungan dari keluarga Cendana. Bahkan, secara terang-terangan dukungan ini disampaikan melalui adik tiri Soeharto, Probo Soetedjo yang selama ini sering menjadi juru bicara keluarga Cendana.

Catatan:

1 Sebagai ekonom kebanggaan Presiden Soeharto, Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo banyak andil di dalam pembangunan sistem ekonomi yang diterapkan oleh Presiden Soehato pada era Orde Baru. Karena itu, Sumitro pun seharusnya ikut bertanggung jawab apabila sistem ekonomi yang diterapkan oleh pemerintah Orde Baru dianggap keliru. Karena hanya menguntungkan segelintir orang dan mengahibatkan kemiskinan masal terdadap rakyat akibat sistem ekonomi yang dianut oleh pemerintah tersebut.

2 Meskipun dirinya pernah menjabat sebagai menteri pada era kekuasaan Bung Karno, namun perkembangan berikutnya situasinya dirasa tidak menguntungkan dirinya dan PSI. Karena itu, ia memilih bergabung dengan gerakan PRRI dan Permesta tahun 1956. Saat itu pemberontakan di daerah memang sedang gencar terjadi. Tidak sekadar bergabung, Sumitro juga mengaku pernah diberi tugas mencari senjata bagi gerakan separatisme itu. Pemerintah Amerika Serikat, yang saat itu mempunyai kepentingan menjatuhkan pemerintahan Soekarno yang dianggap pro-komunis,

langsung membantu. Beberapa kali agen CIA melakukan kontak khusus dengan Sumitro, untuk memasok dana bagi kegiatan pemberontakannya (majalah tempointeraktif.com).

3 Fakta terjadinya pemerkosaan terhadap perempuan keturunan Tionghoa, terungkap setelah adanya investigasi dari Tim Relawan Kemanusiaan di bawah Romo Sandyawan, serta adanya gugatan dari Ester Indahyabi Jusuf, SH. Bahkan pemerintah Presiden B.J. Habibie juga membuat Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang diketuai Marzuki Darusalam. SH dari Komnas HAM. Namun, para korban dan keluarga korban sangat shock dan merasa tauma, sehingga mereka lebih suka memilih diam, karena kasus itu dianggap sebagai aib keluarga. Sehingga tak ada data pasti berapa jumlah warga keturunan Tionghoa yang menjadi korban pemerkosaan dalam kerusuhan massal, Mei 1998, tetapi diperkirakan jumlahnya mencapai ratusan orang.

4 Baca buku Hendo Subroto (2009), *Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando*, Jakarta: Kompas Penerit buku.

5 Ibid

6 Baca James Luhulima (2005), *Hari-Hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Soeharto*, Jakarta: Kompas Penerbit Buku.

7 Petrus akronim dari penembakan misterius, pada awalnya banyak yang menduga akibat adanya konflik di tubuh militer. Banyak pula yang menduga Benny Moerdani ada di belakang kasus ini.

Namun, kasus yang sempat menghebohkan dunia dan ramai ditulis di media massa tahun 1982 itu, mulai terang setelah terbit buku otobiografi Soeharto. Petrus, ternyata, perintah dari Soeharto (minimal dia mengetahui). Dalam otobiografinya, dia mengatakan, "Kejadian itu misterius juga tidak. Masalah yang sebenarnya adalah, bahwa kejadian itu didahului oleh ketakutan yang dirasakan rakyat. Ancaman-ancaman yang datang dari orang jahat, perampok, pembunuh dan sebagainya terjadi. Ketenteraman jadi terganggu. Seolah-olah ketenteraman di negeri ini sudah tidak ada lagi. Yang ada seolah-olah hanya rasa takut saja. Orang-orang jahat itu sudah bertindak melebihi batas perikemanusiaan. Apakah hal itu mau didiamkan saja? Dengan sendirinya kita harus mengadakan treatmen, tindakan tegas. Tindakan tegas bagaimana? Ya harus dengan kekerasan, tetapi kekerasan itu bukan lantas dengan tembakan dor! Dor! Begitu saja. Bukan! Tetapi yang melawan, ya, mau tidak mau harus ditembak. Lalu ada yang mayatnya ditinggalkan saja. Itu untuk shock theraphy, terapi goncangan. Supaya orang banyak yang mengerti bahwa terhadap perbuatan jahat masih ada yang bisa bertindak dan mengatasinya.

8 Beberapa mantan aktivis yang dulu mengaku sebagai "korban penculikan", kini justru menjadi pengikut Prabowo Subianto dalam pemilu 2009. Bahkan mereka juga yang ikut memproduksi konsep isi pesan kampanye politik Prabowo untuk "membujuk"

rakyat agar bersedia memilih Partai Gerinda. Ada beberapa kemungkinan mengapa mereka yang dulu mengaku sebagai "korban penculikan" dan kini berbalik menjadi pengikut setia Prabowo.

Pertama, layak diduga kuat bahwa mereka yang bebas dan kini berbalik menjadi pendukung Prabowo, sebenarnya tidak "diculik". Namun, mereka mengaku-mengaku "diculik" biar diliput media massa dan menjadi terkenal. Ketenaran inilah yang kini dimanfaatkan sebagai modal oleh mereka untuk terjun ke panggung politik di pemilu 2009. *Kedua*, bisa jadi mereka sebenarnya bukan aktivis mahasiswa, melainkan spionase (mata-mata) yang sengaja disusupkan oleh TNI ke dalam gerakan mahasiswa. Sehingga setelah meraka ikut ditangkap, lalu dibebaskan dengan sengaja oleh penculiknya. Karena, mereka hanyalah petunjuk jalan (informan) dan bukan sasaran utama oprasi tim mawar. Modus opreandi semacam ini juga sering digunakan sebagai cara kerja tim inteljen. *Ketiga*, jika dulu mereka benar aktivis mahasiswa, mungkin mereka adalah tipe orang-orang oportunis yang tidak memiliki pendirian kuat secara ideologi. Sehingga sikap politiknya kini mudah berbalik. Bahkan diantara mereka yang mengaku sebagai "korban penculikan" memang sudah sering menjadi "kutu loncat" dari partai satu ke partai lainnya. Entah mereka hanya sekadar ingin menggali informasi sebagaimana kemungkinan kedua, atau mungkin memang mereka sengaja menjadi "kutu loncat" untuk sekedar mencari makan. Tentu hanya mereka sendiri yang tahu.

9 Selain pernah tinggal di Yordania, selama dalam pengasingan Prabowo juga pernah tinggal di Jerman atas bantuan BJ Habibie yang melobikan pada pemerintah Jerman. Bahkan dikabarkan, selama di Jerman, Prabowo juga sering memberi ceramah di sekolah komando angkatan bersenjata Jerman. Sejak saat itu Prabowo pun sering bolak-balik Yordania-Jerman (Femi Adi Soempeno, 2009: 182).

10 Konsep pembangunan ekonomi kerakyatan dengan sistem koperasi, pertama diperkenalkan di Indonesia memang oleh kalangan kaum sosialis, seperti Hatta dan Sjahrir. Dalam koperasi dikenal sistem tanggung renteng. Namun, dalam praktiknya yang ada hingga kini koperasi tidak pernah dapat meningkatkan sekejahteraan anggotanya, kecuali para pengurusnya yang gemuk dan dapat menikmati keuntungan. Bahkan, dalam perkembangan yang ada saat ini, praktik koperasi simpan pinjam hampir tidak pernah ada yang menyimpan. Rata-rata mereka yang datang ke koperasi simpan pinjam adalah mereka yang sedang kepepet (terdesak) dan butuh pinjaman uang dengan cara cepat. Jaminannya, bisa berupa sertifikat tanah ataupun rumah. Bakan BPKB sepeda motor atau kendaraan bermotor lainnya pun bisa. Pinjaman ini tentu berbunga. Inilah lintah darat gaya baru berkedok KSP (koperasi simpan pinjam) yang dilegalkan oleh negara.

11 Sesuai dengan Pasal 21 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan No.1/Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaporan Dana Kampanye, semua partai politik peserta pemilu

diwajibkan melaporkan dana kampanye, paling lambat tujuh hari sebelum kampanye terbuka dimulai. Dalam peraturan ini, KPU memang tidak mencantumkan kewajiban partai politik untuk melaporkan pengelolaan dana kampanye. Karena itu, partai tak pelu mencantumkan dana yang telah dikeluarkan untuk membayar iklan di media massa sebelum kampanye terbuka dimulai.

Sehingga banyak yang menilai, laporan saldo awal partai ke KPU tidak rasional. Misalnya dana awal Partai Gerindra yang dilaporkan ke KPU hanya sebesar Rp 15,695 miliar. Padahal beberapa bulan sebelu
m kampanye resmi dimulai, partai ini sudah gencar memasang iklan politik di berbagai media massa, baik televisi maupun cetak. Begitu juga Partai Golkar yang sudah sekian puluh tahun berkuasa, dana kampanye yang dilaporkan ke KPU hanya Rp 156,3 juta. Padahal partai ini juga cukup gencar beriklan di televisi.

BAB III
Mengungkap Makna di Balik Wacana

Ada sebuah pernyataan yang pernah diucapan Confusius (Khonghucu) 1551-479 SM, saat ditanya, "Apa yang pertama akan dilakukan jika harus mengelola negara?" Confusius menjawab, "Meluruskan bahasa".

Mendengar jawaban itu, orang yang bertanya tadi heran. Lalu bertanya lagi, "Mengapa?"

"Jika bahasa tidak diluruskan, apa yang dikatakan bukanlah apa yang dimaksudkan. Jika apa yang dikatakan bukan apa yang dimaksudkan, maka apa yang seharusnya diperbuat tetaplah tidak dilakukan. Jika tetap tidak dilakukan, moral dan seni merosot. Jika moral dan seni merosot, keadilan pun tak akan jelas arahnya. Jika keadilan tak jelas arahnya, rakyat hanya akan dapat berdiri dalam kebingungan yang tak tertolong. Maka dari itu, tidaklah boleh ada kesewenang-wenangan dengan apa yang dikatakan. Inilah yang paling penting di atas segala-galanya," jawab Confusius (Rivers dan Mathews, 1994: 9-10).

Apa yang dikatakan Confusius logis. Satu kata memang bisa memiliki seribu makna. Tergantung siapa yang memaknainya dan apa yang dikatakan tentu tak selalu seperti apa yang dimaksud. Pasalnya, setiap orang dapat berkreasi sendiri menurut gagasan dan cita-citanya, termasuk kepentingannya. Selain itu, bahasa yang disusun menjadi kata atau rangkaian kata, memang bukan sesuatu yang netral dan konsisten. Sesuatu yang dapat dikonstruksi, dan direkonstruksi, di-*setting* untuk membentuk gagasan dan tindakan seseorang. Inilah makna kata dalam politik wacana yang menurut Confusius sebagai kesewenang-wenangan terhadap apa yang dikatakan.

Bahasa dan politik wacana pada dasarnya merupakan hasil rekonstruksi fakta sosial. Lantaran itu realitas pun dapat dimaknai sebagai cermin "kenyataan" yang dapat "dikonstruksi" oleh pikiran manusia. Sedangkan pemikiran seseorang tentu tak dapat dilepaskan

begitu saja dari eksistensi kehidupannya. Pemikiran seseorang tak pernah dapat lepas dari kondisi latar-belakang sosialnya, motif, dan kepentingannya.

Sosiologis pengetahuan beranggapan bahwa pengetahuan manusia tak pernah lepas dari subjektivitas individu yang mengetahuainya. Pengetahuan dan eksistensi merupakan dua hal yang tak bisa dipisahkan. Semua orang akan menangkap realitas berdasarkan prespektif dirinya sendiri. Latarbelakang sosial termasuk budaya juga ikut menentukan cara pandang seseorang terhadap realita yang ada di dunia. Sehingga menjadi wajar jika realita yang sama dapat dimaknai berbeda oleh individu yang berbeda latar-belakang sosial dan budayanya. Hal itu karena keadaan sosial menentukan kesadaran sosial seseorang.

Dengan demikian maka menjadi lumrah adanya, ketika merekonstruksi fakta sosial, seorang komunikator selalu membangun *frame* tertentu yang dipengaruhi oleh kecenderungan-kecenderungan yang dimilikinya; seperti latar-belakang sosial, psikologis, kebudayaan, pengalaman sosial, kepentingan, dan ideologinya. Melalui berbagai macam bentuk simbol, seorang komunikator politik memaknai realita menjadi sebuah wacana publik. *Frame* merupakan tindakan seleksi, penegasan, sekaligus eksekusi yang ketat. Sehingga elemen-elemen yang terseleksi menjadi penting dalam memengaruhi wacana, penilaian individu hingga pada sebuah penarikan kesimpulan individu maupun publik.

Sejak zaman dulu, kampanye politik adalah suatu usaha hubungan masyarakat yang bertujuan untuk "membujuk" calon pemberi suara yang sudah terdaftar dan memiliki hak suara dalam pemilu. Itu sebabnya kampanye politik berusaha merangsang perhatian masyarakat. Meningkatkan identifikasi dan citra sang calon, mempopulerkan figur[1] dan pandangan-pandangan sang kandidat, mendorong serta menggerakkan para calon pemberi hak pilih kepada sang calon pada saat pemilihan umum tiba.

Agar dapat merebut hati calon pemilih, salah satu kemampuan yang harus dimiliki kandidat adalah harus memiliki kemampuan dalam memproduksi dan mereproduksi wacana. Wacana ini

kemudian disusun secara sistematis menjadi sebuah kata dan kalimat, untuk kemudian disosialisasikan ke khalayak sebagai calon pemberi hak suara.

Sebagai pendatang baru, Partai Gerindra yang berhasil masuk delapan besar perolehan suara partai politik dalam pemilu 2009, salah satunya karena produksi bahasa yang diciptakan. Meskipun, gencarnya iklan kampanye politik di media televisi juga menjadi faktor penentu keberhasilan partai ini.

Tanpa iklan kampanye politik di media massa (terutama televisi) popularitas Prabowo bukanlah apa-apa dalam dunia percaturan politik di Indonesia. Televisi memang memiliki kekuatan yang luar biasa dalam hal ini. Televisi bagaikan magnet yang mampu mencipta, mengkonstruksi, memengaruhi, mengarahkan, dan membentuk pandangan serta merubah pikiran seseorang dalam sekejap. Orang bisa jatuh seketika karena media ini, namun televisi juga mampu menciptakan seseorang bisa menjadi berubah besar dan terkenal dalam waktu sekejap.

Penulis tidak ingin membahas masalah efektivitas media televisi ataupun masalah iklan kampanye politik Prabowo dalam media massa televisi. Dalam bab ini, penulis hanya ingin membahas pesan politik Prabowo yang ada di dalam situs jejaring sosial *facebook*.

Rupanya, Prabowo ingin memanfaatkan semua sisi dan celah ruang yang dapat dicipta untuk dapat mengumpulkan sebanyak mungkin jumlah suara dalam kampanye. Jauh sebelum kampanye resmi dibuka KPU, pensiunan jenderal bintang tiga ini telah melakuakan kampanye politik di "ruang gaul" situs jejaring sosial, *facebook*.

Di situs ini ada ruang diskusi yang disediakan Prabowo untuk menjawab berbagai macam pertanyaan dari publik. Di antaranya melalui rubrik *Suara Rakyat, Suara Prabowo, Gerindra Menjawab, Diskusi Kaum Muda Peduli Indonesia, 5000 Untuk Bangsa*, dan *Subianto Blogging Competition 2008*. Memang, tidak semua pertanyaan dari simpatisan dijawab oleh Prabowo.

> "...saya menyampaikan mohon maaf sebesar-besarnya kepada Anda sekalian yang telah mengirimkan pesan kepada saya dan belum sempat dijawab. Hal ini dikarenakan begitu banyak, ribuan pesan yang dikirimkan kepada saya, yang tentunya memerlukan waktu untuk menjawabnya (Pesan di *notes facebook*, 22 Maret 2009, pukul 06:39, ditulis sesuai aslinya).

Selain itu, Prabowo juga menyediakan ruang informasi di rublik info FbPS yang berisi rekaman video yang dapat di-*download*, pendaftaran pembuatan kartu tanda anggota (KTA) partai Gerindra secara *online*, Manifesto Perjuangan Partai Gerindra, dan Delapan Program Aksi untuk Kemakmuran Rakyat. Namun, dalam bab ini penulis hanya ingin melihat apa saja isi pesan (tematik) yang ingin disampaikan Prabowo, terutama yang ditulis di *wall* dan *notes facebook* miliknya selama kampanye resmi dibuka KPU, 15 Maret - 5 April 2009.

3.1. Tematik dalam Jargon Politik

Tema sering disebut sebagai "pokok pikiran utama" dari sesuatu yang diuraikan dalam kalimat yang ingin disampaikan oleh penulis melalui tulisannya. Kata "tema" diambil dari kata *"tithenai"* dalam bahasa Yunani yang berarti "menempatkan" atau "meletakkan". Kata "tema" kerap disandingkan dengan apa yang disebut "topik". Kata "topik" juga diambil dari bahasa Yunani yakni, *topoi* yang berarti "tempat".

Aristoteles yang dianggap sebagai salah seorang tokoh retorika pada zaman Yunani Klasik mengatakan, untuk membuktikan sesuatu mula-mula harus ditentukan dan dibatasi *topoi* "tempat" berlangsungnya suatu peristiwa. Sementara, dalam retorika modern, setiap penulis yang ingin menyampaikan sesuatu, mula-mula harus mencari topik yang dapat dijadikan landasan untuk menyampaikan maksudnya mengenai topik tadi.

Secara teoretis, topik juga dapat digambarkan sebagai dalil (proposisi) dan bagian informasi terpenting dari suatu wacana yang dapat memainkan peran penting untuk membangun kesadaran sosial. Sedangkan dalam analisis wacana, Van Dijk mendefinisikan *topik* sebagai struktur makro (*global meaning*) suatu wacana, Eriyanto, (2001: 10); Alex Sobur, (2006: 75). Kembali ke pertanyaan awal, apa saja isi pesan (topik atau tema) yang ingin disampaikan oleh Prabowo Subianto, terutama yang ditulis di *wall* dan *notes facebook* miliknya selama kampanye resmi dibuka KPU tanggal 15 Maret – 5 April 2009?

Meskipun pesan yang ditulis Prabowo di *wall facbook* sangat singkat, rata-rata sekitar dua hingga tiga kalimat, tetapi secara umum tema ini juga dapat mencerminkan watak, ideologi, dan garis politik Prabowo. Sejak awal kampanye resmi dibuka, ada beberapa tema yang dianggap penting oleh Prabowo guna memengaruhi publik. Berikut beberapa tematik kampanye Prabowo, baik yang ditulis di *wall* maupun kotak *notes facebook* miliknya.

3.1.1. Sistem Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat.

Ekonomi dan kesejahteraan rakyat, rupanya telah dianggap sebagai tema besar oleh Prabowo untuk dapat memengaruhi publik. Dengan gaya bahasa tulisan yang agitatif dan provokatif, dia berusaha membangkitkan semangat rakyat dan mengajak bersama-sama untuk bangkit membangun kesejahteraan ekonomi rakyat. Masalah ekonomi rakyat, rupanya memang menjadi prioritas utama yang selalu didengungkan oleh mantan Panglima Kostrad ini guna menggiring wacana publik agar memilih dirinya.

> saya akan teriakan kepada para petani, nelayan, dan buruh di Danau Cimpago, Padang: *"Kalian Berhak untuk Mendapatkan Kehidupan yang Lebih Baik..!!"* (Dalam *wall*, 19 Maret, pukul 06:14. Ditulis sesuai aslinya, cetak miring dari penulis).

> Ass Wr Br.. Selamat Pagi Indonesia Raya.... Dengan semangat "Sabilulungan" (= kerja bersama), mari kita wujudkan semangat dan haluan baru *demi terciptanya Indonesia Raya yang lebih mandiri, dinamis, dan sejahtera*....Sampai jumpa di Bumi Parahyangan...!! (Dalam *wall*, 30 Maret 2009, pukul 05:55. Ditulis sesuai aslinya, cetak miring dari penulis).

Di sini terlihat, titik tekan topik utama yang digunakan sebagai jargon politik kampanye legislatif. Prabowo menginginkan adanya dukungan dari rakyat kecil. Kalimat *"Kehidupan yang Lebih Baik"* yang dia maksudkan tentu tidak ada tujuan lain selain ekonomi. Sebagai negara agraris, sekitar 60 persen penduduk Indonesia memang berada dalam sektor pertanian. Baik mereka yang berstatus sebagai buruh tani maupun petani kecil. Mayoritas penduduk Indonesia yang tinggal di kota, berstatus buruh yang secara ekonomi terpinggirkan.

Secara tegas, Prabowo memang mengusung masalah-masalah ekonomi kerakyatan sebagai tema utama selama melakukan kampanye politik. Hal itu tampak jelas dalam *tulisannya yang berjudul, "Membangun Kembali Kemakmuran Indonesia Raya, Delapan Program Aksi untuk Kemakmuran Rakyat"* dimasukkan ke dalam *facebook*, 13 Maret 2009 pukul 1:14 pm. Delapan program aksi dimaksud semua berisi masalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi kerakyatan.

Isu tema ekonomi dalam pemilu 2009 memang masih menarik, karena realitas kondisi masyarakat secara umum masih hidup di bawah garis kemiskinan. Setidaknya, jika hal itu mengacu pada standar kemiskinan yang digunakan Bank Dunia, bahwa mereka yang berpenghasilan 2 dolar AS per hari baru bisa disebut miskin.

Di beberapa kota besar di Jawa yang menjadi pusat industri, upah minimum kota (UMK) tahun 2009, di DKI Jakarta paling tinggi Rp 1.069.000,00 Namun, upah minimun rata-rata di Jawa Barat pada tahun 2009 justru hanya Rp 568.193,00. Sedangkan di Kota Surabaya Rp 948.500,00 dan di Kota Semarang Rp 838.500,00.

Jika dihitung rata-rata, di atas kertas angka nominal upah minimun secara nasional pada tahun 2009 ini, memang sebesar Rp 918.000,00 per bulan atau sekitar Rp 36.720,00 per hari. Jika nilai tukar 1 dolar AS adalah Rp 10.750,00 maka penghasilan buruh di Indonesia 2009 sekitar 3,41 dolar AS per hari. Namun, ini hanya hitungan di atas kertas sebelum adanya kenaikan harga-harga barang akibat krisis global dan kenaikan BBM. Bandingkan dengan upah minimum di negara Timor Leste yang baru merdeka tahun 2002, saat ini upah buruh di negara "bekas jajahan" Indonesia itu sebesar 85 dolar AS per bulan atau sekitar 3,4 dolar AS per hari.

Pemerintah mengaku berdasarkan data Biro Pusat Statistik, angka penganguran sudah mengalami penurunan dari 11,9 juta di awal pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pada Agustus 2008 turun menjadi 9,4 juta. Namun, akibat adanya krisis ekonomi global tahun 2009, Organisasi Buruh Internasional (International Labour Organization = ILO) memperkirakan jumlah meningkat hingga 8,5 sampai 9 persen. Pasalnya, berdasarkan data ILO, pada November 2008 Depnakertrans mengatakan ada 20.000 buruh terkena pemtusan hubungan kerja (PHK). Sementara hasil temuan ILO, Januari 2009, jumlah pengangguran telah bertambah 24.000 orang yang terkena PHK dan diprediksi akan meningkat menjadi 26.000 orang.

Sementara berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), jumlah orang miskin di Indonesia tahun 2009 melonjak menjadi 33, 714 juta orang, dan lebih tinggi dari target yang diinginkan pemerintah pada level 32,38 juta orang. Jumlah 33,714 juta orang miskin itu setara dengan 14,87 persen jumlah penduduk Indonesia 2009.

Sebagai seorang politisi, Prabowo tentu telah membaca kondisi riil atas realitas objektif tersebut. Potret kemiskinan rakyat Indonesia secara jelas dia gambarkan setelah melakukan kampanye politik di Yogyakarta, 18 Maret 2009. Di kolom *notes facebook*, dia menulis pesan yang diberi judul *"Saya, Prabowo Subianto bersama Mbok Iyem di Yogya"*.

Dalam pesan itu dia bermaksud menggambarkan potret kemiskinan dengan menampilkan sosok Mbok Iyem, seorang perempuan umur 50 tahun sebagai penjual makanan dan *wedang* kopi. Prabowo menggambarkan Mbok Iyem didorong oleh massa ke atas panggung saat dirinya sedang berkampanye. Di atas panggung Mbok Iyem menyampaikan pesan, "Saya tidak punya rumah dan saya harus menyekolahkan anak-anak saya dengan biaya yang sangat mahal", tulis Prabowo melukiskan keluhan Mbok Iyem.

Tema ekonomi sebagai sentral isu kampanye politik, setiap hari selama musim kampanye legislatif, terus diproduksi dan diciptakan Prabowo sebagai wacana politik. Melalui tema ini, dia juga berusaha membentuk dan merekonstruksi wacana agar rakyat tidak lagi percaya dengan pemerintah yang ada sekarang. Secara jelas dan detail, ia menggambarkan bahwa pemerintah yang ada sebelumnya telah gagal menciptakan kesejahteraan ekonomi rakyat.

> *Sejak era Orde Baru,* ekonomi Indonesia cenderung berwatak kapitalistik. Meskipun tumbuh dengan stabil, pemerataan masih menjadi isu utama. Angka kemiskinan absolut dan pengangguran memang berhasil dikoreksi dengan baik, namun liberalisasi ekonomi pada tahun 1980-an telah menyebabkan Indonesia rentan terhadap krisis ekonomi. Krisis ekonomi 1997-1998 merupakan buah liberalisasi yang didorong oleh kekuatan-kekuatan organisasi dana moneter internasional (IMF) sehingga pembangunan Indonesia mengalami kemunduran bertahun-tahun.
>
> Keadaan ekonomi di era reformasi bertambah buruk. Identitas liberal-kapitalistik semakin nyata dan terbukti dengan berbagai produk aturan yang liberal. Kendali kebijakan ekonomi tetap di tangan

> ekonom yang bermazhab neoliberal yang memasarkan resep Konsensus Washington dengan privatisasi, liberalisasi dan deregulasi. Privatisasi dilakukan dengan menjual Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada pihak asing.
>
> Keadaan ini telah menciptakan dominasi asing dalam kepemilikan unit ekonomi. Ekonomi rakyat makin tersisih. *Siapa yang kuat, dialah yang menang. Terjadi kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya, tidak ada pemerataan.* Pembangunan ekonomi hanya dinikmati segelintir orang. *Sistem ekonomi liberal-kapitalistik harus dikoreksi karena gagal mensejahterakan rakyat.* (Manifesto Perjuangan Partai Gerindra, halaman 14-15, *download* 22 Maret 2009, pukul 15:33. Cetak miring dari penulis).

Di sini Prabowo ingin membangun wacana bahwa sistem ekonomi *liberal-kapitalistik* yang diambil oleh pemerintah selama ini, terbukti gagal dan tidak mampu membangun kesejahteraan ekonomi rakyat. Dalam analisis wacana, ini disebut sebagai strategi komunikator membangun citra dirinya dengan cara menggambarkan keburukan lawan politknya secara *gamblang* dan detil. Secara implisit dan samar, dia ingin mengatakan bahwa para elite politik yang sebelumnya pernah memimpin Indonesia, termasuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sudah "tidak layak" untuk dipilih kembali, karena gagal menciptakan kesejahteraan rakyat.

Jika sistem ekonomi yang telah diambil oleh pemerintahan Orde Baru, dianggap salah karena telah gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Orangtua Prabowo, Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo, seharusnya juga ikut bertanggung jawab. Karena, sebagai teknorat, Sumitro adalah bagian dari pemerintah

Orde Baru yang telah ikut merumuskan konsep sistem ekonomi dalam pemerintahan Orde Baru, yang dampaknya hingga kini masih dapat dirasakan rakyat. Kegagalan sistem ekonomi Presiden Soeharto yang mengakibatkan kesengsaraan dan kemiskinan rakyat ini, juga tidak dapat dilepaskan dari konsep sistem ekonomi hasil pemikiran Soemitro, namun sama sekali tidak disinggung oleh Prabowo. Hal ini, tentu secara sengaja disembunyikan rapat-rapat agar citra dirinya tetap terjaga dengan baik.

Sebagai anti-tesanya, Prabowo membangun citra dirinya melalui wacana *sistem ekonomi kerakyatan* dengan konsep *welfare state* (negara kesejahteraan). Dari sini nampak jelas bahwa secara ideologi, dia adalah seorang penganut paham sosialis demokrat (sosdem) sebagaimana ideologi yang dianut oleh ayahnya, Sumitro.

Konsep *welfare state* yang bersumber dari ideologi sosisalis demokrat, lahir dari gagasan kaum borjuasi Eropa yang menerima pandangan Marxisme. Namun, mereka menolak konsep dasar perjuangan kelas yang menjadi ruh teori Marxis. Sehingga oleh kaum Marxis mereka dianggap sebagai kaum revisionis atau sosialis kanan (soska) dalam istilah Bung Karno.

Sebagai kaum revisionis, paham sosdem yang memang bersumber dari kaum borjuasi ini, memang tidak untuk menghancurkan sistem ekonomi kapitalis. Mereka hanya sekedar ingin merangkul kaum kapitalis agar "berbaik hati" dan bersedia membagikan sebagian keuntungannya untuk kesejahteraan rakyat. Di negara-negara Barat, w*elfare state* sering dipandang sebagai strategi "penawar racun" kapitalisme atau "kapitalisme baik hati" (*compassionate capitalism)*, (Suharto, 2005).

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith (2006), ide dasar negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748-1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizens.*

Bentham menggunakan istilah *utility* (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip *utilitarianisme* yang dia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa

sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.

Menurut Bentham, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagian sebanyak mungkin orang. Gagasannya mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan peneliteian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial, membuat dia dikenal sebagai "bapak kesejahteraan negara" (*father of welfare states*).

Meski dengan model dan cara yang berbeda-beda, konsep ini memang telah digunakan oleh banyak negara-negara kapitalis seperti di Eropa Barat, AS, Australia, dan Selandia Baru. *Pertama*, model universal. Sistem dari model ini adalah pelayanan sosial diberikan oleh negara secara merata kepada seluruh penduduknya, baik kaya maupun miskin. Model ini juga sering disebut sebagai *The Scandinavian Welfare States* yang diwakili oleh Swedia, Norwegia, Denmark dan Finlandia. Bahkan sistem kesejahteraan negara di Swedia sering dijadikan rujukan sebagai model yang dianggap ideal karena dapat memberikan pelayanan sosial komprehensif kepada seluruh penduduknya. Konsep kesejahteraan negara di Swedia bahkan dianggap paling berkembang dan lebih maju daripada model di Inggris, AS dan Australia.

Kedua, model korporasi atau *Work Merit Welfare States.* Seperti model pertama, jaminan sosial juga dilaksanakan secara melembaga dan luas. Namun, kontribusi terhadap berbagai skema jaminan sosial berasal dari tiga pihak yakni, pemerintah, dunia usaha (perusahaan) dan pekerja (buruh).

Pelayanan sosial yang diselenggarakan oleh negara diberikan terutama kepada mereka yang bekerja atau mampu memberikan kontribusi melalui skema asuransi sosial. Model ini dianut di Jerman dan Austria. Model ini sering disebut sebagai Model Bismarck, karena idenya kali pertama dikembangkan oleh Otto von Bismarck dari Jerman[2].

Namun, sistem ini tetap memiliki banyak kelemahan. Salah satunya karena konsep ini tidak berusaha menghilangkan kontradiksi dasar dari dua kepentingan yang berbeda antara

pengusaha dan buruh, antara petani dan tuan tanah, atau antara buruh tani dengan perusahaan-perusahaan perkebunan, dan lain-lain. Lantaran itu, disebut hanya sebagai "obat penawar racun" dari kapitalis yang diberikan kepada kaum miskin yang telah diisap tenaga dan keringatnya oleh pemilik modal.

Konsep *welfare states* bisa jadi mungkin dapat menyembuhkan untuk jangka waktu tertentu dan sesaat. Namun, karena konsep ini tidak menghilangkan unsur kontradiksi dasarnya, model penyelesaian ini tetap masih menyimpan api dalam sekam. Karena, hanya sekadar konsensi (sogokan) agar kapitalisme terkesan humanis, konsep *welfare states* ini sebenarnya tak akan membawa dampak positif bagi kesejahteraan ekonomi rakyat. Sebab, tangan kanan kapitalis nampak seperti "membelai" namun tangan kirinya sebenarnya "mencekik" rakyat.

Kelemahan yang lain dari konsep *welfare states*, berpijak pada prinsip skema asuransi, dia tidak dapat mencakup risiko-risiko yang dihadapi manusia terutama jika mereka tidak mampu membayar kontribusi (premi). Asuransi sosial gagal merespon kebutuhan kelompok-kelompok khusus, seperti orang cacat, orangtua tunggal, serta mereka yang tidak dapat bekerja dan memperoleh pendapatan dalam jangka waktu lama. Manfaat dan pertanggungan asuransi sosial juga seringkali tidak kuat, karena jumlahnya kecil dan hanya mencakup kebutuhan dasar secara minimal.

Di Indonesia, konsep ini sebenarnya sudah pernah dilakukan sejak zaman Orde Baru oleh Soeharto. Untuk meredam konflik dalam hubungan industrial, dikenal isilah bipartit (semacan ruang/sarana komunikasi dua pihak) untuk menyelesaikan perselisihan jika ada konflik antara buruh dengan pengusaha. Jika penyelesaian ditingkat perusahaan (bipartit) tidak selesai, mereka bisa meminta bantuan kepada pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang disebut dengan istilah tripartit (buruh, pengusaha, dan pemerintah).

Undang-undang ketenagakerjaan kita juga telah mengatur sistem asuransi tenaga kerja atau biasa disebut dengan istilah Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Sebagai penganut sistem

ekonomi libaral kapitalistik, Orde Baru juga telah memperkenalkan konsep ekonomi *trickle down effect* atau efek tetes ke bawah. Namun, wacana *trickle down effect* yang semua dikenalkan melalui agen-agen pembangunan Bank Dunia dan negara-negara donor kepada negara-negara di Asia, Afrika, serta Amerika Latin, ternyata juga tidak bisa berkembang karena ada fenomena *bottleneck* atau sumbatan dalam proses tetesan pertumbuhan ekonomi.

Sebenarnya bukan hanya Partai Gerindra yang berbicara dan mengangkat tema kesejahteraan rakyat. Dari 44 partai politik yang ada dan bertarung dalam pentas pemilu 2009, semua juga berbicara atas nama rakyat dan *wong cilik*. Namun, hasil "guyonan ketoprak" ini sudah dapat ditebak, *prekethek*!

3.1.2. Tematik Ibu, Perempuan, dan Anak

Meskipun tidak sebesar porsi tema sistem ekonomi dan kesejahtarean rakyat, masalah ibu, perempuan, dan anak, juga sempat disinggung Prabowo sebagai wacana politik publik. Selama melakukan kampanye terbuka 15 Maret-5 April 2009, delapan kali Prabowo menyinggung masalah perempuan yang ditulis di *notes* dan *wall facebook* miliknya.

Secara umum, isi delapan tulisan Prabowo mengenai ibu, perempuan, dan anak, bisa jadi hanya sekadar slogan ajakan untuk meraih simpati dan dukungan dari kaum perempuan. Inilah isi tulisan pertama Prabowo yang secara spesifik ditunjukkan untuk kaum perempuan.

> Ass Wr Br...Selamat Pagi Indonesia Raya....!...Apa kabar *kaum Wanita* Indonesia....?! (Dalam *wall*, 23 Maret 2009, pukul 05:47. Ditulis sesuai dengan aslinya, cetak miring dari penulis).

Dalam tulisan tersebut, jelas tak ada makna apa pun untuk menempatkan kaum perempuan sebagai pilar penting dalam perjuangan Prabowo dan Partai Gerindra, kecuali sekadar

ucapan "basa-basi" untuk meraih dukungan suara dari kaum perempuan dengan cara menyapa di pagi hari. Pemilihan kata "*wanita*" yang digunakan Prabowo untuk menyebut kaum hawa menjadi bukti nyata. Dia tidak menempatkan kaum perempuan memiliki kesejajaran dengan laki-laki.

Sejak "emasipasi wanita", istilah "wanita" untuk menyebut kaum perempuan sudah tidak pernah digunakan lagi oleh para aktivis gender. Pasalnya, kata "wanita" yang dianggap berasal dari bahasa Jawa, *wanita* (*wani ditata*) sebagai makna pesan yang negatif. Dalam budaya patriarkhi, kata "wanita" memang secara politis digunakan untuk menempatkan bahwa "wanita" adalah *konco wingking* atau teman di belakang bagi suami.

Sehingga, setelah emansipsi wanita, kalangan aktivis gender lebih suka menggunakan kata "perempuan", karena dianggap berasal dari kata "empu". Empu adalah orang yang sangat dihormati pada zaman pemerintahan absolut feodal. Sehingga dengan menggunakan kata "perempuan" dianggap sudah menghormati harkat dan martabatnya kaum hawa.

Setelah melakukan kampanye terbuka di Mataram, Nusa Tenggara Barat, Prabowo juga kembali menulis kata "wanita" untuk meraih simpati dari kalangan ibu-ibu dan perempuan.

> Saya akan langsung evaluasi kampanye dan *terima kasih saya haturkan kepada kaum wanita&saudara2* yang telah memberikan komen2nya ...Lanjutkan perjuangan..! (Dalam *wall*, 23 Maret 2009, pukul 14:12. Ditulis sesuai aslinya, cetak miring dari penulis.)

Meskipun dia membingkai kata "wanita" dengan frase "terimakasih saya haturkan" sebelum menyebut kalimat "kaum wanita", secara implisit dan tersirat, dia masih memandang rendah kaum perempuan. Lantaran itu, setelah mendapat banyak kritik dan masukan, padal 24 Maret 2009, Prabowo langsung mengubah jargon politiknya tentang perempuan sebagai berikut:

> " *Bangun citra kaum Perempuan* Indonesia *di tengah Aura Perubahan*...! Selamat Berkarya,...!! (Dalam *wall*, 24 Maret 2009, pukul 10:55. Ditulis sesuai aslinya, cetak miring dari penulis).
>
> .....
>
> Selamat Sore Indonesia Raya..! Ada yang mengusulkan tahun 2009, "*Tahun Kebangkitan Perempuan.. ?!*" Jadikan kaum perempuan Garda Terdepan Membangun Negeri..! (Dalam *wall*, 24 Maret 2009, pukul 17:37. Ditulis sesuai aslinya, cetak miring dari penulis).

Sejak tanggal 24 Maret 2009, Prabowo memang sudah mengubah pengunaan kata "wanita" dengan kata "perempuan". Namun, jika dilihat dari makna yang terkandung dalam teks kalimat tentang perempuan, tampaknya belum secara konsisten dia berpihak kepada kaum perempuan. Perhatikan kalimat di bawah ini.

> Harapan saya; "*Peran, tanggung jawab* dan semangat partisipasi kaum *Perempuan* dalam *menghangatkan Pembangunan* mampu kita wujudkan bersama..!". (2 April 2009. Ditulis sesuai aslinya, cetak miring dari penulis)

Dalam kalimat tersebut Prabowo memang sudah tidak menggunakan kata "wanita", tetapi telah menggunakan kata "perempuan". Bisa jadi hal itu menunjukan bahwa dia bukan tipikal orang yang konsisten. Namun, bisa juga karena secara pribadi dia sendiri telah melakukan evaluasi. Secara impilist dan samar, sebenarnya Prabowo tidak menghendaki kaum perempuan sebagai bagian pilar utama pembangunan; melainkan masih dianggap sekadar "pelengkap" atau *konco wingking* dalam proses pembangunan.

Dalam frase awal kalimat dia menuliskan, "Peran, tanggung jawab" namun, kemudian disusul dengan kata "menghangatkan" yang tentu dapat bermakna negatif. Pemilihan kalimat "partisipasi kaum perempuan dalam *menghangatkan* pembangunan mampu kita wujudkan bersama", dapat kita maknai bahwa kaum perempuan adalah hanya sekadar "penghangat" untuk mewujudkan pembangunan.

Coba perhatikan jika kata "menghangatkan" dibuang dari kalimat itu agar menjadi seperti ini, "Harapan saya: 'Peran, tanggung jawab dan semangat partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan mampu kita wujudkan bersama"; tentu maknanya menjadi beda.

Dengan menghilangkan kata "menghangatkan", maknanya sudah berubah menjadi kaum perempuan juga memiliki tanggung jawab bersama (yang setara) dalam proses wewujudkan pembangunan. Bukan hanya sekadar "penghangat" atau "penggembira", *konco wingking* atau suporter yang ada di belakang, dan sekadar menjadi penonton. Lebih dari itu, mampu ikut andil secara bersama-sama dalam proses untuk sebuah pembangunan yang diharapkan bersama.

Itulah gaya bahasa Prabowo dalam menulis tema perempuan di *wall facebook*-nya selama musim kampanye yang sebenarnya tidak berpihak kepada kaum perempuan. Dari delapan kali menulis tema perempuan, dua di antaranya adalah tulisan yang dibuat oleh pendukungnya yang kemudian di *forward* dan dipublikasikan di *wall facebook* Prabowo. Salah satunya dari Marwah Daud Ibrahim.

> Asm Wr Br, Selamat Pagi Indonesia Raya,...Saya haturkan Terima Kasih kepada para Supporters yang baru Bergabung di FbPS dan sahabat Blogger yang telah membuat Artikel mengenai saya. Ada titipan pesan dari Mba Marwah Daud Ibrahim untuk Perempuan Indonesia...!! Selamat Beraktivitas..!

"Bersama MDI (Marwah Daud Ibrahim); "Kita Sambut Aura Perubahan Menuju Kebangkitan Perempuan Indonesia Raya...!" (Dalam *wall*, 2 April 2009, pukul 05:34. Ditulis sesuai aslinya)

Selain Marwah Daud Ibrahim, Prabowo juga memperkenalkan putri Bung Hatta, Halida Nuriah Hatta, yang ditulis di dalam *notes facebook*-nya pada 19 Maret 2009, pukul 17:37 WIB. Selain menampilkan tulisan yang berjudul "Surat Halida Nuriah Hatta", Prabowo juga menampilkan gambar foto dirinya bersama putri Bung Hatta itu di panggung terbuka kampanye.

Selain bermakna politis untuk menunjukan bahwa dirinya didukung oleh anak Sang Proklamatror, Bung Hatta, pesan ini juga sekaligus bermakna bahwa partainya memberikan ruang politik terhadap kaum perempuan.

Untuk menarik simpati dari kalangan ibu-ibu, dia juga sempat menyebut anak-anak dalam *wall*-nya. Meskipun kalimat anak-anak yang dimaksud di sini, tentu bukan berarti dia ingin mengajak anak-anak berkampanye. Dia, agaknya, cuma ingin disebut sebagai orangtua yang dapat mengayomi semua warga dengan menyebut sebagai anak-anaknya:

Ass Wr Br. Selamat Pagi Indonesia Raya,....Apa Kabar bapak, ibu dan *anak-anakku* sekalian.....Mari Gelorakan Semangat Membangun...Negeri...!!! (Dalam *Wall*, 24 Maret 2009, pukl 06:05)

Bahkan berdasarkan laporan situs www.*inilah.com*, pada saat melakukan kampanye di Stadion Andi Mattalatta, Makassar, Sulawesi Selatan, pada 25 Maret 2009, Prabowo sempat mengusir anak-anak yang memakai kaus Gerindra dan ada di dalam stadion tersebut. Alasannya, karena tidak ingin ditegur Panwaslu. "Saya minta agar anak-anak, apalagi yang memakai seragam (kaus Gerindra) keluar dari arena ini, mohon maaf," tegas Prabowo.

Meskipun dia tidak ingin melihat ada anak-anak ikut kampanye di lapangan, namun pada 1 April 2009 dia pernah menampilkan tiga foto rombongan anak-anak yang sedang menari, sepertinya untuk memeriahkan kampanye. Di bawah foto itu diberi tulisan, "BARISAN SRIKANDI DAN GARUDA MUDA INDONESIA RAYA". Sedangkan di atas foto itu diberi tulisan sebagai berikut:

> Inilah wajah putra dan putri Bangsa..! Di pundak merekalah Kehormatan dan Harga Diri Bangsa ditentukan...! Barisan Srikandi dan Garuda Muda Indonesia Raya... menyongsong Masa Depan..! (Dalam *notes*, 1 April 2009, pukul 18:37. Ditulis sesuai aslinya).

Tampaknya, foto-foto anak-anak sedang menari itu diambil pada saat melakukan kampanye di stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, tanggal 31 Maret 2009. Pasalnya, selain menampilkan foto anak-anak yang sedang menari, di bawah tiga foto anak-anak itu juga terdapat tiga foto suasana kampanye dan di bawahnya diberi keterangan "KAMPANYE GERINDRA DKI".

Ibu, perempuan, dan anak adalah simbol dari sebuah keluarga, meskipun Prabowo sendiri mengalami kegagalan dalam berumah tangga. Hal itu terjadi setelah dia bercerai dengan Siti Hediati Hariyadi (Titiek). Beberapa saat pasca kerusuhan Mei 1998, dia juga dianggap "pengkhianat" oleh keluarga Cendana. Kendati demikian dia tetap memperhatikan persoalan keluarga dalam kampanye-nya. Setelah sekian hari berkampanye, pada hari libur kampanye di Hari Raya Nyepi, 26 Maret 2009, pukul 12:12, dia menulis pesan di *wall*, "Selamat Menikmati Hari Libur dan Berkumpul bersama Keluarga....!".

3.1.3. *"Save Our Earth"*

Salah satu problema terbesar dunia saat ini adalah rusaknya lingkungan. Eksploitasi alam akibat perkembangan industri, ternyata telah membawa dampak negatif bagi kehidupan umat manusia. Isu pemanasan global (*global warming*) akibat kerusakan alam, pernah menjadi pembahasan serius dunia dan hingga kini belum selesai.

Sebagai seorang pengusaha tambang yang memiliki konsesi seluas 60 ribu hektar, perusahaan Prabowo dan keluarganya (2009) telah mengekspor batubara ke Tiongkok yang, secara otomatis, merusak alam. Belum termasuk kerusakan alam akibat eksplorasi gas di Blok Rombebai seluas 11.590 km^2 di Kabupaten Yapen, Papua; dan sekitar 97 ribu hektar hutan pinus di Aceh yang oleh banyak kalangan aktivis lingkungan dianggap tidak ramah lingkungan.

Untuk menangkis sejumlah pandangan negatif itu, Prabowo pun mengangkat tematik masalah lingkungan di dalam *facebook*-nya. Pada 28 Maret 2009, tiga kali dia menulis tema lingkungan sebagai berikut:

> Asm Wr Br. Selamat Pagi Indonesia Raya...! Mari kita bergabung membantu penyelamatan Bumi dengan earth hour.... (Dalam *Wall*, 28 Maret 2009, pukul 06:07).
>
> "Save Our Earth"....Mari Kita matikan lampu pukul 20:30-21:30..! Selamat Berakhir Pekan...! (Dalam *Wall*, 28 Maret 2009, pukul 20:20)Asm Wr Br. Selamat Pagi Indonesia Raya...! Mari kita bergabung.
>
> .....
>
> Apa yang kita lakukan bisa mengurangi pemanasan Global dan bisa menyalakan 960 desa dan menyelamatkan 284 pohon... Selamat Beristirahat...! (Dalam *Wall*, 28 maret 2009).

Selain menulis di *wall*, masalah lingkungan juga tertuang jelas di poin kelima Manifesto Perjuangan Partai Gerindra. Bukan hanya kerusakan alam akibat ekspoitasi alam secara besar-besaran, namun kerusakan alam akibat pembalakan liar (*illegal logging*) juga tertuang dalam manifesto politik tersebut. Menyimak sepak terjangnya di dunia bisnis yang banyak berhubungan dengan masalah lingkungan, wajar jika banyak kalangan merasa sangsi ihwal kelestarian lingkungan bisa diwujudkan Prabowo, manakala dia memimpin negeri ini. Biarlah waktu yang akan menjawab.

3.1.4. Teknologi dan Pendidikan

Sebagai intelektual, Prabowo memang memiliki perhatian yang cukup besar terhadap hasil sebuah perkembangan teknologi yakni, internet. Selama musim kampanye, berkali-kali dia menulis tematik tentang manfaat internet sebagai media pendidikan, ajang kreatifitas, dan membangun sistem domokrasi.

Seperti yang tampak pada 31 Maret 2009, masalah internet sepanjang empat paragraf berisi 97 kata dia tulis. Di alenia pertama sebagai *lead*-nya, dia ingin menunjukan betapa besar manfaat internet sebagai media pendidikan dan membangun proses demokrasi yang cerdas dan santun. Berikut ini konkretnya:

> Internet adalah medium fenomenal dalam memperkaya demokrasi Indonesia. Internet sebagai "alat bantu" pendidikan politik rakyat dalam membangun proses demokrasi yang santun dan cerdas.
>
> Malam ini saya hadir bersama anda semua untuk mengembalikan demokrasi kepada rakyat. Tepat kiranya kita berkumpul membangun negeri karena saya menyadari internet sebagai kanvas kreatifitas dan kecerdasan Bangsa Indonesia,..!

> Melalui internet, marilah kita mendampingi, mengawal dan mengamankan proses demokrasi dan sebagai komunitas yang bebas nilai kita dituntut untuk terus menerus memberikan kritik membangun.
>
> Marilah komunitas kita ini menjadi "prime mover" menuju demokrasi yang kita idealkan dan terus menyuarakan demokrasi secara langsung oleh rakyat...!! (Dalam *wall*, 31 Maret 2009, pukul 10:40 PM).

Sebagai politisi, dia memang paling aktif di antara para elite politik lain yang sedang berambisi untuk bisa merebut jabatan presiden lewat pilpres 8 Juli 2009. Selain *facebook*, dia juga memiliki banyak situs pribadi.

Di Indonesia, internet memang masih menjadi media massa bagi kalangan kelas menengah, intelektual, dan akademisi. Di *facebook*, dia pun pernah berjanji jika bisa terpilih menjadi presiden, kalangan akademisi akan dijadikan sebagai garda terdepannya.

Saya mendukung dengan membangun infrastruktur dan memastikan Universitas sebagai awal, memiliki *body akses* yang lebih besar dan akan dilanjutkan ke sekolah-sekolah dan pada akhirnya untuk masyarakat umum secara luas. Inilah Konsep saya: "*Broadband* untuk Rakyat"! (Dalam *notes*, 5 April 2009, pukul 18:23. Cetak miring dari penulis).

Selama melakukan kampanye politik, Prabowo memang sering berbicara masalah pendidikan. Setidaknya hal itu juga dapat di poin ketujuh dari "delapan program aksi untuk kemakmuran rakyat" yang juga disosialisasikan melalui *facebook*-nya. Dia berjanji akan mencabut undang-undang tentang badan hukum pendidikan, mencabut pajak buku pelajaran, dan menghentikan model penggantian buku pelajaran setiap tahun. Membagi sedikitnya 1 juta *laptop* kepada mahasiswa per tahun.

Kepada Mbok Iyem saat melakukan kampanye di Alun-alun Yogyakarta, 18 Maret 2009, dia juga mengatakan:

> "Kalian, anak-anak kalian, cucu kalian berhak untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik! *Anak-anak kalian harus sekolah! Jangan ada anak Indonesia yang tidak sekolah karena gak punya uang!* Ini masanya KITA BANGKIT!! Masa menuju Indonesia yang lebih baik! Mari kita Bangkit!!...dan sekali lagi Kita Harus Bangkit...!!" (Dalam *notes,* 18 Maret 2009, pukul 16:35. Ditulis sesuai aslinya, cetak miring dari penulis).

Selain berbicara tematik masalah pendidikan untuk merangkul masyarakat ekonomi lemah, agaknya Prabowo juga ingin mengukir sejarah seperti Barack Obama yang berhasil menuju Gedung Putih melalui kampanye di *facebook*. Kendati dia tidak pernah mengatakan terilhami oleh keberhasilan Obama, tetapi sejarah telah mencatat bahwa Obama adalah orang pertama yang menggunakan *facebook* sebagai media kampanye dan berhasil menjadi Presiden AS.

Begitu memasuki masa-masa akhir kampanye, berulang kali Prabowo menyerukan kepada suporternya untuk mengubah tampilan foto profil di *facebook* dengan gambar (logo) Gerindra. Dia juga menulis ihwal keinginannya mengukir sejarah keberhasilan kampanye lewat situs jejaring sosial ini.

> Saya mengajak semua warga Indonesia di Facebook untuk menuliskan sejarah baru dalam dunia online di Indonesia. Secara kolektif, mari kita ganti foto profil di Facebook dengan gambar "Pilih Gerindra". (Dalam *wall,* 2 April 2009, jam 7:18 pm. Ditulis sesuai dengan aslinya).

> Mari kita ganti foto profil kita di Facebook menjadi "pilih Gerindra". Dengan bergerak secara kolektif, kita bisa ciptakan sejarah baru dalam sejarah dunia online di Indonesia! (Dalam *wall*, 2 April 2009, pukul 18:17. Ditulis sesuai dengan aslinya).

Ajakan untuk mengubah tampilan frofil semacam itu sebenarnya sudah mulai dihembuskan sejak pukul 15.50 WIB, 23 Maret 2009, dengan menulis pesan, "Mengajak Anda untuk mengubah foto profil Anda menjadi *ala* caleg Gerindra! Lihat tutorialnya di forum TIDAR: http://tinyurl.com/fotocaleg". Namun, begitu masa kampanye terbuka tinggal tiga hari, secara gencar seruan tersebut dilakukan kembali. Bahkan, dalam satu hari, sembilan kali Prabowo menulis kalimat yang sama.

Ada beberapa kemunginan mengapa dia menulis pesan tersebut berkali-kali. *Pertama,* mungkin dia seorang penganut paham yang beranggapan bahwa sebuah "kebohongan" ketika disampaikan berkali-kali maka akan menjadi "kebenaran" yang umum. *Kedua*, dia sudah merasa kehabisan ide untuk menulis, sehingga tidak ada kata lain selain meminta suporternya mengganti gambar partainya. *Ketiga,* dia merasa tidak yakin pesannya telah dibaca oleh anggota suporternya di *facebook*. Dari keraguan itulah dia akhirnya menulis pesan agar suporternya menggunakan pesawat telepon atau SMS untuk menggubungi teman-teman mereka yang belum menjadi pendukungnya.

> Selamat Siang Komunitas Demokrasi Suara Rakyat...! Kita sudah *head to head* dengan supp's sebelah...Mari kita manfaatkan telepon, sms, *messenger contact* dsb untuk mengajak gabung sahabat2 kita.(Dalam *Wall*, 3 April 2009, pukul 14:19. Cetak miring dari penulis).

Hingga masa akhir kampanye terbuka, 5 April 2009, jumlah suporter pendukung Prabowo yang tergabung dalam *facebook*, mencapai 22.135 orang. Padahal, pada 21 Maret 2009 masih berjumlah 14.561 orang. Selama 16 hari ada peningkatan jumlah sekitar 7.574 orang. Sebelumnya, 21 Maret 2009, Prabowo mengaku sudah ada 1.000 orang yang mendaftar KTA (Kartu Tanda Anggota Partai Gerindra) secara *online*. "Sudah hampir 1.000 orang mendaftar KTA via *Facebook* saya. Sudahkah anda mendaftar ? Bergabunglah dengan 12 juta anggota Gerindra!" tulis Prabowo di *wall facebook*, 21 April 2009, pukul 13:56.

Indonesia bukan Amerika yang secara mayoritas masyarakatnya memang sudah melek teknologi dan rata-rata pengguna internet. Barack Obama boleh berhasil menuju Gedung Putih dengan memanfaatkan media kampanye lewat situs jejaring sosial *facebook*. Namun, mayoritas rakyat Indonesia masih berada di sektor pertanian yang tinggal di desa. Sementara mereka yang tinggal di kota mayoritas buruh dan pekerja kasar yang tentu saja, lebih mengutamakan kebutuhan untuk makan daripada datang ke warnet hanya untuk sekadar membuka *facebook*. Kampanye di internet memang dapat dilakukan, namun rasanya masih berat untuk dapat mengukir sejarah keberhasilan kampanye di *facebook* dilakukan di Indonesia.

3.2. Adopsi Gaya Bahasa Soekarno

Prabowo Subianto rupanya ingin dianggap seperti mantan Presiden RI Pertama. Selama melakukan kampanye politik melalui media *facebook*, banyak gaya bahasa dan istilah yang dia adopsi dari Bung Karno, menjadi kata kunci yang dia gunakan untuk mempengaruhi dan menghegemoni khalayak.

Sejak jadwal kampanye awal di Stadion Delta Sidoarjo hingga terakhir di Tanggerang, Banten, pesan-pesan yang disampaikan di *wall facebook*-nya membawa nuansa aroma pergerakan seperti pada zaman Bung Karno. Terminologi dan kata *merdeka*, *bangkit*, *menggugat*, *gegap gempita*, *aura perubahan*, *Selamatkan Indonesia Raya*, *Indinesia Macan Asia*, dan sejenisnya selalu menjadi kata

kunci yang digunakan Prabowo untuk mepengaruhi, mengkonstruksi, dan merekonstruksi kesadaran politik rakyat.

Bahkan, secara jelas dan tegas, saat Partai Gerindra melakukan kampanye di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 31 Maret 2009, dia mengutip terminologi yang pernah digunakan Soekarno, *"Indonesia Menggugat"* sebagai kata kuncinya.

> Asm Wr Br, Selamat Pagi Indonesia Raya....Selamat Pagi Warga Ibu Kota....! *"Indonesia Menggugat..!" Itu Kata Bung Karno sebelum kita Merdeka..!*....dan Mari kita..."gegap gempita" dari Gelora Bung Karno....!! Sampai jumpa di GBK.!..... MERDEKA...!! (pesan di *wall*, 31 April 2009, pukul 05:25, ditulis sesuai dengan aslinya)

*Indonesia Menggugat adalah judul pidato Bung Karno yang di*bacakan sebagai pledoi (pembelaan) di depan Pengadilan Negeri Kolonial Bandung, 8 Agustus 1930. Naskah asli pledoi Bung Karno setebal 70 halaman.

Frase "Indonesia Menggugat" yang digunakan Prabowo Subianto tentu berbeda konteks dengan Soekarno. Sebagai pejuang, Soekarno menolak dianggap salah oleh Pengadilan Negeri Kolonial Belanda di Bandung. "Revolusi bukan berarti melanggar hukum. Tapi, berarti radikal. Perubahan yang radikal. Kami bukan kaum yang sabar. Bukan kaum ular kambang!" demikian sepenggalan isi naskah pledoi Bung Karno.

Kalimat yang cukup menghentakan jantung Pemerintah Kolonial Belanda pada waktu itu, digunakan pada pemilu 2009 oleh Prabowo untuk menghentakan hati rakyat Indonesia agar mendukung Partai Gerindra. Bagi Bung Karno, kalimat "Indonesia Menggugat" jelas bukan sekadar slogan, tapi sebagai sikap politik untuk melawan pemerintah kolonial Belanda. Setelah 79 tahun pledoi Bung Karno berlalu, digunakan oleh Prabowo sebagai "slogan" untuk mempengaruhi rakyat agar mencontreng Partai Gerindra pada pemilu legislatif 9 April 2009.

Selain kata "Indonesia Menggugat", dia sedikitnya dua kali mengutip kalimat yang senada dengan apa yang pernah dikatakan Bung Karno di depan sebuah kongres tahun 1932. "Beri aku seribu orang dan dengan mereka aku akan menggerakan gunung Semeru, tapi berilah aku sepuluh pemuda yang membara cintanya kepada tanah air dan aku akan mengguncang dunia", tegas Bung Karno.

Dua kalimat senada tapi tak sama itu, ditulis di *wall facebook* Prabowo, sebelum melakukan kampanye politik di Bandung, 20 Maret 2009; dan setelah melakukan kampanye di Nusa Tengggara Timur (NTT), 22 Maret 2009.

> Halo-halo Bandung..!; "Beri Prabowo 100.000 Pemuda-Pemudi, Mari Gelorakan Aura Perubahan dari Bumi Parahyangan ke seluruh pelosok Nusantara..!!" Sampai jumpa besok...!!! (Dalam *wall*, 20 Maret 2009, pukul 10:57. Ditulis sesuai dengan aslinya).
>
> .....
>
> saya rasakan aura "Semangat Merdeka" disini...! ... Beri saya 35 juta pemuda/i untuk "Menyelamatkan Negeri ini...!!" (pesan di *wall*, 22 Maret 2009, pukul 11:44. Ditulis sesuai dengan aslinya).

Untuk bisa menggoncang dunia, Bung Karno hanya butuh 10 orang pemuda yang benar-benar revolusioner dan mencintai tanah airnya. "Hanya sekadar" menyelamatkan Indonesia, Prabowo ternyata membutuhkan 100 ribu pumuda-pemudi dari Bandung dan 35 juta pemuda-pemudi dari NTT.

Selama melakukan kampanye politik, Prabowo memang selalu meminjam istilah dari Soekarno. Seorang anggota DPR dan mantan politisi senior PDI Perjuangan yang membelot ke Partai Gerindra, Permadi, menyebut "Prabowo Subianto sebagai Bung Karno Kecil". Pernyataan ini disampaikan Permadi di depan podium acara HUT pertama Partai Gerindra di Balai Sarbini, Jakarta, Jumat, 6 Ferbuari 2009.

Permadi yang juga seorang paranormal, memandang Prabowo sebagai "Bung Karno kecil" karena visi dan misi partai yang dibangunnya sangat berbau Soekarnois. Sebut saja, antara lain, slogan "kembali ke UUD 1945", "Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika", dan "Berdikari".

Penilaian Permadi yang menyebut Prabowo sebagai "Bung Karno kecil", sepenuhnya adalah hak Permadi. Namun, sebutan tersebut bisa jadi sebuah pernyataan yang gegabah dan sembarangan. Bahkan, bisa jadi menyesatkan.

Pertama, menyamakan Prabowo dengan Bung Karno, bisa jadi sebuah "penghinaan" terhadap Bung Karno. Pasalnya, hingga detik ini rasanya belum ada tokoh nasional yang dapat menandingi Bung Karno, pemimpin besar bangsa Indonesia yang sangat disegani di berbagai belahan dunia. Bung Karno tidak hanya dicintai oleh rakyatnya; sebagai seorang pemimpin Bung Karno juga sangat disegani dan dihormati oleh banyak pemimpin di Asia, Afrika, Amerika Latin yang berjuang melawan imperialisme dan kolonialisme, waktu itu.

Kedua, kebesaran nama Bung Karno tidak hanya sekadar Sang Proklamator Kemerdekaan Indonesia. Lebih dari itu dia juga seorang promotor Konferensi Asia-Afrika di Bandung tahun 1955, tokoh penting dalam Gerakan Non Blok. Keberanian Bung Karno mengatakan, "*Go to hell with your aid*" yang ditujukan terutama kepada AS saat Indonesia keluar dari PPB cukup menghentakkan dunia. Pidato bersejarah di depan Sidang Umum PBB tahun 1960 dengan mengucapkan, "*To build the World Anew*" ini pun langsung mendapat sambutan luar biasa hangat dari hadirin.

Sejak saat itulah Bung Karno disebut sebagai tokoh politik raksasa dalam skala dunia internasional. Bahkan, nama Bung Karno pun disejajarkan dengan nama-nama sekaliber tokoh-tokoh dunia seperti Gamal Abdul Nasser (Mesir), Josip Bros Tito (Yugoslavia), Jawaharlal Nehru (India), Bandaranaike (Srilanka), Ho Chi Minh (Vietnam), Mao Tse Tung dan Zhou Enlai (Tiongkok), Fidel Castro (Kuba).

Ketiga, sepanjang sejarah hidup Bung Karno yang sangat revolusioner, tentu sangat bertentangan dengan sejarah kehidupan Prabowo Subianto. Bahkan, beda itu bisa jadi seperti bumi dan langit. Tidak usah melahirkan gagasan-gagasan besar dan ajaran-ajaran seperti Marhaenisme. Lahirnya Pancasila, Manipol-Usdek, Nasakom, Berdikari, Indonesia Menggugat, buku Di Bawah Bendera Revolusi, dan sejenisnya yang pernah dihasilkan oleh Bung Karno, yang sulit ditandingi oleh Prabowo. Cukup hanya dengan cara menerima, mengerti, memahami, menghayati, dan bersedia mempraktikkan secara sungguh-sungguh, baik dan benar saja, sudah cukup. Paling tidak, itu jika Prabowo mau "disamakan" dengan terminologi "Bung Karno Kecil".

Sebagai orang yang sedang berobsesi menjadi pemimpin nasional lewat pemilu 2009, Prabowo memang boleh berobsesi seperti Bung Karno. Gaya bahasa dan istilah yang pernah digunakan oleh Bung Karno, sah-sah saja dipakai dan digunakan sebagai jargon politik untuk "menghasut" massa pemegang hak pilih dalam panggung kampanye politik 2009. Namun, secara ideologis, Prabowo Subianto dengan Soekarno jelas beda.

Secara ideologi, anak Profesor Sumitro Djojohadikusumo ini jelas seorang penganut sosialis demokrat (sosdem) atau sosialis kanan (soska). Sedangkan Bung Karno adalah seorang marhaenisme. Kedua ideologi itu memang sama-sama bersumber dari marxisme. Namun, sosdem bukan marxisme. Malah, bisa dibilang, sosdem adalah salah satu musuh besar marxisme. Pasalnya, sosdem hanya mengambil sebagian dari ajaran marxisme, dan membuang jauh-jauh apa yang menjadi ruh dari ajaran marxsisme.

Sebagai ajaran yang diciptakan oleh Bung Karno, sebenarnya marhaenisme juga tidak sama dengan ajaran marxisme, meskipun sebagian kalangan beranggapan marhaenisme adalah marxisme yang disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Lantaran itu pandangan tersebut juga masih melahirkan perdebatan hingga sekarang. Maka, untuk memahami secara baik dan benar ajaran sosdem dan marhaenisme, tidak bisa tidak, harus meruntut dari historis lahirnya dua ajaran itu, yakni marxisme.

Kendati demikian, dengan adanya Tap MPRS No XXV/ 1966 tentang Pelarangan Ajaran Komunisme, Marxisme, dan Leninisme, tersebut kita tentu tidak bisa dipelajari di Indonesia. Meskipun setelah adanya perkembangan teknologi, khususnya internet, Tap MPRS No XXV/ 1966 kini tampak sudah tidak punya taring. Pasalnya, ajaran marxisme dan leninisme telah mampu menembus barikade Tap MPRS No XXV/ 1966 melalui internet.

Terlepas dari masalah perbedaan ideologi tersebut, sepanjang masa kampanye pemilu 2009 Prabowo memang lebih suka memilih dan menggunakan gaya bahasa sebagaimana yang pernah dilakukan Bung Karno. Mengapa? Padahal, secara ideologi Prabowo lebih condong ke ideologi sosialismenya Bung Hatta dan Syarir daripada Soekarno?

Pertama, secara politis Bung Karno lebih populis daripada Bung Hatta atau Bung Sjahrir. Sebagai orator, gaya bahasa dan retorika Bung Karno lebih mampu membangkitkan emosi dan semangat rakyat ketimbang Bung Hatta atau Bung Sjahrir. Meskipun dalam konteks kekinian belum tentu gaya bicara Bung Karno yang berapi-api bisa lebih efektif.

Kedua, pemilihan gaya bahasa tersebut bisa menjadi sebuah strategi taktik politik Prabowo untuk memecah massa PDI Perjuangan dan pendukung Megawati Soekarnoputri. Sebagai seorang mantan jenderal TNI yang didukung intelektual, Prabowo pasti mafhum ihwal bagaimana taktik *split* basis massa pendukung PDI Perjuangan yang "fanatik" terhadap Bung Karno.

> Saya, Prabowo Subianto tidak bisa berjuang sendirian! Saya butuh bantuan saudara-saudara untuk berjuang bersama sama saya, demi tetap tegaknya Merah Putih dan menggemanya Indonesia Raya di atas tanah MERDEKA...!!
>
> Tanpa dukungan saudara saudara, Prabowo bukan apa apa! Mari kita selamatkan Indonesia....! (Pesan di *notes*, 25 Maret 2009, pukul 15:26).

Secara eksplisit, kalimat tersebut bermuatan makna ihwal keinginan Prabowo disebut juga sebagai "penyambung lidah rakyat"', julukan kharismatik Bung Karno. Sebagai pemimpin, Bung Karno sering mengatakan, tanpa rakyat Indonesia, sebagai individu Soekarno mengaku tidak memiliki arti apa-apa. Lantaran itu, munurut Bung Karno, sebagai pemimpin rakyat, seseorang harus bisa menjadi "penyambung lidah rakyat".

Idealnya, seorang pimpinan memang harus menjadi penyambung lidah rakyat. Pasalnya, pemimpin sebenarnya adalah bagian dari rakyat, ditentukan oleh rakyat, dan tak pernah terpisahkan dari rakyat yang dipimpinnya. Pemimpin adalah orang yang paling sadar, paling berpengalaman, dan paling mendapat kepercayaan dari rakyat.

Itulah sebabnya seorang pemimpin tidak hanya dituntut memiliki kemampuan untuk memecahkan persoalan yang sedang dihadapi rakyat. Namun, lebih dari itu, seorang pemimpin juga dituntut dapat memahami betul apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Seorang pemimpin tidak diperbolehkan bertindak dan mengambil kebijakan atas dasar kepentingan dan perasaan subjektifnya; melainkan harus selalu bersandar pada kebutuhan dan kesiapan objektif rakyat.

Pendek kata, antara rakyat dan pemimpin terdapat saling hubungan, saling mempengaruhi, dan saling menentukan. Jika pimpinan salah dan menyeleweng dari kepentingan serta cita-cita rakyat, pastilah meruggikan rakyat. Pemimpin semacam itu pasti akan dikoreksi dan disingkirkan oleh rakyat.

Sebaliknya, jika sosok pemimpin memiliki kecakapan dan mahir menjalankan tugas kepemimpinannya, maka dia akan dapat mendorong kemajuan rakyat dengan cepat untuk meraih kesejahteran bersama. Sebaik apa pun, kultus individu tetap harus dihindari, karena kultus individu bisa melahirkan hubungan yang tidak sehat. Pemimpin yang dipuja menjadi menjauhkan diri dari rakyat. Sedangkan rakyat yang memujanya bisa menjadi tumpul dan kehilangan daya kritis. Akhirnya malah menghilangkan hubungan kesatuan dalam perjuangan, antara rakyat dengan pemimpinnya.

Gaya kepemimpinan semacam itu tentu tidak akan pernah dapat dimiliki oleh seseorang yang memiliki latar-belakang priyayi, teknokrat, dan komprador. Karakteristik gaya kepemimpinan yang membumi dengan rakyat seperti itu masih sulit diterapkan pada diri militer yang memang dididik untuk bertempur. Gaya kepemimpinan seperti itu juga belum pernah ada dan dapat dilakuakan oleh kaum sosdem yang masih cenderung didominasi kalangan intelektual.

3.3. Pemilihan Kata Kunci

Selain memproduksi wacana politik, Prabowo juga memproduksi kata dan istilah sebagai simbol sekaligus juga kata kunci. Menurut Van Dijk, segala teks yang dapat melahirkan wacana dapat dilihat dari beberapa struktur kalimat yang ada. Salah satunya dengan cara memahami makna kata atau *leksikon.*

Elemen ini untuk melihat kata apa saja yang digunakan sebagai kata kunci (*keywords*). Pemilihan kata yang digunakan juga dapat menunjukan ideologi tertentu[3]. Lantaran itu persistiwa yang sama pun dapat digambarkan dengan kata-kata yang berbeda dan disesuaikan dengan kepentingan komunikatornya.

Elemen kata kunci adalah kata-kata yang sering dipakai dan digunakan oleh komunikator dalam mengungkapkan gasasannya. Kata kunci juga dapat dimaknai sebagai cermin ideologi dari komunikator. Sebagai cermin ideologi, komunikatror menggunakan bahasa sebagai alat untuk menyampaikan pendapat yang semua ditunjukkan sesuai dengan kepentingan dan orientasinya.

Secara teoritik, kata kunci dapat disebut sebagai perakit (*assembling style*). Unsur-unsur kata kunci dapat dirakit ke dalam berbagai kombinasi dan variasi, baik sintaktis maupun morfologis. Menurut Van Dijk (dalam Eryanto, 2000; dan Alek Sobur, 2006), dalam analisis wacana kalimat (*sintaksis)* digunakan sebagai strategi untuk menampilkan dirinya secara positif dan lawan secara negatif. Strategi ini biasanya digunakan dengan manipulasi politik menggunakan sintaksis (kalimat) seperti pada pemakian kata ganti, aturan tata kata, pemakaian kategori sintaksis yang sepesifik,

pemakaian kalimat aktif atau pasif, pelekatan anak kalimat, pemakaian kalimat yang kompleks, dan sebagainya.

Secara estimologi, kata sintaksis berasal dari kata Yubani (*sun* = "dengan" + *tattein* = "menempatkan"). Sehingga secara estimologi kata sintaksis berarti menempatkan bersama-sama kata-kata menjadi kelompok atau anak kalimat. Sintaksis juga dapat disebut sebagai bagian atau cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase.

Salah satu strategi pada level ini adalah dengan pemakaian koherensi. Koherensi adalah pengaturan secara rapi kenyataan dan gagasan, fakta dan ide menjadi suatu untaian yang logis, sehingga mudah memahami pesan yang dikandung. Koherensi dapat ditampilkan melalui hubungan sebab akhibat atau penjelas. Koherensi ini secara mudah dapat diamati di antaranya dari penggunaan kata penghubung yang dugunakan untuk menghubungkan fakta/proposisi. Kata penghubung yang digunakan (dan, akibat, tetapi, lalu, karena, meskipun) melahirkan makna yang berlainan ketika menghubungkan proposisi.

Misal, "Sistem ekonomi liberal-kapitalistik harus dikoreksi *karena* gagal mensejahterakan rakyat". Dua proposisi yang berlainan makna ini dihubungkan dengan kata sambung "karena" menjadi satu kalimat. Dari kata ini menunjukan bahwa komunikator ingin menampilkan diri secara positif dan menyerang lawan politiknya secara negatif.

Sebagai orang yang sedang berusaha membangun legitimasi dan kepercayaan publik, Prabowo Subianto tentunya, juga memiliki kata kunci atau *keywords* yang sering digunakan dalam setiap memproduksi makna wacana.

Kata *"Merdeka"*, selama musim kampanye sering digunakan sebagai *keyword* Prabowo setiap menulis pesan di *wall* untuk mengkontruksi pandangan khalayak, anggota supporter, atau pendukungnya di dalam *facebook.* Bahkan kata "merdeka" juga sempat dia gunakan ketika menginstruksikan kader Partai Gerindra menengok korban bencana tanggul Situ Gintung, di Ciputat, Kabupaten Tangerang, Banten.

> Saya menghimbau Team Relawan Gerindra dan sahabat untuk segera membantu Korban Bencana Kp.Poncol, Cireundeu-Ciputat.. Satukan hati kita dengan *Merdeka...!* (Dalam *wall*, 27 Maret 2009, pukul 08:14. Ditulis sesuai aslinya, cetak miring dari penulis).

Kata "merdeka" mungkin diambil dari kata *mahardika* (bahasa Jawa) atau dari bahasa Inggris *freedom* (bebas, kebebasan). Namun, kata "merdeka" mungki juga bisa diartikan sebagai sebuah kemenangan. Pada zaman pergerakan kata "merdeka" sering dugunakan untuk memaknai sebagai bayangan sebuah kemenangan setelah terbebas dari belenggu atau bentuk penjajahan. Para pengikut Bung Karno, hingga kini juga sering mengatakan "merdeka" untuk mengawali acara-acara pertemuan, ketika bertemu atau akan berpisah dengan sesama pengikut ajaran Bung Karno, mereka selalu memekikkan kata "merdeka".

Kata "merdeka" yang digunakan oleh Prabowo dalam rangka untuk meminta tim relawan kader partai segera membantu korban bencana itu, tentu tidak bermakna negatif. Bisa jadi kata itu digunakan untuk memberi semangat. Bukan menganggap merdeka setelah melihat ada korban bencana. Kata "merdeka" memang sering digunakan Prabowo selama dalam musim kampanye pemilu 2009.

> Saya, Prabowo Subianto tidak bisa berjuang sendirian! Saya butuh bantuan saudara-saudara untuk berjuang bersama sama saya, demi tetap tegaknya Merah Putih dan menggemanya Indonesia Raya di atas tanah MERDEKA...!! (Dalam *notes*, 25 Maret 2009, pukul15:26. Ditulis sesuai dengan aslinya).

> Dua bersaudara PSD (Prabowo Subianto Djojohadikusumo) dan HSD (Hashim Sumitro Djojohadikusumo), hubungan dua sosok bersaudara yang tidak pernah lekang oleh jaman dan waktu,....!

> Komitmen bagi Bangsa dan Negara nya tidak pernah pudar oleh rintangan sekeras apapun,...! Tetap Tegak Merah Putih dan Menggemanya Indonesia Raya diatas Tanah Merdeka,...! (Dalam *notes*, 1 April 2009, pukul 10:03. Ditulis sesuai dengan aslinya).

Selain menggunakan kata kunci "merdeka", Prabowo juga sering menggunakan istilah "selamatkan" dan "aura perubahan". Penggunaan kata "selamatkan" tentu bertujuan untuk menggambarkan kepada publik bahwa Indonesia saat ini sudah rusak, sakit, hancur, dan sejenisnya yang diakibatkan oleh pemerintahan sebelumnya. Lantaran itu secara implisit komunikator bermaksud agar khalayak tidak lagi memilih partai atau pemimpin yang sedang berkuasa. Melalui pesan ini komunikator berharap khalayak memilih dirinya.

> Selamat Pagi Indonesia Raya...Mari kita hembuskan "Aura Perubahan" ....dan "Selamatkan Indonesia" dari Ende-Nusa Tenggara Timur ....!! (Dalam *wall*, 22 April 2009, pukul 06:45. Ditulis sesuai dengan aslinya).

> Para Sahabat yang saya banggakan, Tidak terasa penyelenggaraan Pileg tinggal beberapa hari lagi. Kurang dari 20 hari. Kita semua tentu perlu dalam kondisi Siaga 1. Kita makin perlu untuk memperkokoh barisan dan mempertegas langkah. Dan kita pun perlu sesering mungkin meneriakan "selamatkan" Indonesia dari keterpurukan yang lebih jauh lagi (Dalam *notes* 22 Maret 2009, pukul 06:39. Ditulis sesuai dengan aslinya)

"Bangkit", juga menjadi salah satu kata kunci Prabowo Subianto yang selalu disampaikan kepada khalayak. Tujuan dari pengunaan kata ini tentu untuk mengajak khalayak bergabung bersama dengan partainya.

> Terima Kasih saya sampaikan kepada masyarakat kota Padang & seluruh penjuru Sumatera Barat, yang telah mendukung Perjuangan Kita Semua,...Ayo kita Bangkit..!! (Dalam *wall*, 19 Maret 2009, pukul 16:46. Ditulis sesuai dengan aslinya).

Penggunaan kata "bangkit" sebagai *keywords* dari pesan politik juga masih digunakan Prabowo hingga jadwal kampanye terakhir Partai Gerindra di Tangerang, 5 April 2009.

Selain menggunakan kata "bangkit", Prabowo juga menggunakan kata kunci "kembalikan Indonesia", "gegap gempita", dan "bangun" sebagai *keywords* yang selalu digunkan dalam slogan dan jargon politiknya.

> Kita buktikan bukan wacana bukan janji,...
> Bangkitlah jiwa bangsaku,...
> Bangunlah semangat barunya,...
> Kita sambut Perubahan dengan gegap gempita Gerakan Indonesia Raya,...
> *Satukan kata hati,....* (Dalam *notes*, 5 April 2009, pukul 20:03. Ditulis sesuai dengan aslinya)

Selain mengirim teks tersebut, di bawah pesan diberi ilustasi berupa tiga gambar (foto). Satu foto Prabowo sedang berorasi sambil mengangkat tangan kiri ke atas dengan telapak tangan diarahkan ke massa. Sedang tangan kanan memegang mikrofon yang ditempelkan di mulutnya. Dalam bahasa gambar televisi, ukuran foto ini disebut *cluse medium shoot* (CMS). Dua gambar lainnya menunjukan Prabowo sedang menghadap ke massa kampanye. Foto diambil dari belakang dengan ukuran *long shoot* (LS) dan *medium shoot* (MS), sehingga Prabowo membelakangi layar.

Semua kata kunci tersebut tentu digunakan sebagai *keywords* untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Walau hanya sekadar slogan, semua tetap mengandung unsur makna yang dapat merubah dan membentuk wacana. Bahkan menggerakkan secara kolektif sikap khalayak sesuai yang dikehendaki komunikator politik yang memproduksi slogan.

Bahasa nonverbal tentu sengaja diciptakan untuk menciptakan kesan (citra) hubungan kedekatan dengan massa atau rakyat yang ada di tempat itu saat itu. Meskipun di hari-hari biasa, ketika mereka bertemu (berpapasaan di jalan atau di tempat-tempat tertentu) tidak pernah menyapa rakyat atau pendukungnya, itu persoalan lain.

Begitu juga Prabowo saat datang pada hari pertama melakukan kampanye terbuka di Stadion Deltras, Sidoarjo, Jawa Timur, 17 Maret 2009. Melalui sebuah pengawalan ketat dari orang-orang yang berseragam Partai Gerindra dan polisi[1], Prabowo berjalan membelah kerumunan massa menuju panggung. Sesekali dia menyambut uluran tangan pendukungnya yang ingin berjabatan tangan dengannya.

Begitu berada di atas panggung, sesekali tangan kirinya membersihkan wajah dengan sapu-tangan berwarna putih sambil melambai-lambaikan tangan kanan berkali-kali kepada massa pendukungnya. Hal itu menunjukkan bahwa Prabowo tidak tahan terhadap cuaca panas. Namun, gelora jiwanya untuk memberikan kesan citra diri positif terhadap rakyat yang datang ke Stadion Deltras, mengalahkan rasa cuasa panas itu.

Setelah selesai digunakan untuk membersihkan wajahnya, sapu-tangan warna putih itu langsung diberikan kepada orang yang berdiri di belakangnya. Mungkin orang yang menerima sapu-tangan tersebut adalah pengawalnya.

Secara pribadi, barangkali memberikan sapu-tangan yang telah digunakan untuk menyeka keringat di wajah, sudah terbiasa dilakukan Prabowo. *Pertama,* sebagai anak orang kaya, sejak kecil dia tentu sudah terbiasa meminta dan dilayani oleh orang lain. *Kedua,* selama berada di kesatuan militer, sejak lulus dari AMN tahun 1974 hingga karier militernya "diberhentikan" secara terhormat pada tahun 1998, dia adalah seorang komandan pasukan elite. Sehingga sudah terbiasa dilayani.

Latar-belakang sosial tersebut termasuk budaya, tentu memengaruhi pembentukan perilaku bahasa nonverbal. Meskipun bahasa nonverbal ini tidak bisa dilakukan untuk menggeneralisasikan dan memberikan stereotip tertentu, tanpa mempehatikan ciri-ciri

individu. Namun, perilaku nonverbal Prabowo Subianto saat memberikan sapu-tangan kepada orang yang berdiri di belakangnya, nampaknya sudah terbiasa dilakukan. Sehingga tidak tampak unsur kaku atau *sungkan* saat memberikan sapu-tangan itu.

Usai menyerahkan sapu-tangannya kepada "*bodyguard*" yang selalu mengikuti ke mana pun Prabowo bergerak, di atas podium Prabowo membuka acara kampanye terbuka itu dengan kalimat basmalah. Kemudian langsung melambaikan tangan kepada massa.

"Hari ini, kita mulai kampanye nasional terbuka Partai Gerakan Indonesia Raya pada tanggal 17 Maret tahun 2009. Menuju pemilihan umum yang akan datang. Untuk kepentingan bangsa, putrinya Presiden Republik Indonesia yang keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur, Mbak Yenni,"[2] kembali Prabowo melambaikan tangan ke massa. Yenni Wahid pun langsung ikut melambaikan tangan ke massa.

Setelah berhenti sejenak untuk melambai-lambaikan tangan ke massa, Prabowo kembali melanjutkan bicara, "Seharusnya Gus Dur hadir juga, tapi karena kita *mengeman-eman* beliau kepada kesehatannya. Juga ditemani tokoh nasional, penyambung lidah Bung Karno, saudara Permadi", seloroh Prabowo seraya menengok ke belakang. Permadi pun langsung melangkah ke depan sambil mengangkat dua tangannya.

Sebenarnya tak ada yang menarik dalam kalimat pembuka tersebut. Rangkaian katanya standar dan biasa-biasa saja, kecuali pada saat mengucapkan kalimat, "Penyambung lidah Bung Karno, Saudara Permadi" tekanan suaranya dipertinggi menjadi lebih keras.

Di balik penekanan suara tersebut tentu ada makna tersembunyi yang sengaja ingin ditunjukkan Prabowo. Paling tidak, dia ingin menunjukkan kepada massa yang hadir di stadion itu, bahwa Permadi yang selama ini mengklaim dirinya sebagai "penyambung lidah Bung Karno" telah memboikot dan keluar dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, selanjutnya bergabung dengan Partai Gerindra. Strategi komunikasi politik tersebut sengaja digunakan untuk "mencuri" perhatian massa pengikut PDI Perjuangan di tingkat bawah.

Mencari perhatian dan mencuri hati rakyat dalam pidato atau orasi politik, tentu dibenarkan dan memang itu tujuan dari kampanye politik. Pada umum, saat ini kampanye politik juga bukan untuk mengajar atau mendidik rakyat; melainkan sekadar upaya untuk mempengaruhi, meyakinkan, dan membakar semangat massa rakyat, agar bersedia memberikan dukungan politik kepada komunikator.

> "Tidak ada jenderal dan tidak ada petani pada hari itu saudara-saudara sekalian. Tidak ada pedagang dan tidak ada pedagang kaki lima pada hari itu saudara-saudara sekalian. Yang ada satu orang, satu suara saudara-saudara. Kekuasaan ada di tangan kita semua saudara-saudara sekalian. Pada hari itu, pada menit-menit itu kita bisa menentukan nasib kita sendiri untuk lima tahun yang akan datang saudara-saudara sekalian. Bahkan tidak hanya lima tahun akan datang. Menurut Partai Gerindra kita bisa menentukan nasib bangsa untuk 25 bahkan 50 tahun yang akan datang"[3]. (Orasi politik Prabowo Subianto, di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 31 Maret 2009).

Pada intinya apa yang disampaikan oleh Prabowo Subianto sebenarnya hanya untuk mengajak khalayak agar memilih partainya saat pemilu tiba. Namun, komunikator sengaja menggunakan gaya komunikasi *gobbeydigook*. Menurut ahli bahasa Stuart Chase (dalam Eriyanto, 2000: 210), *gobbeydigook* didefinisikan sebagai: *using two, or ten words in the place of one, or using a five syllabe word where a single syllabe would suffice* (menggunakan kata yang punya lima suku kata padahal satu suku kata saja sudah cukup).

Gaya komunikasi ini sengaja digunakan komunikator politik untuk menjelaskan suatu masalah secara berbelit-belit. Mencampurkan frase, jargon, slogan dalam satu kalimat yang

diulang-ulang namun pada intinya sama. Penekanan kalimat yang sebenarnya memiliki makna yang tidak jauh berbeda, tetapi di ulang-ulang untuk menyakinkan massa.

Ekspresi wajah Prabowo tampak bersemangat, serius, berapi-api, dan vokalnya lantang sambil tangannya sesekali menuding-nuding kedepan, mengikuti irama suaranya. Seperti pada saat mengucapkan kata "pada hari itu" di belakang kalimat "tidak ada pedagang dan tidak ada pedagang kaki lima" jari telunjuknya terus *ditunjuk-tunjukkan* ke depan.

Gaya itu digunakan oleh komunikator karena ingin menunjukan kepada khalayak bahwa ada persoalan yang serius dan tidak bisa dianggap sepele. Melalui partainya, Prabowo ingin menjelaskan bahwa pemilu bukan hanya sekadar menentukan nasib untuk lima tahun ke depan. Namun, bisa lebih dari itu. Tujuannya, tentu untuk menyakinkan massa yang datang di situ agar percaya.

Dari konteks makna kalimat "*Tidak ada jenderal dan tidak ada petani pada hari itu saudara-saudara sekalian. Tidak ada pedagang dan tidak ada pedagang kaki lima pada hari itu saudara-saudara sekalian. Yang ada satu orang, satu suara saudara-saudara. Kekuasaan ada di tangan kita semua saudara-saudara sekalian. Pada hari itu, pada menit-menit itu kita bisa menentukan nasib kita sendiri untuk lima tahun yang akan datang saudara-saudara sekalian. Bahkan tidak hanya lima tahun akan datang. Menurut Partai Gerindra kita bisa menentukan nasib bangsa untuk 25 bahkan 50 tahun yang akan datang.*" Sebenarnya dapat disederhanakan tanpa mengurangi makna.

Misal, "Tidak ada jenderal dan petani, pedagang dan pedagang kali lima, semua memiliki satu suara pada hari itu untuk menentukan nasib kita untuk lima tahun yang akan datang. Bakan tidak hanya lima tahun, menurut Partai Gerinda kita bisa menentukan nasib bangsa untuk 25 bahkan 50 tahun yang akan datang."

Namun, untuk menyakinkan massa, gaya pemaparan Prabowo selalu cenderung mengulang makna yang sebenarnya dapat disederhanakan. Pengulangan frase kalimat itu sebagai penekan

makna yang ingin ditonjolkan komunikator. Tujuannya sebenarnya hanya sekadar untuk menyakinkan massa melalui bahasa dan kata.

Prabowo tampak cukup memahami latar-belakang sosial-ekonomi massa yang sedang diajak berbicara (komunikan). Sebagai komunikator, dia telah berorientasi pada komunikannya. Bahasa dan kata-kata yang digunakan cukup sederhana, penuh jargon, dan slogan politik untuk membangkitkan emosi massa. Hampir tidak ada satu pun gaya komunikasi penalaran teknis *(technical reasoning)* yang rumit dan ilmiah dalam setiap memaparkan persoalan saat melakukan orasi di lapangan.

Hal itu tentu sengaja dilakukan komunikator agar massa yang memiliki latar-belakang pendidikan yang berbeda-beda. Bahkan tidak menutup kemungkinan, mayoritas massa yang datang dan ikut kampanye di lapangan itu malah berpendidikan rendah. Sehingga jika komunikator menggunakan gaya penalaran teknis yang rumit dengan bahasa dan cara berpikir ilmiah, dapat dipastikan pesan tidak akan sampai. Lantaran itulah gaya *technical reasoning* dengan cara berpikir logis, matematis, simbol-simbol statistik yang ilmiah, tentu menjadi tidak merakyat.

Dalam kampanye politik yang hanya sekadar membutuhkan dukungan suara sesaat dari rakyat selama musim pemilu, bahasa yang digunakan tentu hanya sekadar untuk menciptakan kesadaran politik palsu rakyat. Bukan untuk membangun kesadaran politik sejati. Pasalnya, secara umum partai politik yang ada saat ini memang hanya sekadar membutuhkan rakyat pada saat pemilu. Setelah pemilu usai, partai politik tidak lagi membutuhkan dukungan rakyat.

Rakyat ditinggal dan dibiarkan mencari penghidupannya sendiri. Para elite politik sibuk bagi-bagi kursi kemenangan di parlemen dan lembaga-lembaga pemerintah. Tawar-menawar kursi kabinet dan jabatan, tetap menjadi tradisi untuk sebuah investasi. Lima tahun mendatang, para elite politik akan kembali datang menemui rakyat dengan janji, dan modal dana, tentu.

Begitulah gaya elite politik negeri ini. Walau hanya dengan modal gaya komunikasi slogan dan jargon, tetapi sangat percaya

diri saat mengumbar janji. Pasalnya, setelah jadi *toh* belum banyak rakyat yang menuntut janji. Mereka memaknai demokrasi rakyat hanya ada pada saat sedang membutuhkan suara dan dukungan rakyat. Usai pemilu, demokrasi tetap menjadi milik para elite politik yang sedang menjabat dan berkuasa di lembaga pemerintah.

> "Kita berkumpul karena bangsa kita. Bangsa kita sudah terlalu lama dibohongi oleh pemimpin-pemimpinnya. Dan *ahli-ahli* sudah menemukan, *fakta-fakta, data-data,* bahwa kekayaan kita sudah diambil berapa puluh tahun dan tidak tinggal di kita lagi. Kita sudah dibuat miskin oleh sistem ekonomi yang tidak benar. Mari kita bangun. Kita getarkan bangsa Indonesia"[4]. (Dikutip dari sebagian isi orasi Prabowo Subianto di Sidoarjo, Jawa Timur, 17 Maret 2009. Cetak miring dibuat oleh penulis).

Dalam kutipan tersebut, Prabowo menggunakan gaya bahasa agitatif dan provokatif untuk menunjukkan kemiskinan sebagai akibat dari kebijakan sistem ekonomi pemerintah yang "salah". Melalui pemilihan frase "Kita sudah terlalu lama dibohongi oleh pemimpin-pemimpinnya" sebagai kalimat penekan yang sengaja ditempatkan di awal, ini digunakan untuk memengaruhi agar rakyat tidak lagi percaya terhadap pemerintah yang ada sekarang. Sebagai pembenar dari alasan yang disampaikannya itu, Prabowo menggunakan kalimat *latar*[5] bahwa para ahli sudah menemukan fakta dan data banyak kekayaan alam yang telah diambil. Namun, hasilnya tidak dapat dinikmati oleh rakyat.

Dalam mengucapkan kalimat tersebut, tekanan suaranya tinggi, cepat, dan meyakinkan. Tangan kanan tetap memegang mikrofon dan jari telunjuk kirinya diangkat, digerak-gerakkan ke atas-ke bawah sambil mengatakan, "*fakta-fakta*", "*data-data*", dan sebagainya untuk meyakinkan massa.

Sementara pada kalimat yang dicetak miring seperti, "*ahli-ahli*", "*fakta-fakta*", *dan* "*data-data*" ini sengaja dilakukan oleh komunikator untuk melakukan penonjolan kata. Inilah salah satu ciri khas gaya pemaparan komunikasi politik Prabowo. Selalu menggunakan penggandaan atau pengulangan kata tunggal yang sebenarnya sudah bermakna jamak. Namun, diulang agar semakin menjadi jamak untuk menimbulkan efek tertentu dan terkesan lebih kuat.

"Data" misalnya, adalah bentuk jamak. Bentuk tunggalnya "datum". Namun, oleh Prabowo sebagai komunikator digandakan menjadi "*data-data*" untuk mengesankan begitu banyaknya data hasil temuan para ahli yang digunakan sebagai pembenar komunikator untuk meyakinkan rakyat. Dengan harapan, rakyat percaya dan bersedia memilihnya.

Selain digunakan untuk tujuan penegasan ucapan, penggunaan kata tunggal yang sebenarnya sudah bermakna jamak itu, paling tidak, ada dua kemungkinan. *Pertama,* komunikator politik ini merasa tidak puas kalau hanya menggunakan satu kata. Meskipun tanpa melakukan pengulangan kata berlebihan ini maknanya sudah sama. Tanpa mengurangi makna, sebenarnya kalimat itu dapat diubah menjadi, "Para ahli sudah menemukan fakta dan data bahwa kekayaan kita sudah diambil berapa puluh tahun tidak tinggal di kita lagi".

Sedang kemungkinan *kedua,* Prabowo tidak dapat memahami makna kata jamak yang digunakan sebagaimana mestinya di sebagai kata baku di Indonesia. Hal itu mungkin karena sejak kecil dia lama berdomisili di luar negeri, sehingga tidak begitu paham makna bahasa adalah identitas bangsa.

Namun, sebagai komunikator, dia cukup dapat memahami psikologi massa. Meskipun orasi politik dalam model komunikasi disebut sebagai komunikasi satu arah, yakni hanya komunikator yang berbicara dan khalayak sebagai komunikan (penerima pesan atau pendengar). Dia dapat menciptakan suasana dinamis dan terkesan monolog. Hal itu terjadi karena komunikator sesekali melontarkan sebuah pertanyaan kepada khalayak komunikannya,

sehingga merasa diajak berbicara dan tidak diciptakan kesan hanya sebatas pendengar.

"Apakah kalian punya uang untuk beli koran?" ucap Prabowo melemparkan pertanyaan kepada khalayak. Secara serentak massa pun langsung menjawab, "Tidak!" Mendengar jawaban itu, dia pun langsung menyambung, "Beli koran saja *nggak* mampu; katanya kemiskinan sudah turun."[6]

Sebagai seorang komunikator, saat melakukan kampanye politik di lapangan, gaya komunikasi Prabowo juga dapat disebut sebagai gaya komunikasi konteks rendah. Gaya bicaranya terbuka dan menyerang lawan.

Hal itu tentu karena dia memiliki latar-belakang pendidikan barat dan lama tinggal di luar negeri. Gaya bicara seperti itu memang sengaja digunakan untuk membangun citra dirinya, menyakinkan massa dengan cara menyerang lawan politiknya.

4.2. Gaya *Talkshow* Media

Ada dua bagian untuk membedah gaya bicara Prabowo yang dibingkai dalam kemasan wawancara. *Pertama,* saat dia sedang diwawancara oleh seorang *anchor* perempuan yang dia panggil dengan sebutan Mbak Irma[7]. Rekaman hasil wawancara dalam bentuk video ini disebar melalui http://www.youtube.com. Mungkin sebagai sebuah strategi kampanye politiknya. *Kedua,* melalui hasil wawancara Peter F. Gontha[8] dalam program *Impact* di Q Channel (Q TV). Rekaman gambar wawancara berbetuk audio visual antara Peter F. Gontha ini juga didapat dari http://www.youtube.com.

Tanpa bermaksud membandingkan-bandingkan, namun hal tersebut penting untuk dijelaskan terlebih dulu dalam pembahasan di sub bagian bab ini. Pasalnya, kualitas visual yang berbeda tentu akan mempengaruhi penglihatan bahasa nonverbal yang tampak, seperti kerutan kulit di dahi, mimik wajah, dan lain-lain. Bahkan, bisa jadi suasana, tempat dan presenter yang memandu berbeda juga dapat mempengaruhi ekspresi narasumber.

Dari segi kualitas visual dan isi materi dua hasil wawancara tersebut tentu memiliki perbedaan. Baik dari segi visual maupun isi materi. Hasil wawancara yang dipandu Peter F. Gontha tampak lebih profesional jika dibanding dengan saat Prabowo diwawancarai Irma. Hal tersebut bukan karena soal kualitas kameranya, tetapi lebih kepada faktor keterampilan (*skill*) yang berbeda. Sepintas gambar keduanya tampaknya sudah sama-sama diambil dengan standard kamera yang cukup untuk *broadcasting*.

Dari sisi kepentingan, dapat dipastikan kedua *anchor* memiliki kepentingan yang berbeda. Terlepas apa pun kepentingan keduanya, dari segi teknis dan kemampuan dapat dipastikan menghasilkan kemasan berbeda.

Sebagai seorang pengusaha yang sudah cukup matang dalam dunia industri media, tujuan utama Peter F. Gontha menampilkan Prabowo dalam program acara televisinya, bukan sebagai seorang calon presiden, melainkan sosok Prabowo sebagai Ketua Umum DPN HKTI. Sementara gambar rekaman wawancara Irma dengan Prabowo sebagai calon Presiden. Sehingga dapat dipastikan gambar video yang disebarkan melalui situs internet memang murni untuk tujuan dan kampanye politik narasumber. Namun, sayang, kemasannya seperti standard televisi lokal dan tampak "kurang profesional".

Di bagian bawah layar tidak ada identitas atau tulisan apa pun yang menunjukan bahwa ini sebuah hasil wawancara dari stasiun televisi tertentu. Kecuali sesekali muncul tulisan yang berbunyi, "Prabowo Subianto" di samping logo Partai Geridra dan bagian *closing*. Hal itu menunjukan video tersebut memang dibuat oleh tim sukses Partai Gerindra dan digunakan untuk kepentingan kampanye partai.

Terlepas dari siapa yang merekam dan bagaimana kualitasnya, mengarahkan narasumber telebih dahulu sebelum pengambilan gambar, tentu sudah biasa dilakukan para praktisi di dunia *broadcasting*. Apalagi ini bukan sebuah wawancara *doorstep interview* atau wawancara yang bersifat pencegatan narasumber di depan

pintu secara spontan. Sehingga ekspresi wajah narasumber saat diwawancara dalam studio tentu beda dengan hasil wawancara lapangan dengan menggunakan teknik *doorstep interview.* Namun, apa pun hasil wawancara itu, semua tetap mengandung unsur pesan. Ekspresi penekanan suara, mimik wajah, dan gerakan tubuh atau anggota badan tertentu, semua tetap akan mengiringi dan menjadi satu ketika komunikator berbicara, memaparkan pesan.

4.2.1. Gaya Dalam Bingkai Kamera Propaganda Politik

Saat berada di lapangan, gaya bicara Prabowo tampak begitu garang. Suaranya lantang, "meraung-raung" dengan ekspresi wajah menegang dan "beringas" bagaikan banteng *ketaton* (terluka). Sekali-kali dia menunjuk-nunjukkan tangannya ke depan, seperti ingin menerkam mangsanya. Begitulah gaya orasi pensiunan jenderal bintang tiga itu berada di lapangan. Untuk membangkitkan emosi dan semangat massa, Prabowo Subianto selalu mengatakan, "Mari kita bangun. Kita getarkan bangsa Indonesia".

Sebagaimana sebuah bahasa adalah identitas bangsa. Ekspresi wajah dan suara pada saat berbicara, tentu mencerminkan karakteristik pribadi orang yang berbicara. Saat orasi, gaya bicara Prabowo Subaianto lantang dan terbuka.

Gaya bicara Prabowo Subianto pada saat orasi di panggung kampanye, sebenarnya tidak ada perbedaan yang mencolok dengan saat berbicara di depan lensa kamera. Baik saat berbicara di depan lensa kamera "*setting* propaganda politik" maupun bingkai lensa kamera untuk kepentingan pelayanan "*public sphere*".

Gaya bicaranya tetap keras dan terbuka, rupanya telah menjadi strategi teknik untuk membangun citra dirinya dengan cara bicara menyerang lawan dan pemerintah. Hal ini wajar dilakukan. Apalagi Prabowo memang belum berada di dalam struktur pemerintah dan sedang berusaha mencari dukungan simpati massa. Semua elite politik pasti akan

berbicara lantang. Namun, kalau sudah berhasil merebut kekuasaan, semua tetap akan jadi "*uler kambang*" (istilah Bung Karno). Memakan daun hingga batang yang masih dapat dimakan untuk perutnya sendiri.

Meskipun gaya bicaranya sama-sama lugas, keras, dan terbuka; namun ada sedikit yang membedakan pada saat Prabowo orasi di hadapan massa dengan di depan lensa kamera "*setting* propaganda politik". Di depan lensa kamera, gaya bicaranya selalu menggunakan kata "e..." dihampir setiap jeda vokalnya. Contoh, perhatikan kutipan di bawah ini pada saat Prabowo ditanya mengenai alasan terjun ke politik:

> "Ya, terimakasih Mba Irma, jadi e'.. saya masuk ke.. politik karena... *keterpanggilan.* Karena kondisi bangsa, saya melihat adalah sangat e'..e'..e'.. *buruk.* Kita mengalami kondisi yang sebetulnya *tidak perlu kita alami.* Keadaan bangsa kita se.. *sebetulnya* adalah akibat dari sistem yang salah, ya. sistem ekonomi yang kita anut selama ini, e..e..ternyata setelah 44 tahun kira-kira yah..dari tahun 66 kira-kira, sampai kita mulai pembangunan ekonomi di bawah Orde Baru katakanlah....mulai tahun 71 ya.. jadi ya sampai tahun 2009 katakanlah. Berapa itu? Tiga puluuuuh...tiga puluh delapan tahun. Tiga puluh delapan tahunlah, e...e... ternyata sistem itu hanya membawa *kemakmuran pada segelintir orang*"[9].

Prabowo, bisa jadi, tidak sadar ketika mengucapkan kata "e..." di hampir setiap jeda kalimat pada saat bicara. Jeda se-per sekian detik dengan cara berhenti dan mengatakan "e..." ini menunjukan ada sedikit jeda pula di dalam otaknya saat bicara. Kalau tidak boleh dikatakan ada "*blank*" sejenak di otaknya.

Namun, hal itu bukan karena faktor komunikator tidak menguasai permasalahan atau sedikit "gagap"; melainkan lebih karena faktor dia ingin memberikan jawaban secara diplomatis pada saat ditanya mengenai alasan terjun ke politik. Pasalnya, dia ingin menjawab secara diplomatis, maka dia harus berpikir ekstra untuk menyusun kalimat sebelum diucapkan. Inilah yang menyebabkan dia menjadi sering mengatakan "e...." di setiap jeda kalimatnya pada saat berbicara.

Dari segi makna, Prabowo ingin menunjukkan dirinya bukan tipe orang yang ambisi untuk merebut kekuasaan (jabatan presiden). Prabowo ingin membangun citra bahwa terjun ke dunia politik adalah sebuah "keterpanggilan" jiwa patriotismenya. Merasa "terpanggil" sebagai anak bangsa untuk membenahi keadaan bangsa yang dia anggap ada yang perlu dibenahi. Melalui sebuah kata "keterpanggilan" dalam frase kalimat, "Saya masuk ke politik karena *keterpanggilan*. Karena kondisi bangsa, saya melihat adalah sangat buruk". Sengaja dia gunakan untuk menutupi kesan "ambisi" dirinya.

Banyak menggunakan kata "e...." bagi orang awan yang tidak memiliki kepentingan politik, mungkin tidak begitu berpengaruh. Namun, bagi seorang komunikator politik yang sedang punya obsesi menjadi presiden, tentu bisa berakibat fatal jika hal itu sering dilakukan. *Pertama*, bisa memengaruhi kesan negatif dari publik. *Kedua*, jika hal itu dilakukan dalam rangka sebuah program acara semacam dialog khusus di televisi, penonton dapat merasa jenuh dam memindah *channel*.

Secara visual, wawancara khusus tersebut sebenarnya ingin menunjukkan suasana santai. Tampak seperti berada di sebuah ruangan rumah pribadi Prabowo, dan *anchor* masing-masing duduk di kursi kayu berbentuk oval dan saling berhadap-hadapan. Saat menjawab pertanyaan alasan terjun ke politik, Prabowo juga berusaha menunjukkan kesan santai. Badannya disandarkan ke kursi. Kedua tangannya masing-masing memegang sisi kanan-kiri kursi.

Namun, tampaknya tim sukses Prabowo yang terlibat dalam proses pengambilan gambar tersebut kurang memerhatikan *back ground* (latar-belakang) garis palang yang persis berada di belakang

kepala Prabowo. Dampaknya, gambar narasumber menjadi tampak kaku dan "tersalip" seperti Yesus.

Bisa jadi faktor inilah yang membuat Prabowo menjadi seperti tegang dan tidak lancar dalam berbicara. Sehingga beberapa kali *anckor* mengarahkan dengan simbol-simbol tertentu ketika narasumber tampak lupa dengan jawaban yang sebenarnya telah disiapkan sebelumnya. Misal, ketika Prabowo hendak mengatakan, "Ini kan...berarti artinya apa, kita sebagai bangsa *jatuh miskin lima kali. Jatuh miskin lima kali".*[10]

Sebelum Prabowo mengatakan, "Jatuh miskin lima kali", tiba-tiba *anckor* mengangkat tangannya ke atas setinggi wajahnya dan mebuka telapak tangannya untuk mengingatkan narasumber. Ini menunjukan bahwa presenter memang sudah tahu jawabanya. Dari sinilah sebuah kesimpulan dapat ditarik, bahwa video tersebut memang dibingkai "kamera propaganda politik" kepentingan narasumber untuk kampanye politik.

Jika hasil rekaman gambar wawancara tersebut disiarakan di sebuah stasiun televisi, dapat dipastikan media massa televisi tersebut tentu media massa partisan. Bukan media massa untuk melayani kepentingan publik. Padahal, televisi adalah sebuah media yang menggunakan frekuensi milik publik dan dapat memasuki rumah-rumah pribadi tanpa "permisi". Sehingga meskipun media massa televisi yang padat modal ini kini sudah menjadi lembaga bisnis, namun tetap harus menjaga netralitas sebuah acara. Hal itu mutlak diperhatikan, jika usaha penyiarannya tidak ingin ditinggalkan oleh publik sebagai konsumennya.

Idealnya, apabila *anckor* adalah seorang jurnalis atau presenter dari sebuah stasiun televisi yang profesional. Jangankan mengarahkan jawaban narasumber, seorang *anckor* tentu tidak diperbolehkan melakukan gerakan-gerakan badan yang dapat menunjukan kesan menyetujui jawaban narasumber. Saat melakukan gerakan tersebut, bisa jadi pewawancara tidak sadar, spontan, dan reflek. Namun, dari bahasa *non*-verbal itulah kesan negatif pun akhirnya muncul dari publik yang melihatnya.

Masih mending jika kesan negatif hanya ditunjukan kepada pemandu acaranya saja. Secara politik kredibilitas narasumber menjadi rusak di mata publik, gara-gara *anchor* yang kurang profesional ini. Publik dapat memberikan penilaian bahwa narasumber "tidak dapat menjawab" atau "lupa dengan jawabannya" sehingga presenter selalu mengingatkan jawaban kepada narasumber dengan menggunakan bahasa *non-verbal* sebagai isarat.

Selain memberikan bahasa isyarat *non*-verbal seperti gerakan tangan tersebut, presenter yang dipanggil Mba Irma oleh Prabowo selama melaukan proses wawancara bahkan tak jarang malah mengucapkan kata atau kalimat verbal untuk mengingatkan dan memberi dukungan jawaban narasumber. Sehingga dapat dipastikan wawancara itu memang tidak dilakukan oleh tim yang profesional di bidangnya; sebagaimana acara *talkshow* di media massa yang mengutamakan kepentingan *public sphere*. Padahal, peristiwa tersebut adalah wawancara yang direkam dan digunakan untuk kepentingan propaganda politik pembangunan citra positif narasumber.

Terlepas dari masalah tersebut, selama diwawancarai di depan "kamera propaganda politik", Prabowo berusaha membangun citra dirinya dengan gaya bicara pemaparan penalaran teknis *(technical reasoning)*. Konkretnya, sebuah teknik pemaparan *content* pesan dengan menggunakan kerangka pemikiran yang dapat mengurangi partisipasi orang banyak dalam diskusi publik. Tujuannya, agar terkesan ilmiah, logis, dan masuk akal. Sesekali dia juga menyelipkan kalimat bahasa Inggris.

Penggunaan kalimat dan bahasa-bahasa yang tidak merakyat itu, sebenarnya dapat menghalangi partisipasi orang banyak dalam diskusi publik. Bahkan, menyingkirkan individu atau kelompok yang tidak mampu memahami dan mengerti bahasa asing tersebut, sehingga tidak bisa ikut berpartisipasi. Namun, itulah gaya komunikasi Prabowo yang memang lama tinggal di luar negeri.

Selain sering menggunakan bahasa asing yang tidak merakyat, saat berbicara di depan kamera "propaganda politik" yang dibingkai layaknya sebuah wawancara khusus program acara televisi, dia

bergaya bicara *technical reasoning*. Tampak dia memang ingin mengajak khalayak berpikir logis dan matematis melalui data dan angka. Teknik itu tentu sengaja digunakan untuk memperkuat argumentasinya dan mengurangi jumlah pengkritik dari apa yang telah dipaparkannya.

> "Mbak Irma saya kira sudah beberapa kali saya perlihatkan. Bahwa kita, ini angka dari 97 sampai 2008. Tapi kita sudah kumpulkan angka dari tahun delapan puluh. Bahkan dari tahun enam puluhan. Bahwa tiap tahun bangsa Indonesia, mengalami keuntungan sebagai bangsa. Surplus. Surplus ekspor. Itu rata-rata 25 koma 5 miliar dolar. Dua ratus lima puluh lima triliun per tahun. Rata-rata, artinya kalau dijumlahkan dari 97 sampai 2008. Kalau dijumlahkan 12 tahun seharusnya devisa kita hari ini berada di kisaran 300 miliar dolar. Tiga ribu triliun. Inilah kekayaan kita selama sekitar 12 tahun. Inilah keuntungan"[11].

Data statistik itu ditunjukan Prabowo yang sudah disiapkan dalam bentuk lembaran kertas. *"Saya bawa di sini, mungkin kamera bisa melihat"* tegasnya meminta *cameraman* melakukan *zoom* data statistik yang telah disiapkan dalam bentuk lembaran kertas. Secara ilmiah, penunjukan data statistik itu memang penting dilakukan untuk merasionalisasikan argumentasinya. Namun, bagi masyarakat yang memiliki latar-belakang pendidikan rendah, paparan secara lengkap dan detil seperti itu bisa saja hanya sekadar angin lalu. Apalagi bagi sebagian besar kelompok masyarakat yang malas berpikir berat-berat. Namun, dari sisi retorika ilmiah, penggunaan data statistik semacam itu dapat digunakan sebagai strategi komunikator agar tidak dinilai sekadar *omong klobot.*

Secara psikologis, saat memaparkan data statistik tampak ada perubahan dalam diri Prabowo. Dari tekanan suaranya, dia sangat percaya diri dengan apa yang dipaparkannya adalah benar. Sehingga bicaranya pun menjadi lancar dan tidak lagi ada kata "e.....". Ini menunjukan bahwa Prabowo sudah dapat beradaptasi dengan kamera.

Alat bantu seperti itu (data statistik di lembaran kertas) memang dapat digunakan mengurangi rasa gugup komunikator. Alat bantu juga dapat digunakan sebagai taktik untuk mengalihakan perhatian khalayak yang tadinya fokus kepada pembicara, menjadi berpindah ke alat bantu. Sehingga dapat mengurangi rasa gugup pembicara yang mungkin belum terbiasa berbicara di depan publik.

Dari sisi visual, penampilan gambar lain seperti itu juga dapat dilakukan agar penonton tidak merasa jenuh, karena melihat gambar orang berbicara dalam waktu yang cukup lama. Sehingga perlu ditampilkan gambar-gambar lain agar tidak terkesan monoton.

Selama berada dalam wawancara tersebut, Prabowo memeng lebih cenderung memaparkan data dan angka untuk melahirkan kesan positif intelektualnya. Berbeda pada saat berbicara dan orasi di depan massa yang cenderung hanya sekedar mengucapkan kata-kata slogan dan jargon politik.

> "Bappenas sekarang, menganut sistem neo-liberal. Mereka mengatakan untuk mencapai satu persen dibutuhkan lima miliar dolar investasi. 50 triliun kira-kiralah sekarang kursnya.
>
> Oke, katakanlah lima miliar dolar satu persen pertumbuhan. Dengan satu persen pertumbuhan menurut mereka, itu akan menghasilkan lapangan kerja empatratus ribu. Itu paradigma mereka. Mashab mereka. Tetapi kalau dengan ekonomi kerakyatan, dengan

lima miliar dolar minimal bisa menghasilkan dua juta hektar lahan pertanian.

Satu hektar lahan pertanian bisa menyerap enam orang pekerja. Dua juta hektar bisa menghasilkan duabelas juta lapangan kerja. Kalau lebih efisien, lima miliar dolar ini bisa dua setengah juta hektar. Kalau dua setengah juta hektar lapangan kerjanya bisa limabelas juta orang kerja. Kita bisa bandingkan empatratus ribu dengan duabelas juta itu berapa itu ? Tigapuluh kali kali lipat. Itu berarti tiga ribu persen."[12].

Secara umum, tema yang diangkat dalam wawancara berdurasi sekitar 45 menit itu tidak jauh dengan tema-tema kampanye yang telah dibahasa pada bab sebelumnya dalam buku ini. Gaya bicara Prabowo juga ekspresif, lugas, dan terbuka. Meskipun terkadang ada makna implisit yang sengaja dilakukan pada saat memberikan sebuah jawaban yang bersifat diplomatis. Pasalnya, pada konteks ini dia memang sedang berperan sebagai aktor politik.

Jawaban diplomatis itu juga tampak ketika si penaya di dalam gambar video menanyakan masalah konsep peran pemberdayaan perempuan (gender). Secara implisit, Prabowo tampak berusaha untuk tidak mengupas secara lebih dalam mengenai rencana konsep dalam masalah pemberdayaan perempuan, jika dirinya terpilih menjadi presiden. Namun, dia tak ingin dianggap tidak memiliki konsep yang lebih progresif terkait masalah gender. Sehingga dia pun hanya menjawab pertanyaan itu dengan sebuah contoh:

" Kita lihat sekarang di dunia ini. Sudah banyak tokoh-tokoh perempuan di dunia yang menjadi pemimpin negara, pemimpin pemerintahan, pemimpin ekonomi, *chief eksekutif*, wartawan terkenal dan juga kita lihat pengalaman kita sendiri, dan kita akui pemerintah SBY sekarang.

> Menteri keuangan perempuan. Kemudian menteri perdagangan perempuan. Itu kan fotofoli-fotofoli yang sangat kunci dan penting. Terlepas setuju atau tidak setuju dengan kebijakannya. Tapi ini membuktikan bahwa di negara kita pun perempuan ini sudah memainkan peran, kita pernah punya presiden perempuan, kita punya gubernur sekarang perempuan, kita punya wagub. Wakil gubernur Jawa Tengah, perempuan yang sukses. Jawa Timur hampir punya gubernur perempaun ya dan sebagainya"[13].

Dari kutipan jawaban tersebut, Prabowo hanya sekadar memandang masalah gender dari sudut pandang kesetaraan jabatan semata. Dengan kata lain, dia hanya ingin mengatakan bahwa saat ini sudah tidak ada persoalkan dalam masalah gender, karena sudah banyak kaum perempuan yang sudah menduduki jabatan strategis. Namun, berbicara masalah gender, apakah cukup hanya berhenti sampai di situ ? Tentu tidak.

Inilah gaya bicara Prabowo dalam bingkai *setting* layaknya sebuah wawancara khusus di sebuah program acara televisi. Terlepas apa pun di balik kepentingannya, gaya bicaranya tetap dapat dimaknai sebagai gaya budaya komunikasi tingkat-rendah. Terbuka, langsung, dan tegas layaknya gaya budaya komunikasi orang Amerika. Berbeda dengan gaya budaya komunikasi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih suka bermain dengan pantun ketika menyerang balik lawan politiknya. Misal, ketika Megawati Soekarnoputri mengkritik kebijakan pemerintah SBY-JK ibarat seperti permainan "Yoyo"[14]. Namun, SBY membalasnya dengan pantun.

Pantun atau *parikan* dalam istilah bahasa Jawa, merupakan gaya budaya komunikasi tingkat-tinggi. Isi pesan pantun bisa berupa nasihat, petuah, kritik, dan sindiran. Namun, disampaian secara halus, implisit, dan kasat mata. Tujuannya agar tidak menyinggung

perasaan orang yang dikritik. Inilah gaya budaya komunikasi konteks-tinggi yang memang lebih suka berbasa-basi, tidak terus terang, dan tertutup.

Sebagai mantan anak mantu yang "diemaskan" oleh mantan Presiden Soeharto, gaya bicara Prabowo juga berbeda dengan Soeharto. Gaya bicara Soeharto implisit, halus, dan samar. Lawan bicaranya dibiarkan menerjemahkan sendiri apa yang telah diucapkannya. Namun, jika lawan bicaranya dianggap salah di dalam menafsirkan kata-katanya, atau tidak sesuai dengan apa yang ada dipikirannya, samar tapi pasti tak segan-segan Soeharto pun akan menghukumnya. Inilah gaya budaya komunikasi konteks-tinggi, Soeharto.

4.2.2. Gaya Bicara Petani Meski Bukan Petani

Lain ladang lain belang, lain lubuk lain ikannya. Meskipun sama-sama berbicara di depan kamera, lain tempat lain pula kemasannya. Saat berbicara dalam bingkai *setting* di depan kamera "propaganda politik" yang telah dibahas sebelumnya, ekpresi Prabowo yang temperamental memang tidak begitu kentara.

Namun, karakteristiknya yang selama ini dikenal keras dan temperamental, terlihat muncul pada saat diwawancara oleh Peter F Gontha[15] di sebuah program tv kabel.

Berkali-kali bibirnya ditempelkan sambil ditarik kebelakang, saat sedang berhenti bicara. Dahinya mengerut, rahangnya tampak mengeras, dan tangan mengepal, menunjukan dia memiliki karater yang keras dan temperamental. Bahkan, pada saat bicara, tak jarang tangan kanannya mengepal dan dipukul-pukulkan ke telapak tangan kirinya yang dibuka. Semua itu tentu mencerminkan makna pesan yang ada dalam jiwanya.

Setidaknya, hal itu juga sempat ditanyakan presenter, "Saya melihat Prabowo Subianto seorang yang sangat emosional. Emosional?" Mendapat pertanyaan itu, Prabowo

pun langsung balik bertanya, "Pengertian emosional gimana ?" sambil menyondongkan badannya sedikit ke depan, tangan kanan dibuka menyamping memegang bibir meja. Kemudian tangan kirinya digerakkan ke depan dengan cepat. "Marah! *Do you emotional*?", jelas presenter tenang. Secara diplomatis Prabowo menjawab:

> "Waktu katakanlah saya sebagai komandan pasukan tempur ya saya kira memang saya akui saya cepat marah, tapi saya juga cepet hilang hilang marah saya. Karena, saya pernah dikata, ee..... ditanya oleh para wartawan. Pak gimana bapak dikenal orang yang keras, kejam, dan sebagainya. Saya pakai analogi begini. Saudara-saudara, saya karya saya itu di pasukan tempur. Hampir selamanya di pasukan tempur. Pasukan tempur itu adalah ibarat harimau. Iya kan? Yang saya harus gembleng, saya didik, saya besarkan itu harimau-harimau.
>
> Memimpin prajurit kalau hanya marah-marah saja mereka tidak akan ikut. Prajurit itu punya senjata. Kalau mereka benci komandanya, mereka tidak akan lama menjadi komandan. Jadi **jangan mengira demokrasi tidak ada di tentara**. Demokrasi di tentara itu lebih...lebih cepat karena setiap prajurit itu punya senjata. Sering di setiap tentara di mana pun **kalau komandan itu dibenci, dia ditembak anak buahnya**. Iya to...jadi di pasukan tempur *is not easy*, tidak gampang memimpin."[16]

Bisa jadi jawaban itu adalah benar. Namun, jawaban itu bisa bermakna apologi pembenar. *Statemen* semacam itu sudah sering dilontarkan oleh para jenderal di negeri ini, sebagai pembenar untuk membangun *image* positif di kalangan militer yang selama ini diidentikkan dengan kekerasan. Tidak ada demokrasi kecuali sekadar menjalankan perintah komandan.

Perhatikan kalimat yang dicetak tebal. Secara implisit juga dapat bermakna bahwa demokrasi adalah sesuatu yang menakutkan. Pasalnya, jika ada ketidakcocokan, perselisihan, dan perbedaan pendapat, ternyata tidak dinamai sebagai sebuah dinamika kelompok; melainkan rasa suka dan tidak suka yang dapat melahirkan rasa benci, sehingga "senjata yang akan bicara" untuk menyelesaikan peselisihan yang ada dalam dinamika kelompok itu.

Dengan kata lain, konsep wacana musyawarah untuk mufakat di dalam militer tentu menjadi tidak ada. Pasalnya, dalam proses musyawarah untuk menuju mufakat pasti terdapat perselisihan dan beda pendapat. Namun, dalam konsep demokrasi tentara, perselisihan bisa dipercepat dengan senjata untuk menuju kata mufakat.

Prabowo memang tidak bicara demokrasi dalam konsep masyarakat sipil. Namun, pada era pemerintahan otoriter Orde Baru, konsep demokrasi *ala* militer semacam itu juga pernah diterapkan dalam kehidupan masyarakat sipil. Mereka yang berani mengkritik dapat dimaknai tidak suka terhadap pemerintah atau membenci penguasa, sehingga dibenarkan untuk segera "diselesaikan melalui senjata". Entah dengan cara terang-terangan maupun secara diam-diam akan disingkirkan dan dimusnahkan dari kehidupan.

Dalam konteks ini, secara tersirat dan implisit, kalimat "*Demokrasi di tentara itu lebih...lebih cepat karena setiap prajurit itu punya senjata.*" Kemudian ditutup dengan frase "*Di pasukan tempur is not easy, tidak gampang memimpin*" itu sebenarnya Prabowo hanya ingin membangun citra bahwa dirinya telah berhasil dan mampu memimpin sesuatu yang sulit. Sehingga tidak ada alasan bahwa dirinya tidak bisa memimpin petani atau negeri ini.

Selain menggunakan bahasa *non*-verbal yang ekspresif, Prabowo juga gemar menggunakan bahasa *puffery* (pengasaran). Bahasa ini sengaja diproduksi untuk kontruksi wacana kepada publik agar menilai dirinya baik. *Puffery* adalah sebuah kebalikan dari bahasa *eufemisme*. Kata *eufemisme* adalah bahasa penghalusan makna dan pengertian. Sedangkan *puffery* pengasaran dari suatu makna dan pengertian. Kedua jenis bahasa itu biasanya sengaja digunakan oleh para elite politik untuk membangun citra dirinya sesuai dengan kepentingannya.

Prabowo sering mengatakan, "Kita adalah bangsa yang besar, kekayaan alam melimpah. Namun, karena sistem ekonomi yang salah, maka kita mengalami kondisi yang sebetulnya tidak perlu kita alami. Rakyat menjadi miskin. Kemakmuran hanya ada pada segelintir orang." Dengan kata lain, rakyat yang masih merasa hidupnya miskin dan ingin berubah, harus bergabung dengan partainya.

Menurut Eriyanto (2000: 185), bahasa *puffery* adalah semacam candu. Memberikan mimpi-mimpi, harapan, dan janji-janji dengan memunculkan kata-kata yang memberikan kebanggaan kepada khalayak. Penggunaan bahasa semacam ini selalu digunakan oleh Prabowo untuk menghegemoni kesadaran semu rakyat.

> Waktu tahun 45, TNI logistiknya adalah rakyat. Karena TNI itu tentara rakyat. Makanya kenapa pemimpin-pemimpin tentara Indonesia itu selalu merasa deket dengan petani. Karena kita tahu bahwa TNI berasal dari petani. *Kita dibesarkan oleh petani. Kita di beri makan oleh petani. TNI adalah tentara petani.*
>
> Saya pernah komandan kompi, apel kompi, anak buah saya seratus. Saya suruh angkat tangan siapa yang orang tuanya petani? Sembilan puluh lima orang angkat tangan. Sisanya pedagang kecil, ada yang sopir, dan itu kenyataan.

> Ya.. Jadi utang budi kita kepada petani sangat besar. Kita tahu pengorabanan petani untuk republik ini. Saya kira tidak perlu kaget *kenapa saya merasa terpanggil*, saya anggap ini bagian daripada nasionalisme. Kalau saya pemimpin organisasi tani. *Saya membela kepentingan petani itu adalah kehormatan bagi saya.* Apalagi saya *membela mayoritas rakyat Indonesia yang tertingal, yang tidak menikmati kemerdekaan* yang seharusnya dinikmati[17]

Semua kalimat yang dicetak miring tersebut, menggunakan gaya bahasa *puffery* sebagai retorika untuk memaparkan realitas bahwa TNI adalah tentara rakyat. Konstruksi wacana semacam ini sebenarnya sudah ditanamkan sejak zaman Orde Baru. Secara politik, konstruksi wacana ini digunakan oleh Orde Baru agar rakyat merasa memiliki TNI yang digunakan sebagai kekuatan pendukung untuk melanggengkan kekuasaannya.

Melalui bahasa tersebut, rupanya Prabowo juga berusaha melanggengkan kontruksi wacana Orde Baru (Soeharto) yang menanamkan bahwa "TNI manunggal bersama rakyat"; karena, "TNI adalah bagian dari rakyat"; atau bahkan dapat juga bermakna "TNI itu sama dengan rakyat", maka tidak ada alasan bagi rakyat untuk melawan dan melarang TNI menjadi pemimpin rakyat. Dengan demikian, melawan TNI berarti sama halnya melawan rakyat.

Melalui pemahaman semacam itu, pensiunan jenderal TNI bintang tiga ini berusaha mengkonstruksi wacana kepada masyarakat, bahwa dirinya merasa memiliki utang dan tanggungjawab sosial kepada rakyat yang mayoritas petani. Pemilihan kalimat "Kita dibesarkan oleh petani. Kita di beri makan oleh petani. TNI adalah tentara petani", selain digunakan untuk menghegemoni kesadaran politik rakyat juga digunakan agar rakyat memiliki rasa bangga dan ikut memiliki TNI.

> "Dari awal kita sadar, *kita sadar benar bahwa TNI dibesarkan dari rakyat.* Itu juga filosofi TNI. Itu juga doktrin kita bahwa kita tentara rakyat. Waktu proklamasi 17 Agustus 1945 kan tidak ada APBN. *Kita ini bukan negara-negara seperti India atau Malaysia* yang kemerdekaannya diserahkan penjajah di mana sudah ada tentara, sudah ada anggaran, sudah ada gaji. Kita tidak, kita kan tentara sukarela"[18].

Rasa patriotismenya sebagai tentara rakyat, diperkuat dengan contoh historis asal-usul lahirnya tentara di Indonesia. Kemudian dibandingkan dengan tentara di luar negeri. Hal ini sengaja dia lakukan agar rakyat semakin kuat menerima dirinya sebagai mantan tentara yang sekaligus pembela petani. Rasa kedekatanya dengan petani inilah yang menjadi pembenar mengapa dirinya ingin berjuang untuk petani.

Namun, Prabowo tidak pernah menyinggung sedikit pun masalah seringnya terjadi konflik masalah tanah antara rakyat dengan TNI. Padahal, sejak reformasi 1998, sengketa tanah antara TNI dan petani sering terjadi di berbagai daerah. Misal, konflik tanah antara TNI AL dengan warga desa Alas Tlogo di Pasuruhan, Jawa Timur, tahun 2007, yang memakan beberapa korban jiwa; atau konflik-konflik serupa yang banyak terjadi, semua seakan terlupakan sebagai sebuah potret realitas yang ada.

Padahal, sumber konflik itu sebenarnya dari masalah tanah. Bagi petani tanah adalah sumber kehidupan dan pangan. Tanpa tanah, mereka tidak bisa memproduksi pangan; dan tentu tidak lagi layak berpredikat petani, kecuali hanya sekadar buruh tani. Berkali-kali Prabowo menyinggung masalah pangan dan petani. Namun, tidak pernah menyinggung masalah *landreform* atau reformasi agraria.

Pangan, memang bukan sekadar masalah ekonomi melainkan sudah hal yang pokok dan fundamental dalam kehidupan. Namun, agar pesan yang disampaikan semakin memiliki efek lebih dahsyat. Bahasa *puffery* pun digunakan oleh Prabowo Subianto dalam memaparkan masalah pangan.

> "Kita memandang pangan itu masalah strategis, masalah hidup matinya suatu bangsa, masalah *national security* dan ini diakui oleh pemimpin-pemimpin dunia. George Bush mengatakan *"food is national security"*. Tanpa makan, semua kehidupan bangsa berhenti."[19]

Padahal, solusi yang ditawarkannya untuk mengatasi masalah pangan, sebenarnya hampir tidak ada yang baru. Dia hanya ingin mengajak masyarakat kembali mengenang pada masa-masa Soehato masih berkuasa. Menghidupkan kembali koperasi-koperasi petani, membangun penggilingan padi, dan gudang distribusi semacam KUD.

> "Saya kira ini masalah fundamental, masalahnya adalah karena petani itu merupakan salah satu mata rantai dari suplai pangan itu sendiri. Jadi mereka di pihak produsen. *Nah*, pengolahan produk ini, kemudian distribusinya, penggudangannya, dan akhirnya penjualannya itu ada pihak-pihak lain, ya...golongan pedagang yang menjalankan ini. Sehingga kenaikan harga di pasar, di ujung pasar apalagi harga dunia itu tidak langsung dinikmati oleh para petani.
>
> Orde Baru di bawah Pak Harto itu tidak semuanya jelek, yang diakui dunia salah satu keberhasilan dari pemerintahan Pak Harto adalah pengelolaan dan pembangunan di sektor pertanian. *Iya to*....di mana peran koperasi, KUD-KUD, peran bulog *ya to*. Peran pemerintah, program-program pemerintah, yang oke...mungkin dianggap *top down* atau *command economy* itulah pemikiran kita di HKTI, bahwa khusus untuk pangan karena pangan ini menurut pandangan kami, bukan semata-mata masalah ekonomi. Kita memandang ini lebih tinggi."[20]

Selain berusaha untuk mengkontruksikan wacana "keberhasilan" Orde Baru di dalam mengatasi pangan dan pertanian, Prabowo juga memandang masalah pertanian hanya sekadar persoalan distribusi. Sehingga hanya membutuhkan pengelolaan pasar distribusi hasil produksi petani.

Persoalan petani sekarang sebenarnya tidak hanya sekadar masalah proses produksi, dan distribusi hasil produksi pertanian. Namun juga persoalan tanah dan hak atas kepemilikan tanah. Diakui atau tidak, realitas yang ada sejak adanya perkembangan industri, baik industri yang bergerak di bidang pertambangan maupun agro industri pertanian, kini telah menghapuskan hak atas kepemilikan tanah. Para petani yang dulu bisa memproduksi hasil pertanian, atas nama pembangunan, pada zaman Orde Baru yang didukung militer, memaksa petani untuk menyerahkan tanahnya karena akan dibangun perusahaan, *real estate* dan sebagainya. Akibatnya, petani tidak bisa memproduksi pangan karena sudah tidak memiliki tanah.

Sekadar contoh, ribuan hektar lahan pertanian milik petani di Porong, Sidoarjo, kini musnah akibat perkembangan industri (PT Minarak Lapindo Jaya). Para petani yang dulu bisa memproduksi pangan, kini hanya bisa tinggal di tenda-tenda pengungsian.

Prabowo sendiri bersama adiknya Hashim Djojohadikusumo, juga menguasai lebih dari tiga juta hektar tanah dari Aceh sampai Papua dalam bentuk perkebunan kelapa sawit, teh, jagung, jarak, akasia, padi dan aren, serta ratusan ribu hektar hutan pinus. Belum termasuk ratusan ribu hektar tanah yang dikelola sebagai pertambangan di bawah Group Nusantara Energy yang telah di bahas di bab sebelumnya dalam buku ini. Penguasaan tanah itu tentu akan menghalangi hak atas kepemilikan tanah terhadap petani.

Jangankan untuk memproduksi pangan, untuk membeli sepetak sawah pun kini sudah jarang ada petani yang mampu. Bahkan, mereka yang dulu bisa mengolah lahan pertaniannya

sendiri, kini statusnya sedah berubah menjadi buruh tani. Lalu distribusi pangan seperti apa yang harus disalurkan melalui KUD, jika petani sudah tidak memproduksi pangan sendiri karena sudah tidak punya lahan? Prabowo tetap memiliki sebuah jawaban, "Saya kira itu, ke-*will*, keberpihakan. Keberpihakan gampang diucapkan sulit untuk dilaksanakan." Jawaban itu dia sampaikan saat diwawancara di program televisi tersebut dalam kapasitas sebagai Ketua Umum DPN HKTI. Untuk merasionalisasikan jawabanya, anak Profesor Sumitro ini menambahkan:

> "Kalau objektif, kalau saya! Saya lihat kunci Indonesia ini dua. Kita harus swasembada pangan dan itu kita bisa lakukan dengan cepat. Swasembada pangan bahkan kita bisa jadi *supplier* pangan dunia. *Iya to*...ee...mungkin tidak seperti Brazil. Tidak sebesar Brazil tapi mungkin rangking keempat, kelima bisa. Kita bisa *supplier* pangan itu sangat cepat. Saya kira dua tahun. Dua tahun maksimal.
>
> Yang kedua energi. *Nah*, energi butuh waktu yang lebih. Kalau menurut saya, tujuh-delapan tahun sampai kita swasembada energi. Kalau kita mau jadi eksporter energi kembali, saya kira itu butuh waktu sembilan tahun. Dan nanti swasembada energi akan kembali menurut kami. Menurut ahli-ahli juga dari pertanian, bio-bio energi, bio *fuel*. Itu dari sektor pertanian, sektor ijo lagi."[21]

4.3. *Visual Image* di Balik Makna Cerita

Dalam studi analisis wacana dikenal istilah *visual image*. Istilah itu digunakan sebagai strategi dalam retorika untuk menggambarkan *image*. Dalam teks, *visual image* dapat ditampilkan dengan penggambaran detail berbagai hal yang ingin ditonjolkan. Misal, tentang pentingnya peran atau kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Baik kelompok yang dimarginalkan dan diposisikan sebagai lawan atau pesaing, maupun pada saat menggambarkan kelompok yang menjadi idolanya. Semua akan digambarkan secara detil dan rinci sesuai dengan kepentingannya yang dianggap menguntungkan dirinya.

Cerita-cerita keburukan masa lalu dan cerita-cerita mengenai dirinya yang positif juga dapat dimaknai sebagai *visual image*. Dapat pula *visual image* ditampilkan melalui gaya bahasa *non*-verbal. Misal, sambil menangis pada saat bercerita mengenai kisah yang menyedihkan, suaranya parau dan datar untuk menunjukan kesan penghayatan yang mendalam. Namun, bisa juga dilakukan dengan ekspresi wajah yang tegas dan vokal yang lantang untuk membangkitkan emosi massa, mengepalkan tangan, mengerutkan dahi, dan lain-lain.

> Dua bersaudara PSD (Prabowo Subianto Djojohadikusumo) dan HSD (Hashim Sumitro Djojohadikusumo), hubungan dua sosok bersaudara yang tidak pernah lekang oleh zaman dan waktu,....! Komitmen bagi Bangsa dan Negaranya tidak pernah pudar oleh rintangan sekeras apapun,...! Tetap Tegak Merah Putih dan Menggemanya Indonesia Raya di atas Tanah Merdeka,...! Inilah cita-cita mereka..!! "DUA BERSAUDARA" (Dalam *wall*, 1 April 2009, pukul 10:03 AM)

Setelah media memberitakan mengenai asal-usul sumber dana untuk membiayai kampanye Partai Gerindra yang sangat fantastis, sebagian besar ternyata diambilkan dari hasil keuntungan bisnis mereka (PSD dan HSD). Sehingga publik menjadi tahu, bahwa sumber kekayaan mereka tak pernah lepas dari peran Soeharto pada saat masih berkuasa (lihat bab II buku ini). Namun, Prabowo tetap berusaha memunculkan *visual image* positif melalui teks pesan tersebut.

Selain bercerita tentang heroisme hubungan mereka berdua sebagai kakak-adik, Prabowo juga sering bercerita tentang keluarga besarnya yang heroik sebagai pejuang Angkatan 1945. Cerita-cerita ini, tentu digunakan untuk mengkonstruksi wacana ke publik bahwa dirinya memang dicipta dari keluarga pejuang. Dengan kata lain, dia ingin menunjukan kepada publik bahwa dirinya adalah seorang pejuang sejati.

> "Saya kira mungkin sudah dikenal ya bahwa, saya datang dari keluarga Profesor Sumitro Djoyohadikusumo. Kita keluarga yang biasa sebetulnya. Beliau seorang akademisi tapi juga seorang pejuang. Beliau dari Angkatan 45. Kemudian kelurga kita waktu itu bener-bener adalah keluarga republikan. Jadi suasana Republik Indonesia itu sangat kental di keluarga kita.
>
> Eee...orang tua beliau, Pak Margono Djohohadikusumo juga tokoh dalam pergerakan. Beliau tokoh juga dalam pergerakan koperasi. Jadi sudah menggeluti ekonomi kerakyatan dari sejak tahun 1920-an, tahun 1930-an. Jadi itu adalah gambaran keluarga saya.

Kemudian ee...suatu suasana yang kental di keluarga saya waktu itu, sejak saya kecil adalah karena kita keluarga republikan. Jadi pembicaraan di rumah sejak saya kecil itu selalu eee...bagaimana berkorban untuk tanah air.

Cerita-cerita perjuangan Pangeran Diponegoro, Jenderal Soedirman, itu jadi pembicaraan hampir tiap hari. Mungkin juga kita tahu kan adik pak Mitro dua-dua, dua-duanya, dua putra, eee....masuk tentara. Yang satu sudah perwira, yang satu masih kadet, masih taruna,.gugur pada hari yang sama dalam pertempuran di Lengkok, Tangerang. Dua-duanya gugur pada hari yang sama, Sugianto dan Suyono. Dan itu sangat traumatis eee...untuk Pak Margono, untuk eyang saya, untuk kakek saya. Jadi suasana inilah yang melatarbelakangi ee...kehidupan saya waktu kecil.

Tiap kali saya ke rumah eyang saya, kakek saya, beliau itu masih memelihara ruangan ee...kedua putra beliau. Ruangan persis sebelum mereka ee... gugur. Jadi tempat tidurnya, *feltbed* waktu itu, *feltbed* tentara dipelihara, dipertahankan. Ranselnya masih disimpan di rumah, helmnya masih disimpan, alat-alat militer mereka masih disimpan.

Bayangkan mereka gugur tahun 46 (tahun 1946) Saya lahir 51 (tahun 1951) mungkin kesadaran saya sebagai seorang anak, baru usia 3-4 tahun, tiap kali saya datang

ke rumah (kakek) selalu dibawa ke kamar itu. Ini ransel pamanmu, ini helm pamanmu, dari kecil itu, dan tiap tahun kita dibawa ke makam. Ini pamanmu yang gugur untuk republik. Dan itu latar-belakang keluarga kita. Jadi mungkin itu yang memengaruhi kenapa saya memiliki hasrat masuk tentara."[22]

Strategi retorika *visual image* semacam itu selalu digunakan untuk membangun cerita positif yang fantastis *(fantasy themes).* Melalui cerita *fantasy themes* ini, komunikator berharap khalayak yang suka mengidealkan jenis kehidupan tertentu bisa tertarik. Gaya bahasa dan kalimat yang digunakan, serta gaya penyampaiannya bisa dilakukan dengan cara yang dapat memukau khalayak. Sehingga ceritanya tidak sekadar menjadi buah bibir tetapi juga dapat menciptakan mimpi-mimpi khalayak.

Dalam *visual image* tersebut, khalayak hanya diposisikan untuk sekadar menerima gambaran umum, berangan-angan mengenai potensi dan masaa yang akan datang. Tema fantasi yang lain juga sering digunakan Prabowo mengenai gambaran yang akan datang, jika dirinya bisa menjadi presiden. Seperti yang ada di hampir semua slogan dan jargon politiknya yang memukau, "Kita Bangkitkan Kembali Macan Asia", "Menggemanya Indonesia Raya di atas tanah MERDEKA...!!", dan lain-lain. Namun, semua masih berupa imajinasi.

Catatan:

[1] Gambaran suasana kampanye politik terbuka Prabowo Subianto di Stadion Deltras Sidoarjo ini diambil dari suasana yang terekan dalam kaset Mini DV dokumen Metro TV Biro Surabaya. Gambar diambil oleh Kontributor Metro TV di Sidoarjo, Hery Sustiyo, tanggal 17 Maret 2009.

[2] Sumber dokumen Metro TV Biro Surabaya. Gambar diambil tanggal 17 Maret 2009 oleh kontributor Metro TV di Sidoarjo, Hery Sustiyo. Di-*translate* penulis dari hasil rekaman pada kaset Mini DV ke dalam teks.

[3] Diambil dari http://www.youtube.com. Kemungkinan gambar hidup ini dibuat oleh tim kreaktif Partai Gerindra. Dikemas layaknya sebuah *news* di televisi, berlabel, *"Saluran Nomor 5"*. Audio ditranskripsikan ke dalam teks oleh penulis.

[4] Sumber dokumen Metro TV Biro Surabaya. Ditranskripsikan penulis dari hasil rekaman di kaset Mini DV ke dalam teks.

[5] *Latar* merupakan elemen wacana yang dapat menjadi alasan pembenar gagasan yang diajukan dalam suatu teks.Seperti dalam suatu perselisihan politik, di mana secara sistematis seseorang berusaha mempertahankan pendapat kelompoknya dan menyerang argumen pihak lawan. Latar peristiwa itu dipakai untuk menyediakan latar-belakang hendak kemana suatu teks itu dibawa. Ini merupakan cermin ideologis, dimana komunikator dapat menyajikan latar-belakang atau tidak, tergantung pada kepentingan mereka (lihat Eriyanto, 2000: 11-12; Alex Sobur, 2006: 79).

[6] Sumber dokumen Metro TV Biro Surabaya. Ditranskripsikan penulis dari hasil rekaman di kaset Mini DV ke dalam teks.

[7] Selama proses wawancara berlangsung, berkali-kali Prabowo menyebut lawan bicaranya ini dengan nama Irma. Namun, tidak ada satu pun *frame* gambar *clos up* wajah pemandu acara itu sehingga tidak tahu persis siapa presenter tersebut. Gambar berbentuk rekaman video ini penulis dapat dari hasil unduhan (*downloud*) di http:// www.youtube.com sehingga memiliki kelemahan. Jika gambar dibesarkan menjadi "pecah".

Pada tahun 2002, seorang Koordinator Goverment Watch (Gowa), Farid R. Faqih, pernah melaporkan ke polisi, seorang presenter dari sebuah stasiun televisi yang juga Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat ICE on Indonesia (Iol), Irma Damayanti, terkait masalah adanya dugaan korupsi dana Rp 4,2 miliar. Dana sebesar itu dikumpulkan dari acara "Malam Peduli Jakarta" di Ancol, Jakarta Timur, 1 Maret, untuk disumbangkan kepada para korban banjir. Namun, diselewengkan. (sumber: http://mobile.liputan6.com, http://mobile.liputan6.com, "Irma Hutabarat Diperiksa Polda Metro Jaya", http://mobile.liputan6.com,

[8] Peter F. Gontha adalah pemilik dan sekaligus Dirut Q TV. Sebelum mendirikan Q TV, Peter F.Gontha pernah menjadi komisaris Grup Bimantara (Bambang Trihatmojo). Selain itu, dia juga ikut membangun RCTI, SCTV, Indovision, dan beberapa perusahaan besar seperti Plaza Indonesia Realty (The Grand Hyatt Jakarta), Bali Intercontinental Resort, PT Chandra Asri Indonesia, PT Tri Polyta Indonesia. Peter F Gontha juga mantan pemilik harian The Indonesia Observer dan Mandiri.com. Di dunia hiburan, Peter F Gontha berkiprah di dunia musik jazz dan penggagas pergelaran pentas musik Java Jazz.

[9] Sumber: *downloads* dari http://www.youtube.com/ March 17, 2009/ *Prabowo Subianto Menjawab 1*, creatorman333's *Channel*. Ditranskripsikan penulis ke dalam teks sebagai kutipan. Cetak miring dibuat oleh penulis untuk menunjukkan ada tekanan suara yang lebih tinggi. Sedang tanda titik-titik (.....) untuk menunjukkan ada jeda berhenti sedikit agak panjang, seper sekian detik.

[10] *Ibid* : *Prabowo Subianto Menjawab-1*

[11] *Ibid* http://www.youtube.com :*Prabowo Subianto Menjawab-1*

[12] *Ibid* http://www.youtube.com. *Prabowo Subianto Menjawab-5-6*

[13] *Ibid:* http://www.youtube.com. *Prabowo Subianto Menjawab-7*

[14] Yoyo adalah sebuah permainan tradisional berbahan kayu yang diraut hingga bundar dan dikasih benang persis di tengahnya, sehingga bisa dinaik-turunkan. Dalam acara Rakernas IV PDI Perjuangan di Solo, Jawa Tengah, 27 Januari 2009, Megawati Soekarnoputri mengibaratkan pemerintahan SBY-JK menjadikan rakyat seperti mainan yoyo. "Permainan yoyo indah dipandang, memiliki gerak naik-turun, terlempar ke sana ke mari. Namun, permainan itu pada dasarnya menunjukkan kehidupan rakyat yang tidak menentu. Pemerintah jangan memperlakukan rakyat seperti yoyo. Naik-turun, naik-turun. Terlempar ke sana ke mari, tak menentu," kata Megawati dalam pidatonya. Menanggapi peryatan ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan pantun meminta sebelum mengkritik bercermin dulu. Namun, tidak tegas ditujukan kepada siapa. Pubik menafsirkan pantun itu untuk membalas kritik Megawati.

[15] Wawancara Peter F Gontha dengan Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum DPN HKTI. Suber: *downloads* melalui http://www.youtube.com. *Impact - Prabowo Subianto - part 1-8 Peter Gontha Q Channel*, Jakarta, Indonesia.

[16] Suber: *downloads* melalui http://www.youtube.com. *Impact - Prabowo Subianto - part 8 Peter Gontha Q Channel*, Jakarta, Indonesia. Cetak tebal dari penulis.

[17] Suber: downloads melalui http://www.youtube.com. *Impact - Prabowo Subianto - part 2 Peter Gontha Q Channel*, Jakarta, Indonesia.

[18] *Ibid: Impact - Prabowo Subianto - part 3*

[19] *Ibid: Impact - Prabowo Subianto - part 4*

[20] *Ibid:Impact - Prabowo Subianto - part 3*

[21] *Ibid:Impact - Prabowo Subianto - part 9*

[22] *Ibid:Impact - Prabowo Subianto – part-1.*

BAB V
PENUTUP

Satu hal yang perlu dicatat, pemaparan dan uraian analisis gaya retorika komunikasi politik Letjen TNI (Purnawirawan) Prabowo Subianto di dalam buku ini hanyalah sebuah penafsiran terhadap teks tertulis di dalam *wall* dan *notes facebook* milik Prabowo selama periode kampanye terbuka menjelang pemilu legislatif 9 April 2009. Termasuk teks yang penulis baca dari bahasa *non*-verbalnya dari sebuah gambar video maupun rekaman kaset yang penulis dapatkan. Sebagai sebuah penafsiran, orang lain mungkin bisa saja memiliki penafsiran yang berbeda, walau dari sumber yang sama.

Berdasarkan data dan uraian analisis penulis, ada beberapa hal yang dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan. Secara umum, tema besar yang digunakan oleh Prabowo, baik pada saat berbicara di depan massa, wawancara di media televisi, maupun yang ditulis di *facebook* adalah isu ekonomi kesejahteraan. Hal itu sekaligus sebagai cermin dari ideologinya, sebagaimana ideologi politik yang dianut oleh orangtuanya, Profesor Sumitro Djojohadikusumo. Seorang ekonom kebanggaan Soeharto dan sekaligus orang yang pernah terlibat dalam kasus pemberontakan PPRI/Permesta terhadap negara era pemerintahan Presiden Soekarno.

Sebagai seorang penganut paham ideologi sosialis demokrat atau sosialis kanan, selama melakukan kampanye politik, Prabowo berusaha membangun wacana sistem ekonomi kerakyatan dengan konsep *welfare states* (negara kesejahteraan).

Konsep tersebut sebenarnya bukan untuk melawan sistem ekonomi kapitalisme yang menurut dia sebagai sumber utama kesengsaraan rakyat. Namun, sistem ekonomi kerakyatan *welfare states* sebenarnya hanyalah "obat penawar sesaat" yang akan diberikan kepada rakyat agar tidak menjadi sekarat. Inilah karakter dasar watak ideologi Prabowo yang juga sebagai seorang pengusaha dari keturunan keluarga besar teknokrat.

Meskipun dia selalu gembar-gembor ingin membangun sistem ekonomi kerakyatan, namun selama melakukan kampanye tidak pernah membicarakan masalah perburuhan secara mendetail. Kecuali, hanya dua kali menyebut kata buruh dalam slogannya yang ditulis di *facebook*, 19 Maret 2009:

> " Saya akan teriakkan kepada para petani, nelayan dan *buruh* di Danau Cimpago, Padang: "Kalian Berhak Untuk Mendapatkan Kehidupan yang Lebih Baik..!!" dan "Setelah dzuhur saya akan bertemu petani, peternak, nelayan dan *buruh* di Danau Cimpago, Padang.... Mari Berjuang menuju Indonesia lebih Baik....!!".

Masalah perburuhan, tampaknya memang bukan sektor riil masyarakat yang mendapat perhatian serius dalam kampanye Prabowo dengan Partai Gerindra. Titik tekan utama wacana yang dia bangun hanya masalah petani sebagai lokomotif perubahan.

Namun, wacana keperpihakannya di sektor petani, sebenarnya juga masih bersifat "semu". Melalui penyaluran kredit, koperasi, dan pembangunan-pembangunan bank petani. Ini artinya, dia sebenarnya ingin mengajak dan menyeret para petani terjebak ke dalam hegemoni kredit bank kapitalis. Koperasi sebagai "rentenir gaya baru" memang tampak indah di depan. Namun, sebenarnya, mencekik leher dari belakang.

Selama melakukan kampanye, dia teriakkan masalah pangan dan kesejahteraan petani. Namun, sayangnya, dia tidak pernah sekalipun menyinggung masalah *landreform* atau reformasi agraria. Itulah yang menjadi bukti ihwal apa yang sebenarnya dia kampanyekan sebagai "sistem ekonomi kerakyatan" ternyata semu belaka. Pasalnya, tidak mungkin petani bisa memproduksi pangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, jika tidak memiliki lahan yang digunakan untuk bercocok tanam. Padahal, menurut Bung Karno, perubahan tanpa *landreform* ibarat bangunan tanpa pondasi.

"Revolusi Indonesia tanpa *landreform* adalah sama saja dengan gedung tanpa alas, sama saja dengan pohon tanpa batang, sama saja dengan omong-besar tanpa isi. Melaksanakan *landreform* berarti melaksanakan *satu bagian yang mutlak dari Revolusi Indonesia.* Gembar-gembor tentang Revolusi, Sosialisme Indonesia, Masyarakat Adil dan Makmur, Amanat Penderitaan Rakyat, tanpa melaksanakan *landreform*, adalah gembar-gembornya tukang penjual obat di Pasar Tanah Abang atau Pasar Senen.

Toh! – Jangan mengira bahwa *landreform* yang kita hendak laksanakan itu adalah "Komunis"! Hak milik atas tanah *masih kita akui!* Orang masih boleh mempunyai tanah turun-temurun! Hanya luasnya milik itu diatur, baik *maksimalnya* maupun *minimumnya*, dan hak milik atas tanah itu kita nyatakan berfungsi sosial, dan Negara dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum mempunyai kekuasaan yang lebih tinggi dari pada hak milik perseorangan.

Ini bukan "Komunis"! Kecuali itu, apakah orang yang tidak tahu bahwa negara-negara yang bukan komunis pun banyak yang menjalankan *landreform*? Pakistan menjalankan *landreform*, Mesir menjalankan *landreform*, Iran menjalankan *landreform*! Dan PBB sendiri tempo hari menyatakan bahwa *"defects in Agrarian structure, and in particular systems of land tenure, prevent a rise in impede economic development"*. (Keburukan-keburukan dalam susunan

pertanahan, dan terutama sekali keburukan-keburukan dalam cara-cara pengolahan tanah, menghalangi naiknya tingkat hidup si tani-kecil dan si buruh pertanian, dan menghambat kemajuan ekonomis).

Karena itu, hadapilah persoalan *landreform* ini secara *zakelijk*-objektif sebagai satu soal keharusan mutlak dalam melaksanakan Amanat Penderitaan Rakyat"1.

Kutipan tersebut hanya sekadar untuk menarik kesimpulan gaya retorika komunikasi politik Prabowo Subianto yang selama ini dinilai publik sebagai "Soekarno kecil". Karena, gaya bicara, pemilihan jargon, dan orasi Prabowo dinilai banyak mengadopsi gaya orasi Bung Karno.

Selain meniru gaya orasi Bung Karno yang berapi-api, heroik, dan lantang suaranya untuk membakar semangat massa, secara umum gaya bicara Prabowo memang lugas, tegas, dan terbuka. Ini menunjukan, dia adalah orang yang memiliki gaya budaya komunikasi konteks-rendah sebagaimana orang-orang Eropa Barat dan Amerika Utara. Hal ini wajar karena Prabowo sejak kecil sudah tinggal di luar negeri.

Namun, meskipun secara umum dominasi gaya bicara Prabowo dapat disebut sebagai gaya budaya komunikasi konteks-rendah, bukan berarti mantan menantu penguasa Orde Baru itu tidak memiliki gaya budaya komunikasi konteks-tingggi, sebagaimana ciri khas orang Indonesia. Namun, gaya komunikasi budaya Indonesia yang tertutup, samar, suka berbasa-basi, dan berbelite-belite, masih ada di dalam gaya komunikasi Prabowo.

Hal ini terlihat dari cara bicaranya yang beberapa kali juga mencoba berkelite, basa-basi, dan diplomatis ketika ditanya alasannya terjun ke politik; maupun pada saat ditanya mengenai karakteristik pribadinya yang temperamental. Dia mencoba muter-muter dan mencari-cari apologi pembenar, meskipun pada akirnya dia mengakui.

Menggunakan ekspresi wajahnya serius, dalam setiap menyampaikan pesan yang dianggap penting. Menggunakan gaya bahasa yang berlebihan dan pengulangan kata dan frase kalimat tertentu untuk menonjolkan makna pesan yang dianggap penting kepada publik. Menggunakan jargon untuk mengubah dan membentuk wacana kolektif khalayak berimajinasi mengenai sebuah perubahan.

Sebagai seorang mantan petinggi tentara, Prabowo juga masih menanamkan doktrin layaknya Soeharto pada zaman Orde Baru, yang menanamkan wacana bahwa TNI adalah tentara rakyat. Wacana ini sengaja dikembangkan untuk mengkonstruksi dan menghegemoni pemahaman rakyat mengenai citra TNI. Melalui wacana ini, Prabowo berusaha menanamkan ideologi politik militernya yang membela rakyat, terutama petani. Meskipun pada tataran realitasnya yang ada, konflik sengkata tanah antara warga masyarakat (mayoritas petani) dengan institusi militer selalu terjadi di negeri ini, pasca-runtuhnya rezim diktaktor militeristik Soeharto, 21 Mei 1998.

Begitulah gaya retorika komunikasi politik Prabowo selama melakukan kampanye politik sebelum pemilu legislatif 9 April 2009; keras dan galak. Bahkan, usai pencontrengan, gaya retorika komunikasi politiknya pun masih tetap galak. "Siapa yang galak?!" demikiaan ucapnya menyerang balik ketika SBY mengeluarkan pernyataan, "Hati-hati, jangan galak-galak, mengatakan curang, curang! Belum lama, pemilu 2004 berlangsung. Saya punya memori banyak. Tapi biarlah menjadi bagian dari masa lalu. Jangan banyak menguliah soal curang dan tidak curang. Saya mempunyai pengetahuan tentang beliau-beliau pada waktu yang lalu." Pernyataan SBY itu disiarkan diberbagai media massa cetak maupun elektronika.

Pernyataan Prabowo jelas menunjukan karateristik gaya budaya komunikasinya. Bisa jadi ini adalah karakter gaya retorika komunikasi politik para mantan jenderal dan militer. Galak dan saling menyerang sebagaimana layaknya bertempur. Dipanggung politik, logika tempurnya pun digunakan melalui retorika komunikasi politik yang menyerang.

Gaya retorika komunikasi politik yang galak, tegas, dan terbuka ini tentu sesuai dengan karakteristiknya yang memang lebih cenderung memiliki gaya budaya komunikasi konteks-rendah.

Namun, gaya budaya komunikasi ini tentu tidak dapat dikotomi atau digebyah uyah bahwa semua mantan jenderal memiliki gaya budaya komunikasi kontek-rendah yang lugas, terbuka, dan menyerang.

Hanya sekadar perbandingan, mantan Presiden Soeharto juga seorang mantan pasukan tempur. Namun, Soeharto memiliki gaya budaya komunikasi kontek-tinggi, yakni tertutup, samar, dan tidak langsung menyerang di permukaan. Hal ini karena Soeharto dilahirkan sebagai orang Jawa tulen yang belum terkontaminasi budaya luar yang cenderung memiliki karkter budaya komunikasi konteks-tinggi. Selain itu, Soeharto juga tidak memiliki latar-belakang pendidikan yang tinggi. Tentu berbeda dengan Prabowo yang sejak kecil tinggal di luar negeri.

Dari perspektif politik praktis, gaya retorika komunikasi politik Prabowo tentu tidak menguntungkan. Mengingat kultur budaya masyarakat Indonesia saat ini secara umum lebih cenderung memiliki gaya komunikasi konteks-tinggi, yakni samar, tertutup, dan banyak basa-basi. Boleh jadi apa yang dikatakan Prabowo memang benar, tetapi karena disampaikan melalui gaya komunikasi yang terbuka, masyarakat yang secara umum memiliki gaya budaya komunikasi konteks-tinggi bisa jadi malah memiliki penilaian negatif.

Gaya bicara Prabowo yang suka menyerang justru bisa berpotensi menjadi bumerang. Rakyat dapat menafsirkan dia adalah sosok orang yang galak, sehingga bisa "berbahaya" jika terpilih menjadi presiden di negeri ini, kelak. Namun, masyarakat Indonesia yang memiliki kultur gaya komunikasi konteks-tinggi, ternyata juga tidak begitu suka dengan model gaya komunikasi politik Megawati Soekarnoputri yang cenderung diam, karena Megawati memandang "diam itu emas".

Sikap diam semacam itu yang pernah diambil oleh Megawati sebagai gaya komunikasi politik, ternyata berakibat fatal. Sikap diam yang dimaknai sebagai gaya komunikasi politik "diam itu emas", ternyata oleh publik dimaknai "diam" Megawati karena "tak mampu bicara".

Secara umum, karakter budaya masyarakat Indonesia yang tidak suka melihat banyak orang bicara. Namun, bukan berarti seperti gaya komunikasi "diam emasnya" Megawati yang justru

dapat melahirkan penilaian negatif publik. Gaya retorika komunikasi politik yang efektif untuk kultur budaya masyarakat Indonesia, sebaiknya memadukan antara gaya budaya komunikasi konteks-tinggi dengan konteks-rendah. Jujur, terbuka, tidak banyak basa-basi, namun tetap santun. Siapa pun dia, tanpa perpaduan gaya budaya komunikasi semacam itu, rasanya sulit untuk dapat diterima. Lantaran itulah seni manajemen berbicara yang kini seakan dilupakan oleh para elite politik yang sedang ingin merebut maupun yang sedang berusaha mempertahankan kekuasaannya, menjadi penting. Tanpa seni manajemen gaya retorika komunikasi politik yang tepat, niscaya mereka akan mengalami kesulitan untuk dapat "menguasai" publik..

Prabowo yang memiliki gaya komunikasi lugas, tegas, dan menyerang boleh berdalih, buktinya Partai Gerindra memperoleh suara 4 persen lebih dalam pemilu legislatif 9 April 2009. Namun, sebenarnya, perolehan suara itu bukan karena kemapuannya alam mengemas gaya retorika komunikasi politik sebagai sebuah seni berbicara; juga bukan karena kemampuan kader partai politiknya yang berjalan secara efektif. Lebih dari itu, karena faktor kekuatan biaya iklan politik Partai Gerindra yang besar di media televisi. Sehingga namanya yang sudah pernah tenggelam dapat "dipermak" dan dibingkai kembali melalui sebuah pesan media televisi.

Dalam panggung politik demokrasi liberal, uang memang lebih menentukan daripada kemampuan lain di luar uang. Siapa yang bisa menguasai uang, dia pun akan dapat menguasai jagad politik praktis masa kini. Namun, gaya komunikasi politik uang, secara pelan tapi pasti, akan berakhir. Tamatnya gaya komunikasi politik uang itu terjadi seiring dengan bangkitnya kesadaran politik rakyat yang pelan-pelan tapi pasti, akan menuju pada sebuah kesadaran politik sejati ■

Catatan:

1 Pidato Presiden Soekarno, 17 Agustus 1960. Dikutip dari N.W. Moeljani et al (penyusun) 1965, *"Bahan-Bahan Indoktrinasi"*, Malang: Team Indoktrinasi II, hal 178-179.

Daftar Pustaka

Artha, Arwani Tuti, (2007), *Kudeta Mei '98 Persetruan Habibie-Prabowo,* Yogyakarta: Galangpress.

Condon Jr, Jhon C (1985), *Semantic and Communication,* Third Edition, New York: Macmillan Piblishing Company.

Eriyanto, (2000) *Kekuasaan Otoriter Dari Gerakan Penindasan Menuju Politik Hegemoni Studi atas Pidato-Pidato Politik Suharto,*Yogyakarta:INSIST dan Pustaka Pelajar.

——2001), *Analisis Wacana Pengantar Analisis Teks Media,* Yogyakarta: LKiS

Esping-Andersen, Gosta (1997), "After the Golden Age? Welfare State Dilemmas in a Global Economy" dalam Gosta Esping-Andersen (ed), *Welfare States in Transition: National Adaptations in Global Economics.*

Firmanzah, (2008), *Marketing Politik Antara Pemahaman dan Realitas,* Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Foucault, Michel, (1972), *The Archaeology of Knowledge & The Discourse an Language,* New York: Pantheon Books.

Foss, Sonnya K. (1989) *Rhetorical Criticism: Exploration and Practice,* Llinos, Maveland Press Inc.

Habermas, Jurgen (2007), *Teori Tindakan Komunikasi Rasio dan Rasionalitas Masyarakat (1 dan 2),* Yogyakarta: Kreasi Wacana.

Habibie, Bacharuddin Jusuf, (2006) *Detik-Detik yang Menentukan Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi,* Jakarta: HTC Mandiri.

Hendrikus, Dori Wuru (2009) *Retorika Terampil Berpidato, Berdiskusi, Berargumentasi, Bernegosisasi,*Yogyakarta: Kanisius.

Gamson, William A, "Media Discourse as a Framing Resource" dalam Ann N. Crigler (ed), *The Psychology of Political Communication,* Ann Abror, The University of Michigan Press, 1996.

Gamson, William A and Andre Modigliani, *"Media Discourse and Public Opinion on Nuclear Power.* A Contructionist Approach", *American Journal of Sociologi,* Vol 95 No.1, 1989.

Jalaluddin, Rakhmat, (1993), *Komunikasi dan Perubahan Politik di Indonesia*, Audientia, Vol.1, No.2.

——(2008), *Retorika Modern Pendekatan Praktis*, Bandung: Rosdakarya.

Kusuma, Hendra, (2008), *Mempengaruhi dengan Kekuatan Bicara*, Yogyakarta: Pinus Book Publisher.

Littlejohn, Stephen W, (2002), *Theories of Human Communication*, Seventh Edition, Wadsworth Thomson Learning.

Luhulima, James, (2005), *Hari-Hari Terpanjang Menjelang Mundurnya Presiden Suharto*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Mulyana, Deddy, (2005), *Komunikasi Efektif Suatu Pendekatan Lintasbudaya*, Bandung: Rosdakarya.

Nimmo, Dan, (2005), *Komunikasi Politik, Komunikator,Pesan, dan Media*, Bandung: Rosdakarya.

N.W, Moeljadi, dkk (Penyusun) 1965, *Bahan-Bahan Indoktrinasi*, Malang:Team Indoktrinasi II.

Rachmadi, F, (1996), *Public Relations Dalam Teori dan Praktek, Aplikasi Dalam Badan Usaha Swasta dan Lembaga Pemerintah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Rivers, William L. dan Cleve Mathews, (1994), *Etika Media Massa dan Kecenderungan untuk Melanggarnya*, Jakarta: Gramedia.

Ritzer, George, Douglas J.Goodman, (2007), *Teori Sosiologi Modern*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Roeder, O.G, (1998) *The Smiling General: President Suharto of Indonesia*, Jakarta, Saidi, Zaim, *Suharto Menjaring Matahari*, Bandung: Mizan.

Setiono, Benny G, (2008), *Tionghoa Dalam Pusaran Politik, Mengungkap Fakta Sejarah Tersembuyi Orang Tionghoa di Indonesia*, Jakarta: TransMedia Pustaka.

Spicker, Paul (1995), *Social Policy: Themes and Approaches*, London: Prentice Hall.

——(2002), *Poverty and the Welfare State: Dispelling the Myths*, London: Catalyst.

Steinberg, Arnold, (1981), *Kampanye Politik Dalam Praktek*, Jakarta: Intermedia.

Sobur, Alex, (2006), *Analisis Teks Media Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, Bandung: Remaja Rosdakarya.

Soempeno, Femi Adi, (2009), *Prabowo Dari Cijantung Bergerak ke Istana*, Yoyakarta: Galangpress.

Subroto, Hendro, (2009) *Sintong Panjaitan Perjalanan Seorang Prajurut Para Komando*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Suharto, Edi (2005), *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Bandung: Alfabeta.

——2005), *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Bandung: Refika Aditama.

Stephens, John D. (1997), "The Scandinavian Welfare States: Achievements, Crisis, and Prospects" dalam Gosta Esping-Andersen (ed), *Welfare States in Transition: National Adaptations in Global Economics.*

Siahaan, Hotman M ,dkk, (2001), *Pers Yang Gamang Studi Pemberitaan Jajak Pendapat Timor Timur*, Surabaya:Lembaga Studi Perubahan Sosial dan Jakarta:Institut Studi Arus Informasi.

Wijana, I. Dewa Putu, (1996), *Dasar-Dasar Pragmatik*, Yogyakarta: Andi.

Zen, Kivlan, (2004), *Konflik dan Integrasi TNI AD*, Jakarta: Institue for Policy Studies.

Media dan Internet

Aditjondro, George Junus, Jumat, 2009 Maret 06, www.rulysymanda.org/politick-tric/ *"Menyongsong Era Soeharto Babak Kedua"*.

Budi, Johan S.P, ttp://majalah.tempointeraktif.com/id/arsip/2001/03/12/ *"Ia Masih Memikirkan Kondisi Negara"*.

Mutiah, Dinny http://www.mediaindonesia.com/Kamis, 12 Februari 2009 22:25 WIB, "Belanja Iklan Gerindra Rp46,7 Miliar"

Kuntowijoyo, "An Act of Reason dan an Act of Taith dalam Sejarah Indonesia", *Kompas*, 24 Maret 1998.

Kompas, Mutlak, Regenerasi Kepemimpinan Politik Figur Menguat" Sabtu, 18 April 2009.

Kompas, "Lengser dan Seleh Keprabon: Otak-Atik Gathuk dalam Kasus Soeharto", 13 Desember 1998.

http://www.tempointeraktif.com/id/arsip/1998/12/29/NAS/html, *"Koneksi Prabowo di Negeri Gurun".*

http:www.tempointeraktif.com/ Selasa, 10 Maret 2009 | 09:52 WIB/ *"Laporan Dana Kampanye Partai Dinilai Konyol".*

http://www. kompas.com/ Senin, 22 Desember 2008/ 21:02 WIB, *"Ibu Prabowo Meninggal di Singapura".*

http://cetak.kompas.com/Rabu, 23 April 2008 | 00:59 WIB/ *"Belanja Iklan Terus Membesar".*

http://cetak.kompas.com/ Sabtu, 7 Maret 2009 | 22:18 WIB/ *"Dana Kampanye Gerindra Paling Besar, Rp 15 Miliar".*

http://www. kompas.com/ Selasa, 3 Februari 2009 | 11:24 WIB/ *Awas! 2009 Jumlah Pengangguran Bakal Naik.*

http://www. kompas.com/Selasa, 17 Februari 2009 | 09:23 WIB/ *Mennakertrans: SBY-JK Turunkan Jumlah Pengangguran.*

http://www. kompas.com/Jumat, 13 Februari 2009 | 03:33 WIB/ *Kemiskinan Bertambah:Pastikan Semua Proyek Padat Karya Segera Berjalan.*

http://www. kompas.com/Kamis, 10 Juli 2008 | 12:33 WIB/ 2009, *Orang Miskin Meningkat Drastis.*

http://www. kompas.com/Jumat, 24 April 2009 | 05:35 WIB/ *Pemprov Jatim Survei Penerapan UMK.*

http://pemilu.okezone.com/index.php/read/2009/01/23/268/ 185860/ "Amien: Dukungan Cendana Malah Rugikan Prabowo".

http://www.youtube.com/ September 18, 2008/ *Impact - Prabowo Subianto - part 1-9 Peter Gontha Q Channel*, Jakarta: Indonesia.

http://www.youtube.com/ March 17, 2009/ *Prabowo Subianto Menjawab 1- 10,* creatorman333's Channel.

http://mobile.liputan6.com/ 02.08.02.07:51/ "Irma Hutabarata Diperiksa Polda Metro Jaya.

http: //www.prabowosubianto.info/Aktivitas Bisnis - Nusantara Energy.

Tentang Penulis



Sidik Suhada lahir di Desa Kuripan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, 28 Agustus 1974. Ayahnya, Slamet (almarhum), seorang serdadu Angkatan 1945 berpangkat Peltu TNI AD. Sedangkan ibunya, Hj. Mujirah, seorang petani miskin dan pemeluk agama Islam yang taat.

Mengawali sekolah di SDN 3 Kuripan, lulus 1987. Melanjutkan sekolah di SMP Pemda 2 Menganti, Cilacap. Namun hanya sampai kelas 2. Pendidikan SMP diselesaikannya di SMP Bhakti Negara, Wonosalam, Demak tahun 1990. Melanjutkan sekolah di SMA Sri Mukti Cilacap selama setengah tahun dan dilanjutkan di SMA Jenderal Ahmad Yani, Cilacap, hingga lulus tahun 1994.

Selepas SMA, penulis bekerja sebagai kuli bangunan di Jakarta dan Surabaya hingga pertengahan tahun 1995. Penulis juga pernah bekerja menjadi buruh di perkebunan kelapa sawit di daerah Kikim, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Tahun 1996, penulis menjadi kuli panggul di tempat jasa paket pengiriman barang di Bandung, hingga pertengahan tahun 1997.

Juli 1997, penulis tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Komunikasi FISIP Universitas Muhammadiyah Malang, dan berhasil meraih gelar sarjana pada Juli 2002. Semasa menjadi mahasiswa di Malang, penulis aktif terlibat di dalam kelompok studi dan beberapa forum studi serta organisasi kemahasiswaan.

Sejak tahun 2000 hingga 2004, secara aktif penulis mengintegrasikan diri dengan organisasi serikat buruh. Pernah menjadi Sekretaris DPC Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI) Malang, tahun 2004.

Pengalaman di dunia jurnalistik diawali tahun 1996 sebagai penulis lepas di Harian *Pikiran Rakyat* Bandung. Selama menjadi mahasiswa, sesekali juga menulis di surat kabar harian lokal. Tahun 2005 menjadi jurnalis di Tabloid Hukum *Supremasi* di Malang. Selama setahun (Juni 2007 - Mei 2008) menjadi Kontributor Metro TV untuk wilayah Malang dan Blitar. Sejak Juni 2008 bergabung dan menjadi kontributor Astro Awani untuk wilayah Jawa Timur. Namun, tidak berlangsung lama, stasiun televisi kabel itu berhenti siaran.

Kini penulis sedang menempuh pendidikan S2 Program Studi Media dan Komunikasi FISIP Universitas Airlangga Surabaya, sejak pertengahan 2008.